Jurnal Kajian Perburuhan
SEDANE
Volume 8, No. 2, 2009

Lembaga Informasi Perburuhan Sedane

Bagaimana 1 Mei Dirayakan Pada Masa Lalu?

Jurnal Kajian Perburuhan SEDANE

Vol. 8
No. 2
2009

Jurnal Kajian Perburuhan

Sedane

Vol 8, No. 2, 2009

GAGASAN

Bagaimana 1 Mei Dirayakan Pada Masa Lalu?
Studi Perayaan Hari Buruh 1946-1947
Jafar Suryomenggolo [2]

Gerakan Sosial di Bolivia: Pengalaman Melawan Privatisasi
Angga Natariandi [27]

Privatisasi, Fleksibilasi, dan Pemberangusan Serikat
Komite Solidaritas Nasional [57]

DIALOG

Sumiyati *Perusahaannya berusaha untuk menyingkirkan SP* [80]
Rudy *Perjuangan Pokok di Tingkat Pabrik* [86]

TOKOH

Fauzi Abdullah: Obor Penerang yang Tak Pernah Padam
(Mengenang Fauzi Abdullah - 27 November 2009)
Fauzan Mahdami [92]

TINJAUAN BUKU

Dari Brazil ke Indonesia: Upaya Mengatasi Fragmentasi Gerakan
Angga Natariandi [101]

DINAMIKA

Dinamika Perburuhan Semester II 2009 [107]

ISSN 0852-1240

Penerbit
Lembaga Informasi Perburuhan Sedane

Dewan Redaksi
Fauzan Abschuetz
Syarif Arifin
Agus Rakasiwi

Editor
Syarif Arifin

Redaktur Tamu
Jafar Suryomenggolo
Tim Komite Solidaritas Nasional (KSN)

Desain & Layout
Angga Natariandi

Keuangan
Danu Raditya

Admin & Sirkulasi
Sriyanti
Taufik Mahdami

Alamat Redaksi dan Sirkulasi
Jl. Dewi Sartika 52F
Bogor 16121
Jawa Barat-Indonesia
Tlp. / fax
+62-251-8344473
Situs Web
www.lips.or.id
Email
lips@lips.or.id

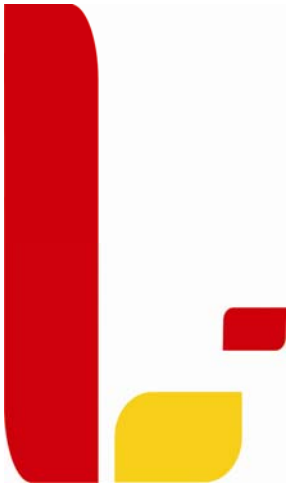

Penyebaran Jurnal Perburuhan SEDANE untuk kepentingan gerakan sosial sangat dianjurkan. Pengutipan harap mencantumkan sumber.

Pengantar Redaksi

LIPS mencatat selama Januari-Desember 2009 lebih dari 300.900 orang ter-PHK. Korban terbanyak diwakili oleh Sektor Tekstil Sandang dan Kulit (TSK). Industri TSK merupakan sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja (15,8 persen dari industri manufaktur). Alasan-alasan PHK masih saja berkaitan dengan dampak krisis keuangan global. Pola-pola PHK-nya beragam. Beriringan dengan ACFTA, para pengusaha mengeluh mengenai melemahnya daya saing industri nasional. Daya saing seperti kata mujarab untuk menggantikan kata: kurangi hak buruh, bantu kami untuk mengimpor bahan baku dan mengekspor barang jadi.

Pembaca yang budiman, paragraf di atas adalah sebagian dari tulisan yang terdapat **Jurnal Kajian Perburuan Sedane Vol. 8. No. 2 2009**. Anda dapat menemukan deskripsi mengenai PHK dan pola-polanya dalam Rubrik Dinamika. LIPS juga mencatat, dinamika serikat buruh selama 2009, yang diperlihatkan dengan aksi protes banyak terjadi di Mei 2009. Mereka beraksi tidak lagi berdasar sektor, tapi Aliansi Serikat.

Seperti biasa, Jurnal Sedane kembali menyapa Anda dengan tulisan-tulisan perburuhan. Terdapat tiga artikel, dua wawancara, tinjauan buku, dan profil tokoh. Semoga tema-tema tersebut dapat menginspirasi kita untuk memperkuat dan memajukan serikat buruh. Setiap tulisan dapat dibaca secara acak, tidak perlu runut.

Artikel pertama sangat menarik. Jafar Suryomenggolo kembali menyumbangkan tulisan sangat berharga bagi kita. Dia menulis mengenai sejarah 1 Mei di Indonesia. Tulisan tersebut mengeksplorasi mengenai bacaan dan sumber informasi para buruh masa itu dan bagaimana 1 Mei dirayakan. “Perayaan 1 Mei bukanlah semata-mata milik kelompok kiri saja (sebagaimana digambarkan dalam sejarah bikinan Orde Baru)”, demikian salah satu kutipan tulisan Jafar. Menurutu kami, kita tidak perlu ragu lagi untuk merayakan 1 Mei sebagai Hari Buruh. Ayo rayakan 1 Mei dengan gegap gempita.

Dalam Gagasan kedua Anda akan menemukan tulisan mengenai gerakan sosial di Bolivia. Tulisan tersebut juga berharga bagi kita, yang mengalami pasang surut persatuan. Dan, tidak sedikit mengalami keputusasaan akibat deraan

mahahebat neoliberalisme. Tapi, Angga Natariandi, penulis “Gerakan Sosial di Bolivia: Pengalaman Melawan Privatisasi” dengan bernas memaparkan bagaimana peluang politik dan kontrahegemoni diarahkan untuk melawan rejim privatisasi. Angga memaparkan bagaimana meramu isu dan menggarap massa secara luas dapat dilakukan demi melawan kezhaliman neoliberalisme.

Gagasan ketiga memaparkan mengenai problematika buruh dan serikat buruh di Indonesia. Tim Penulis Komite Solidaritas Nasional (KSN), menyumbangkan tulisan sangat eksploratif mengenai hubungan antara kapital monopoli dan penggerusan hak-hak rakyat. Pengejawantahan penindasan itu begitu masif di bawah proyek privatisasi, fleksibiliasai dan pemberangusan serikat. Pemetaan masalah dari tulisan tersebut mudah-mudahan dapat mempermudah kita dalam menentukan langkah perjuangan.

Pembaca yang budiman, Tim Jurnal Sedane juga tidak lupa menurunkan dua wawancara bersama pimpinan serikat buruh, profil tokoh, dan tinjauan buku. Semua itu kami persembahkan untuk Anda.

Tim Jurnal Sedane mengucapkan terima kasih kepada para penulis; Jafar Suryomenggolo, Angga Natariandi, Tim KSN, Rudy, Sumiyati dan Fauzan. Kontribusi kawan-kawan sangat berarti bagi penerbitan jurnal.

Kepada kawan-kawan yang tidak berhenti memberikan masukan, kritikan dan doanya, kami mengucapkan terima kasih. Kami tunggu kritikan kalian yang lebih tajam! Tidak lupa, Tim Jurnal juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyumbangkan dana untuk penerbitan Jurnal Sedane. Karena sumbangan kawan-kawanlah Jurnal ini bisa terbit. *Thank’s banget ya*!

Akhirul kalam, semoga Jurnal Sedane Vol. 8 No. 2 2009 berguna bagi kemajuan serikat buruh dan terpenuhinya hak-hak ekosob dan sipol buruh di Indonesia.

Selama membaca!

Jurnal Kajian Perburuhan

Gagasan Sedane

Vol 8, No. 2, 2009

Bagaimana 1 Mei Dirayakan Pada Masa Lalu?
Studi Perayaan Hari Buruh 1946-1947
Jafar Suryomenggolo

Gerakan Sosial di Bolivia: Pengalaman Melawan Privatisasi
Angga Natariandi

Privatisasi, Fleksibilasi, dan Pemberangusan Serikat
Komite Solidaritas Nasional

Bagaimana 1 Mei Dirayakan Pada Masa Lalu?; Studi Perayaan Hari Buruh 1946-1947*

Jafar Suryomenggolo

1. Pengantar

Semenjak runtuhnya Orde Baru di tahun 1998, selama 10 tahun terakhir ini, hari 1 Mei selalu dirayakan dengan penuh semangat. Panji-panji tuntutan diusung. Beragam media massa juga menjadikan perayaan 1 Mei sebagai sajian liputan utama. Ini karena serikat buruh, walau belum menjadi satu kekuatan sosial yang berpengaruh, punya potensi besar dalam menyuarakan kepentingan masyarakat umum. Tuntutan serikat buruh menjadi satu alat ukur keresahan masyarakat mengenai keadilan sosial. Karena itu, perayaan 1 Mei menjadi titik pertautan antara dua hal. Di satu sisi, ia menjadi bentuk sukacita gerakan buruh dalam perayaan pencapaian perjuangannya terdahulu. Di sisi yang lain, ia adalah ekspresi keprihatinan serikat buruh akan beragam masalah ekonomi-sosial-politik kaum rendahan yang mesti diperjuangkan dalam kerangka dinamika sosial.

Kondisi ini berbeda dari situasi pada masa Orde Baru. Sejak 1967, perayaan 1 Mei diharamkan, walau tidak ada peraturan hukum yang menyatakan demikian. Aparatus resmi Orde Baru menghendaki kepatuhan kelas buruh lewat kontrol politik dan teror sosial. Sebab, justru aturan hukum yang berlaku pada masa Orde Baru, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1948, memberikan jaminan kesempatan bagi buruh untuk "dibebaskan dari kewajiban bekerja" untuk "merayakan hari kemenangannya". Jaminan hukum dalam UU No. 12/1948 itu dipendam dalam politik kebisuan, yang ditebar Orde Baru sehingga mengaburkan ingatan sejarah kolektif buruh akan puncak-puncak perjuangannya. Sebagaimana akan digambarkan dalam catatan awal ini, jaminan hukum dalam UU No.12/1948 adalah buah perjuangan serikat buruh. Dan, perumusannya di dalam aturan hukum merupakan bentuk pengakuan negara terhadap perjuangan buruh. Jaminan bagi buruh untuk "merayakan hari kemenangannya" itu tidak serta-merta diberikan begitu saja oleh negara tanpa perjuangan serikat buruh.

Sebagaimana diketahui, kebijakan Orde Baru merupakan reaksi pembatasan atas aktivitas serikat buruh dari masa sebelum 1965. Ada kesan kuat yang ditanamkan dalam penulisan sejarah bikinan Orde Baru bahwa aktivitas serikat buruh sebelum 1965 hanya menciptakan benturan sosial di dalam masyarakat. Serikat buruh dianggap biang kerok sosial. Dalam sejarah bikinan Orde Baru, kesan negatif itu disusun dengan menenggelamkan buah-buah perjuangan serikat buruh bagi kesejahteraan masyarakat umum. Contoh yang jelas, adalah soal Tunjangan Hari Raya (THR). THR adalah buah perjuangan serikat Buruh dari 1950. Akhirnya diakui dalam aturan hukum pada 1960 sebagai hak ekonomi buruh, dan akhirnya diterima

* Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fahmi Panimbang yang bersedia membaca dan memberikan komentar dan kritik atas naskah awal tulisan ini. Segala kesalahan adalah tanggung jawab penulis.

masyarakat sebagai kaidah sosial. Hanya saja, selama Orde Baru, THR dihapuskan dari pengakuan hak buruh, dan terlebih lagi, sejarah perjuangan serikat buruh akan THR dikaburkan dari ingatan kolektif.

Jika menilik sejarah, bagaimana sesungguhnya 1 Mei dirayakan pada masa lalu, sebelum Orde Baru? Catatan awal ini hendak menekankan pembahasan pada masa 1946-1947, sebelum terbitnya UU No. 12/1948 tersebut. Hendak diperlihatkan bahwa, pada masa-masa awal kemerdekaan itu 1 Mei dirayakan dengan penuh kegairahan. Gerakan buruh menikmati alam kemerdekaan, dan upaya-upayanya dalam membela tanah air. Namun juga, 1 Mei dirayakan sebagai upaya mengajukan beberapa tuntutan serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-hak buruh. Pertautan antara perjuangan kemerdekaan nasional dan juga perjuangan sebagai gerakan buruh, membawa pada perumusan jaminan hukum bagi buruh untuk "dibebaskan dari kewajiban bekerja untuk merayakan hari kemenangannya" sebagaimana terumuskan dalam UU No.12/1948.

Untuk memberikan konteks sejarah perayaan 1 Mei, tulisan ini akan dimulai dengan pembahasan tentang arti penting terbitan buruh sebagai sumber bacaan kaum buruh dalam masa-masa awal kemerdekaan (bagian 2). Bebas dari kekangan kolonialisme Barat dan Jepang, kaum buruh haus akan informasi dan pengetahuan akan dunianya sendiri dan perkembangan-perkembangan sosial-politik. Di titik inilah, hari 1 Mei sebagai satu bentuk perayaan kemenangan buruh masuk sebagai khasanah perjuangan gerakan buruh Indonesia. Secara khusus (di bagian 3 dan 4) akan dibahas dua buku yang cukup populer pada jaman itu, untuk menandai bagaimana 1 Mei dimaknai, dipersepsikan, dan disebarluaskan di dalam gerakan buruh. Pada bagian berikutnya (bagian 5), akan dibahas bagaimana perayaan 1 Mei pada 1946 dan 1947 diselenggarakan dan kegiatan-kegiatan apa yang disusun oleh gerakan buruh. Ini untuk menggambarkan bahwa kegiatan perayaan 1 Mei bukanlah sekedar acara luapan kemenangan, melainkan merupakan hasil pergulatan serikat buruh dalam menjawab tantangan jamannya akan keadilan sosial dan persatuan. Di sini akan pula dibahas bagaimana UU No.12/1948 dirumuskan. Di bagian akhir (bagian 6), catatan awal ini akan ditutup dengan kesimpulan singkat akan arti penting perayaan 1 Mei bagi perkembangan gerakan buruh di masa selanjutnya.

2. Terbitan Buruh Sebagai Narasi Sosial

Catatan awal ini berpijak pada satu fakta sejarah, bahwa cukup banyaknya terbitan buruh pada masa-masa awal kemerdekaan 1945-1948 di Pulau Jawa. Walau sedikit saja yang kini terselamatkan, dapat kita telusuri beragam majalah internal serikat buruh dan juga serangkaian buku saku terbitan gerakan buruh. Semuanya beredar di kalangan buruh. Usai berakhirnya masa penjajahan Jepang tumbuh berbagai serikat buruh. Juga, munculnya serikat buruh di tingkat nasional yang dipelopori oleh kelompok kiri (yang di kemudian hari tergabung dalam Sayap Kiri di dalam BP-KNIP, Badan Pekerdja-Komite Nasional Indonesia Poesat, sebagai "parlemen transisi" pada masa itu). Selain bernuansa propaganda, terbitan-terbitan

tersebut memberikan informasi-informasi baru (dalam hal Majalah) dan juga ide-ide serapan (dalam hal Buku Saku) bagi para buruh pembacanya.

Misalnya saja, Majalah "Kereta Api" yang diterbitkan oleh Serikat Buruh Kereta Api (SBKA). SBKA adalah serikat buruh di kalangan buruh kereta api di tanah Jawa, yang didirikan sebagai hasil Kongres 12-13 Maret 1946. Terbit mingguan. Majalah "Kereta Api" secara beragam berisikan berita organisasi, opini editor, beberapa artikel lepas tentang perjuangan buruh, dan juga secara teratur memuat kolom "Kroniek", berupa berita-berita baru dunia perburuhan dalam negeri dan luar negeri. Fungsi majalah sebagai media komunikasi internal memang kuat dan terbukti krusial di dalam pengorganisasian serikat. Sejak akhir 1946, kedudukan editor majalah, yaitu "Pemimpin Sidang Pengarang" dan "Pemimpin Tata Oesaha" dijadikan sebagai bagian dari "Pengurus Pusat" organisasi. Namun begitu, majalah "Kereta Api" tidak semata merupakan terompet organisasi. Sebab dalam beberapa edisi (dan ini cukup sering), ada kolom kritik sosial yang disampaikan secara jenaka dan satir. Dengan gaya bahasa melayu pasar, "Kereta Api" mengantarkan buruh pembaca dalam kefasihan membaca situasi sosial-politik-ekonomi secara kritis.

Begitu juga dengan majalah "Soeara Boeroeh" yang diterbitkan oleh Perserikatan Boeroeh Tionghoa (PBT, atau juga dalam bahasa Mandarin Hokkien: Lao Tung Hsieh Hui). PBT adalah serikat buruh di kalangan masyarakat Tionghoa peranakan di Pulau Jawa, berdiri 1 Mei 1946, berkedudukan di Surabaya. Majalah "Soeara Boeroeh" berisikan berita-berita organisasi, kolom opini dan debat, juga kolom bahasan masalah-masalah aktual. Terdapat pula sejumlah iklan komersial toko/agen niaga. Isi majalah menggunakan Bahasa Melayu pasar (rendahan) yang cukup sederhana dan mudah dipahami. Ada juga beberapa bagian menggunakan Bahasa Mandarin, namun ini hanya berupa terjemahan pendek. Dalam salah satu edisi terbitannya, dalam nomor istimewa memperingati 3 tahun kelahiran organisasi, disebutkan pula di bagian muka majalah "Oentoek memperingati International Labour-Day" (Lihat: Gambar 1). Dalam terbitan nomor istimewa ini, Redaksi memberikan "Pengantar kata" yang menceritakan sejarah peringatan 1 Mei dalam perjuangan buruh di Eropa dan Amerika, yang kemudian ditutup dengan harapan bagi perjuangan PBT sendiri, yaitu:

> ...moedah-moedahan...kita dapet mempertebel semanget dan tekad kaoem boeroeh seoemoemnja dan anggota PBT choesoesnja, oentoek teroes memperdjoangken angen2 kita bersama, jaitoe metjape satoe masjarakat jang baroe, jang adil, dalem mana boeroeh dari segala bangsa dapet hidoep dengan tjoekoep, damai dan seneng.[1]

Pernyataan harapan ini memberi kesan bahwa kegiatan perjuangan PBT diletakkan dalam kerangka umum perjuangan buruh di manapun: tatanan hidup yang baru dan adil.

[1] "Soeara Boeroeh," No. 52, Tahoen ke 4, 1 Mei 1949, hal. 1

Gambar 1. Majalah terbitan Perserikatan Boeroeh Tionghoa, dalam memperingati 1 Mei 1949. Sumber: Arsip Nasional Belanda (Het Nationaal Archief), Den Haag.

Perlu pula disebut, buku saku seri "Pendidikan Boeroeh" yang disusun oleh kelompok kiri berkedudukan di Yogyakarta. Seri "Pendidikan Boeroeh" ini memiliki lebih dari 10 judul bahasan. Buku saku yang berjudul "Kekuatan Proletar" membahas soal teknis-teknis pengorganisasian kelompok kaum rendahan. Buku saku berjudul "Repoeblik Filipina" membahas kisah panjang perjuangan rakyat Filipina dalam membangun negara republik pertama di Asia, yang dijadikan cermin pembanding semangat bagi Negara Indonesia. Buku saku berjudul "Upah Buruh" membahas beberapa konsep dasar tentang pengupahan dalam sistem ekonomi kapitalis. Di antara judul-judul bahasan itu, terdapat buku saku "Satoe Mei: Hari Kemenangan Boeroeh Sedoenia" yang akan dibahas dalam catatan awal ini secara khusus di bawah. Hendak didalilkan bahwa seri "Pendidikan Boeroeh" ini memberikan suntikan ide yang diserap dari berbagai sumber-sumber asing, untuk kemudian dibahasakan dalam pengertian umum masyarakat Indonesia (khususnya, yang tinggal di Jawa). Bentuk negara "repoeblik" adalah ide segar yang masuk dalam khasanah pembentukan tata negara Indonesia, dengan tidak mengambil pola kerajaan kuna Nusantara ataupun kerajaan merkantilis gaya Belanda, tapi disusun secara demokratis-modern dengan bercermin dari negara tetangga, Filipina.[2] Juga demikian, konsep "upah buruh" dimengerti bukan sebagai imbalan hadiah dari pengusaha atau sesuatu yang nilainya pasti tanpa negosiasi, melainkan diletakkan dalam sistim ekonomi kapitalis (yang didominasi modal asing) yang mendera kehidupan rakyat. Ini semua membuktikan, bahwa ada upaya yang serius, tidak hanya sekedar menerjemahkan suatu konsep asing ke dalam bahasa melayu tinggi (melayu sekolahan versi Balai Poestaka), tapi menjelaskan beragam konsep tersebut dalam konteks lokal kehidupan ekonomi-sosial-politik negara muda Indonesia yang baru saja merdeka.

[2] Bandingkan cermin Filipina ini dengan kisah tokoh Minke dalam novel *Anak Semua Bangsa* karangan Pramoedya Ananta Toer, 1980

Contoh lainnya, adalah buku saku berjudul “Djedjak Dynamica Masjarakat” karangan I.N. Soeprapti, seorang aktivis dari Barisan Boeroeh Wanita (BBW). BBW adalah satu kelompok buruh tingkat nasional yang menghimpun aktivis-aktivis buruh perempuan dari beberapa Serikat Buruh, sebagai bagian dari Barisan Boeroeh Indonesia (BBI). BBW terbentuk di akhir 1945 dan di kemudian hari meleburkan diri dalam Partai Buruh, menjadi bagian dari Sayap Kiri di parlemen. Kegiatan utama organisasi pimpinan S.K. Trimurti ini adalah mengadakan “kursus-kursus”, yaitu pelatihan sosial dan politik bagi buruh-buruh perempuan di Jawa. Di dalam buku “Sedjarah Pergerakan Boeroeh Indonesia”, Sandra (1961) mencatat bahwa “(T)epat dengan dirajakannja hari 1 Mei 1946 jang pertama di Ibukota Republik, BBW telah berhasil mengumpulkan tjalon pemimpin-pemimpin buruh wanita untuk dilatih selama 2 bulan.” Kebutuhan akan materi pelatihan bagi pemahaman keseharian buruh perempuan yang menjadi peserta kursus nampaknya yang mendorong penyusunan buku saku “Djedjak Dynamica Masjarakat” ini. Buku saku ini menggunakan bahasa melayu tinggi dan di antaranya terselip beberapa kosakata Belanda dalam menjelaskan beberapa konsep asing. Si pembaca diperkenalkan akan konsep-konsep tersebut guna memperlancar bacaan selanjutnya.

Isi buku “Djedjak Dynamica Masjarakat” membeberkan perjuangan kelas buruh di Eropa dalam melawan sistem kapitalisme berdasarkan prinsip materialisme-historis (diterjemahkan sebagai “sedjarah harta benda”) yang diformulasikan oleh Karl Marx. Sebagaimana tercetak di bagian muka, buku saku ini berisikan:

> Mengoeraikan phase-phase masjarakat dari masa ke masa dengan faktor-faktor jang menentoekan bagaimana oejoed atau tjara perobahan satoe-satoenja masjarakat itoe berdasarkan boeah pikiran Poedjangga-Poedjangga sosialis.

Menariknya, penjelasan ini diletakkan dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, menurut buku saku ini, perjuangan buruh di Indonesia berbeda dari perjuangan buruh di Eropa (Soeprapti, 1946:17-18):

> ...bahwa perdjoangan boeroeh di negeri djadjahan atau jang diantjam oleh pendjadjahan, mesti melaloei satoe phase dahoeloe, jaitoe *rassentrijd*, perdjoangan bangsa melawan bangsa, ialah bangsa jang mendjadjah dengan bangsa jang didjadjah. Dalam *rassentrijd* mana, hakekatnja soedah tersimpoel djoega adanja *klassenstrijd*. Jaitoe klas jang tertindas melawan klas jang menindas, dan klas jang menindas itoe berwoejoed modal asing.

Persoalan kapitalisme dan kolonialisme-imperialisme Barat atas Timur memang merupakan persoalan pelik dalam teori marxisme dan sosialisme. Dan bagaimana si penulis buku saku ini merumuskan persoalan tersebut adalah hal yang menarik untuk ditilik lebih lanjut. Menimbang apakah rumusan itu benar dan sesuai teori marxisme bukanlah tujuan catatan awal ini, namun dapat dilihat bahwa si penulis telah mencoba memahami persoalan aktual yang dihadapi buruh Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai negara koloni yang sedang berperang menghadapi kembalinya tentara Belanda. Demikianlah Buku Saku tersebut

mencoba memberikan arti perjuangan revolusi Indonesia dan peran apa yang perlu kerjakan serikat buruh dalam perjuangan kemerdekaan itu.

Demikianlah semua hal ini memperlihatkan bahwa fungsi terbitan sebagai penyambung informasi (dalam hal Majalah) dan bahan bacaan pendidikan (dalam hal Buku Saku) mendasari latar belakang penulisan berbagai terbitan itu bagi kelompok pembaca buruh. Perlu dimengerti, bahwa dunia buruh adalah dunia kaum urban dengan segala kompleksitas dinamika kehidupan perkotaan. Terbitan-terbitan buruh mengisi kebutuhan para buruh akan bacaan yang mampu menyajikan beragam informasi dan ide terkini – bukan sekedar berisi cerita dongeng yang didendang kaum tua, ataupun pers kolonial yang menekan pribumi. Konteks revolusi ekonomi-sosial-politik Indonesia sebagai negara muda merupakan faktor utama bagaimana terbitan itu ditulis untuk kemudian dipandang layak terbit memberikan tetes embun bagi kedahagaan para buruh pembaca. Jika selama dalam kontrol kolonial Belanda dan kekangan fasisme Jepang, buruh hanya dijadikan obyek penindasan (sebagai koeli dan rõmusha) dan karenanya dibuat menjadi manusia pasif nan bisu, maka dalam alam kemerdekaan buruh dapat membaca dan menyuarakan kepentingan-kepentingan perjuangannya secara bebas tanpa tekanan penguasa. Buruh mulai mengambil hak-haknya sebagai manusia bebas. Terbitan-terbitan itu memenuhi alam pikiran buruh dalam memahami dunia sekitarnya, mendeskripsikan persoalan yang dihadapinya, dan juga menentukan langkah-langkah yang dianggap tepat-guna dalam perjuangannya keadilan sosial. Demikian jelaslah bahwa terbitan-terbitan itu membentuk satu narasi sosial kehidupan buruh pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

Pada bagian berikut akan dibahas khusus dua buku saku yang berkenaan dengan 1 Mei: “Satoe Mei: Hari Kemenangan Boeroeh Sedoenia” dan “Revoloesi Nasional dan 1 Mei”. Sebagai suatu narasi sosial, kedua buku tersebut memberikan gambaran bagaimana 1 Mei disosialisasikan, dimaknai dan dirayakan oleh para buruh pada masa-masa awal kemerdekaan. Kedua buku saku ini merupakan catatan berharga dalam sejarah perjuangan buruh memahami dan mengatasi berbagai persoalan aktual yang dihadapinya. Dalam konteks kekinian, kedua buku saku ini menyediakan bahan-bahan awal bagi penyusunan kembali ingatan kolektif buruh yang telah dibungkam dalam politik negara Orde Baru. Bahwa gerakan buruh memiliki andil penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia, namun tidak serta-merta berfungsi belaka menjadi alat negara, melainkan secara independen mampu menyampaikan tuntutannya dalam membela kepentingan dan hak buruh anggota di hadapan negara muda Indonesia.

3. Buku “Satoe Mei: Hari Kemenangan Boeroeh Sedoenia”

Buku *Satu Mei: Hari Kemenangan Boeroeh Sedunia* dikarang oleh Sandra. Terbit pada April 1946. Buku ini mengalami cetak ulang (cetakan kedua) pada Maret 1947. Hal ini bisa dikarenakan tingginya minat, atau juga dianggap perlu sebagai bacaan menjelang perayaan 1 Mei. Bagaimanapun, buku tersebut menjadi buku

pertama dalam bahasa melayu (tinggi) yang mencoba menjelaskan perayaan 1 Mei bagi pembaca buruh.

Memaknai perjuangan buruh Indonesia sebagai bagian dari perjuangan buruh sedunia

Buku saku setebal 50 halaman ini terdiri dari 10 bab: “Oetjapan Pendekar Proletar,” “Beberapa Kekedjaman dan Pemerasan,” “Toentoetan 8 Djam Bekerdja,” “Tanggal Jang Bersedjarah,” “Arti Kemenangan 1 Mei,” “Alamatnja bagi Perdjoangan Boeroeh International,” “Tjahaja 1 Mei Memantjar di Asia,” “Pentjipta Pergerakan Boeroeh Baroe,” “Sandoengan terhadap Djasa-djasa Boeroeh,” “Tjatatan Sedjarah.” Enam bab pertama mengisahkan tantangan dan perjuangan buruh Barat dalam sistem kapitalisme “bengis” di abad 19. Bab selanjutnya, “Tjahaja 1 Mei Memantjar di Asia” adalah bab dengan penjelasan terpanjang dari keseluruhan 10 bab yang ada. Dan ini kiranya yang menjadi titik berat buku dalam mencoba memberikan arti khusus akan makna perayaan 1 Mei bagi perjuangan buruh di Asia.

Dalam diskusi umum mengenai gerakan buruh di Asia, digambarkan buruh Asia yang pasif menanti uluran tangan dari Barat. Kolonialisme Barat yang menjajah Asia membawa serta kepentingan modal dalam melakukan eksploitasi imperialisme atas rakyat Asia. Akibatnya, bangsa Asia yang terjajah dipandang belum cukup matang melawan kapitalisme karena masih terbelenggu dalam semangat nasionalisme sempit membebaskan diri dari penjajahan Barat.

Sandra, menariknya, punya pendapat lain. Sebagai seorang yang punya akses atas bahan pustaka luas, Sandra adalah seorang intelektual yang aktif membahasakan ide-ide serapan bagi bacaan buruh. Bagi rekan-rekan sejamannya, ada kesan bahwa Sandra dianggap mampu, dan ia (terbukti) memiliki cukup waktu untuk membaca dan menulis – faktor ini pula yang kiranya menyebabkan terbitnya seri buku saku, bahwa si penulis (dianggap) punya otoritas tertentu dalam menulis dan menyebarkan ide-ide, terutama ide-ide dari golongan Kiri. Di sini Sandra sebagai penulis tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyerap ide dan mereproduksinya kembali ke dalam bahasa yang berbeda, tetapi juga memiliki kebebasan dalam menafsirkan konteks penulisannya itu sendiri, bagi terwujudnya “revolusi sosial” ala Marxisme, di bumi Indonesia.

Sandra menekankan arti penting perjuangan gerakan buruh bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, sebagai bangsa Timur yang terjajah, di masa-masa penjajahan Belanda dan sesudahnya. Namun melampaui tugas-tugas kebangsaan itu, ia berpendapat bahwa:

> Begitoelah maka penderitaan proletar Timoer di dalam hakekatnja setali tiga oeang dengan kawan2nja proletar pada masa abad 18 atau 19. Kenjataan inipoen djoega diketahoei oleh proletar di Timoer. Mereka ini moelai insjaf bahwa sebagai proletar soedah boekan lagi ia menganoet kefahaman kebangsaan, tetapi kefahaman tjita2

> jang mendjadi sendi perdjoangan. Lebih2 ketika mereka mengenal 1 Mei sebagai lambang kemenangan kaoem proletar atas kaoem kapitalis. (Sandra, 1947; 37)

Bagi Sandra, jelaslah bahwa buruh Asia yang menghadapi kolonialisme Barat perlu berjuang menuntut kemerdekaan, tapi buruh Asia tidak hanya pasif saja menanti bantuan dari buruh di Barat. Buruh Asia juga turut melawan kapitalisme di dalam pergerakan umum seluruh dunia dan menjadikan perjuangannya itu sebagai titik utama kebersamaan sebagai kaum proletar. Bahwa mereka juga (telah) mampu mendesakkan kepentingannya secara frontal menghadapi kaum kapitalis. Dalam hal ini Sandra merujuk pada pemogokan buruh sepanjang 1926-1927 yang tersebar di seluruh tanah Jawa. Perjuangan buruh melawan kapitalisme tidak hanya terjadi di Barat, tetapi juga terjadi di bumi Indonesia dalam sejarah buruh pribumi menentang kolonialisme dan kapitalisme. Demikianlah, Sandra memaknai perjuangan buruh Indonesia sebagai bagian dari perjuangan buruh sedunia. Kerja-kerja pengorganisasian, tuntutan ekonomi, dan pemogokan adalah contoh nyata perjuangan buruh Indonesia dalam perlawanan menghadapi kaum pemilik modal. Sebagaimana dalam kata-katanya sendiri:

> Njatalah bahwa kaoem boeroeh Indonesia soedah masak dan tjakap menjemploengkan siasat perdjoangannja ikoet serta dengan proletar seloroeh doenia jang setjita2 dan sefaham. (Sandra, 1947; 40)

Dengan makna yang demikian, maka arti penting perayaan 1 Mei bagi buruh Indonesia dapat langsung dirasakan pembaca. Bahwa perayaan 1 Mei bukan semata-mata milik buruh Eropa, melainkan juga milik buruh Indonesia. Buruh Indonesia bisa merayakan 1 Mei dengan kebanggaannya atas dasar sejarah perjuangannya melawan kolonialisme dan kaum kapitalis (asing). Dengan demikian, konsep "seloeroeh doenia" yang diusung dalam perayaan 1 Mei memperoleh bentuk nyata dalam benak buruh pembaca Indonesia. Dari sini bisa kita ketahui bahwa Sandra hendak mengajukan arti penting 1 Mei bagi buruh di Asia bukanlah pada soal bagaimana hari itu mesti dirayakan di Timur sebagaimana di Barat, melainkan akan semangat perjuangan "kaoem proletar" – di manapun mereka berada.

Gambar 2. Gambar 1 Mei 1946 "Kaoem Proletar Seloeroeh Doenia...Bersatoelah". Sumber: Boeroeh, 29 April 1946. Perpustakaan Nasional, Jakarta.

4. Buku "Revoloesi Nasional dan 1 Mei"

Buku *Revoloesi Nasional dan 1 Mei* disusun oleh Adisoemarta, seorang aktivis kelompok kiri yang kemudian bergabung ke dalam SOBSI (Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia). SOBSI sendiri baru terbentuk di akhir November 1946 dan sah berdiri melalui Kongres pertamanya pada 18 Mei 1947 di Malang. Dengan demikian, buku saku ini adalah salah satu buku yang baru diterbitkan berkaitan Kongres tersebut.

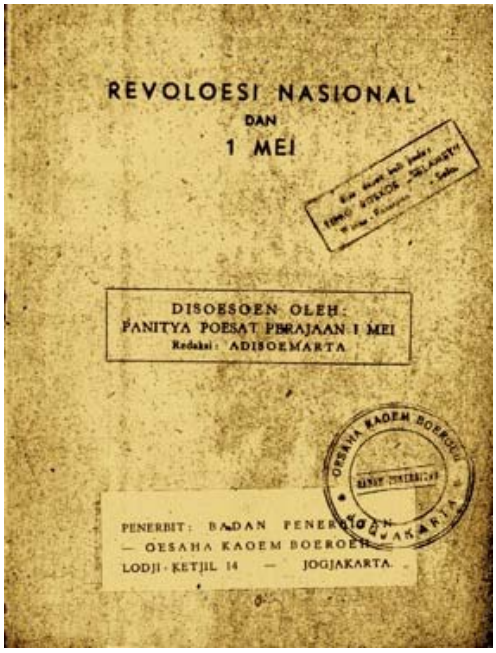

Gambar 3. Buku saku "Revoloesi Nasional dan 1 Mei" terbitan 1947. Sumber: Modern Indonesia Project Microfiche collection (Cornell University)

Buku saku ini menggunakan bahasa melayu pasar dengan susunan kalimat yang sederhana dan ringkas-pendek. Juga, kosakata asing jarang ditemukan – nampaknya secara sadar memang diminimalisir. Selain itu, di dalam setiap halaman buku di bagian bawah, secara menyolok terdapat kotak ringkasan pernyataan yang menyerupai slogan. Demikian jelaslah, buku saku ini disusun sedemikian rupa secara sederhana agar isinya mudah dipahami. Buku saku ini berfungsi sebagai buku pedoman memperkenalkan posisi SOBSI bagi para pembaca buruh awam. Hal ini nampak pula dari susunan isi buku itu sendiri.

Buku saku setebal 31 halaman ini terdiri 7 bagian: "Hari 1 Mei dan Revoloesi Nasional," "1 Mei dengan Perdjoangan Kaoem Boeroeh," "Perdjoangan Kaoem Boeroeh dalam Pembangoenan," " Kemerdekaan Kelas Pekerdja," "Rentjana Program Pembangoenan Ekonomi SOBSI", dan "Rentjana Program Pembangoenan Sosial," dan terakhir, "Program Doea Tahoen Barisan Tani Indonesia." Dalam empat bagian pertama pembaca langsung disuguhkan kaitan antara perayaan 1 Mei dengan situasi perang kemerdekaan Indonesia. Penjelasan tentang sejarah 1 Mei disajikan secara ringkas saja (berbeda dengan buku karangan Sandra yang cukup mendetail), untuk langsung menukik membahas apa yang menjadi keutamaan buku itu sebagai buku pedoman, yaitu menyajikan posisi SOBSI akan apa yang disebut sebagai "revolusi nasional":

> Repoeblik Indonesia memberi sjarat jang baik sekali bagi perdjoangan boeroeh oentoek melanjoetkan perdjoangan ke arah toedjoean jang lebih tinggi. Kaoem boeroeh dan kaoem tani membentoek dan memperkoeat Negara, sebagai alat dalam perdjoangannja. (Adisoemarta, 1947: 10)

Jadi, buruh Indonesia perlu menyokong kemerdekaan negara muda Indonesia demi kebaikan dan kesejahteraan bagi buruh sendiri.

Namun, kemerdekaan Indonesia bukanlah tujuan akhir dari perjuangan buruh. Sebab, kelompok buruh memiliki tujuannya tersendiri. Kemerdekaan negara hanyalah "sebagai alat perdjoangan" buruh dalam mencapai apa yang menjadi "toedjoean jang lebih tinggi" (Bandingkan dengan perumpamaan "djembatan emas" yang dipergunakan oleh S.K. Trimurti, 1948). "Toedjoean jang lebih tinggi" ini dalam pembahasan buku saku itu adalah:

> Kemerdekaan politik sadja tidak tjoekoep bagi massa pekerdja di pabrik dan di sawah bagi boeroeh dan tani. Mereka meminta keringan hidoepnja, beloem lagi mereka meminta kebebasan, sebab kebebasan hanja dapat tertjapai dalam revoloesi sosial, dalam masjarakat jang sosialistis. Peroet tidak haroes kerontjongan lagi. Roemah tidak lagi matjam kombong ajam. Pakaian tidak lagi goni dan tjompang-tjamping. Anak-anak mereka haroes bersekolah. Oepah bekerdja bersesoeaian dengan keboetoehan hidoep. Pendek kata kita haroes mendjalankan politik-kemakmoeran bagi mereka jang bekerdja keras jaitoe boeroeh dan tani. (Adisoemarta, 1947: 10)

Demikianlah, bagi SOBSI perjuangan buruh Indonesia adalah utamanya merebut kemerdekaan penuh bagi negara. Dalam konteks 1947 ketika terjadi Perdjandjian Linggajati yang memaksa negara muda Indonesia untuk menyerahkan beberapa bagian wilayah ke tangan Belanda, nuansa perjuangan fisik akan kemerdekaan yang penuh, jelas mempunyai gaung nasionalisme yang kuat di dalam sanubari seluruh rakyat – dan tak terkecuali, kelompok buruh. Dan dalam mempersatuan perjuangan buruh merebut kemerdekaan penuh itu, SOBSI menjadikan dirinya sebagai kendaraan utama bagi para buruh. Jelaslah buku saku ini terbit dalam menjawab tantangan jamannya.

Di dalam buku saku ini, perayaan 1 Mei dijadikan sebagai kerangka dasar memperluas perjuangan buruh Indonesia. Sebagai perayaan kemenangan, maka buruh Indonesia dipacu untuk merebut kemenangannya pula: mendukung kemerdekaan republik dan juga mengajukan tuntutan kepentingan sosial-ekonomi sebagai "toejoean akhir" perjuangannya itu.

Apakah buku saku ini merupakan satu bentuk retorika sosial SOBSI (sebagaimana di bagian akhir buku saku ini tersusun "Rentjana Program Pembangoenan Ekonomi SOBSI", dan "Rentjana Program Pembangoenan Sosial") di dalam alam revolusi negara muda Indonesia? Rumusan yang disusun SOBSI dalam buku saku ini adalah memang untuk menarik keanggotaan, membangun satu "sentral organisasi" yang membawahi beragam serikat buruh. Dengan berfungsi sebagai buku pedoman pengenalan organisasi, buku saku ini memiliki maksud dalam menyebar-luaskan gagasan SOBSI. Secara strategi, SOBSI memanfaatkan momen perayaan 1 Mei sebagai ajang memperkenalkan posisi dan program organisasi. Dalam kenyataannya, tujuan ini tercapai sebagaimana sampai 1948, SOBSI menjadi organisasi buruh terbesar dengan memayungi serikat-serikat buruh lokal dari berbagai sektor industri.

5. Kegiatan Perayaan 1 Mei

Dari dua buku saku yang dibahas di atas kita memiliki jendela dalam melihat bagaimana 1 Mei dipersepsikan, disebarluaskan, dan dimaknai oleh gerakan buruh Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan. Yaitu, bahwa perayaan 1 Mei diterjemahkan sebagai perayaan kemenangan bagi buruh Indonesia di dalam perjuangannya bersama-sama dengan rekan buruh sedunia dalam melawan sistem kapitalisme. Selain itu juga, perayaan 1 Mei oleh SOBSI, organisasi buruh terbesar pada masa itu, dijadikan kerangka dasar bagi perjuangan buruh di dalam mendukung kemerdekaan penuh negara muda Indonesia dan juga mengajukan tuntutan akan kepentingan sosial-ekonomi buruh sebagai cermin keadilan sosial masyarakat Indonesia yang baru merdeka. Jika perayaan 1 Mei dimaknai sebagai hari kemenangan bagi buruh Indonesia, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana tuntutan-tuntutan buruh Indonesia dalam perjuangannya menuju kemakmuran dan melawan kapitalisme itu dirumuskan? Kegiatan-kegiatan apa yang diadakan/disusun dalam perayaan 1 Mei itu dalam menunjang pemenuhan tuntutan itu? Juga, bagaimana kegiatan-kegiatan itu diselenggarakan dalam situasi sosial-politik negara muda Indonesia yang masih menghadapi serbuan tentara Belanda?

Dalam bagian ini akan diulas singkat beberapa kegiatan buruh dalam perayaan 1 Mei pada masa revolusi Indonesia 1945-1949, khususnya 1946 dan 1947. Sedikitnya bahan-bahan sejarah yang terselamatkan, memberikan kesulitan tersendiri di dalam menyusun suatu kronologi yang lengkap akan kegiatan buruh. Walau demikian, ada gambaran yang dapat dijadikan masukan awal bagi penelitian lebih lanjut tentang hal ini: bahwa negara turut aktif di dalam perayaan 1 Mei, dan bahwa serikat buruh tidak segan-segan melintas-batas berpadu menggalang kekuatan di dalam perayaan 1 Mei. Ini semua dapat dimengerti dalam konteks sosial-politik masa itu yang memaksa semacam kerjasama antara negara dan masyarakat (dalam hal ini, kelompok buruh) dalam menghadapi tekanan tentara Belanda.

a. Perayaan 1 Mei 1946

Perayaan 1 Mei 1946 adalah perayaan pertama dalam alam kemerdekaan. Saat itu adalah masa Kabinet Sjahrir Kedua (Maret 1946 – Oktober 1946). Dengan membuka keran demokrasi parlementer, kabinet Sjahrir memastikan keleluasaan gerakan buruh. Sjahrir adalah seorang demokrat-sosialis yang mementingkan hak-hak buruh, setidaknya atas dua dasar: pembacaannya akan sistem negara Indonesia yang ia cita-citakan sebagai negara kesejahteraan, dan sokongannya terhadap gerakan buruh sebagai sumber mobilisasi massa. Karenanya, Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Maria Ulfah, memberikan dukungan besar dalam pelaksanaan perayaan 1 Mei. Kementerian Sosial mengeluarkan satu Makloemat, yang isinya:

> Kepada boeroeh harian jg. ikoet merajakan hari 1 Mei diberi gadjih teroes oentoek hari itoe.

> Kepada kantor2 Djawatan2 dan peroesahaan2 tsb diatas diperkenankan mengibarkan Bendera Merah disamping Sang Merah Poetih.[3]

Secara strategis, Makloemat Kementerian Sosial itu sesungguhnya disusun sebagai jawaban positif pemerintah atas tuntutan dari gerakan buruh sebelumnya. Beberapa minggu sebelum 1 Mei, Barisan Boeroeh Indonesia (BBI) telah mengajukan tuntutan terbuka kepada Presiden agar 1 Mei dijadikan hari raya (sebab hari 1 Mei 1946 memang jatuh pada hari Rabu), dan "sekolah2 dan kantor2 soepaja ditoetoep oentoek menghormati hari itoe dan kepada kaoem boeroeh seoemoemnja diberikan kesempatan seloeas2nja oentoek merajakan hari kemenangan."[4] Jadi, inisiatif perayaan 1 Mei datang dari gerakan buruh, dan oleh karenanya, mereka mengajukan tuntutan kepentingan kepada negara. Negara memberikan jawaban positif atas tuntutan tersebut, dan bahkan selangkah maju mendukung 1 Mei agar dirayakan secara besar-besaran oleh gerakan buruh, dengan memberikan jaminan ekonomis pembayaran upah bagi buruh yang ikut merayakannya dan memperkenankan pengibaran bendera merah (yaitu, bendera simbol perjuangan buruh).

Jawaban positif negara atas tuntutan dari gerakan buruh, bukanlah hal yang mengherankan. Dalam konteks negara yang baru merdeka, negara Indonesia hendak membangun citra yang membedakan dirinya dari negara kolonial yang dilawannya, yaitu dengan melindungi dan mendukung gerakan rakyat. Seperti yang terjadi juga di banyak tempat di Asia dan Afrika yang membebaskan dari cengkeraman kolonialisme Eropa, negara Indonesia yang akan dibangun bukanlah seperti negara kolonial yang menindas dan menyengsarakan rakyat (pribumi), melainkan berupaya mengakomodir sebisa mungkin segala kepentingan rakyatnya. Gerakan buruh, yang walaupun jumlahnya tidaklah besar di negara-negara yang baru merdeka ini, mempunyai peran sentral sebagai penggerak mobilisasi massa, sehingga dukungan sosial-politik gerakan buruh menjadi salah satu kunci utama bagaimana pondasi negara yang baru merdeka itu akan disusun. Dalam konteks demikian, Makloemat Kementerian Sosial dapat dipahami sebagai bentuk relasi simbiosis mutualis politik antara negara muda Indonesia dengan gerakan buruh.

Tidak ada data sejarah yang menceritakan bagaimana pelaksanaan isi Makloemat Kementerian Sosial tersebut di dalam kenyataannya di lapangan. Apakah benar semua buruh yang "ikoet merajakan hari 1 Mei diberi gadjih teroes oentoek hari itoe"? Apakah sungguh terjadi diperkenankannya pengibaran "Bendera Merah disamping Sang Merah Poetih" di kantor-kantor pemerintah? Kita tidak dapat menjawab secara positif dua pertanyaan penting ini. Dengan demikian, tidak dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran atas isi Makloemat itu. Walau begitu, penelusuran beberapa koran utama sepanjang 1946, tidak menemukan adanya berita keluhan dari gerakan buruh atas perayaan 1 Mei 1946, sehingga kita cukup mengetahui bahwa perayaan 1 Mei 1946, sekalipun terjadi pelanggaran atas isi Makloemat, telah berjalan lancar.

---

[3] *Boeroeh,* 29 April 1946

[4] *Boeroeh,* 13 April 1946

Patut diketahui pula bahwa persiapan perayaan 1 Mei 1946 telah dimulai beberapa hari sebelumnya. Jauh hari sebelumnya, Barisan Boeroeh Indonesia sudah membentuk "Panita Peringatan hari 1 Mei".[5] Tugas Panitia ini lebih berupa "penerangan-penerangan" – atau dalam kosakata kekinian: kampanye – perihal sejarah dan arti penting perayaan 1 Mei bagi buruh dan masyarakat umumnya. Maka itu, dapatlah kita ketahui konteks sosial-politik penulisan buku saku "Satoe Mei: Hari Kemenangan Boeroeh Sedoenia" karangan Sandra – yang mencoba menerjemahkan perayaan 1 Mei bagi buruh dalam alam kemerdekaan yang baru dinikmati rakyat Indonesia. Jadi, "penerangan" ditempuh lewat terbitan buruh. Selain itu, "penerangan-penerangan" ini juga dilakukan dengan memanfaatkan media utama pada jaman itu, yaitu: radio. Radio adalah media massa terpenting pada masa 1940-an – 1950-an yang dapat menjangkau masyarakat luas, dan perayaan 1 Mei (dianggap) sebagai hal penting yang perlu disiarkan dan diketahui rakyat umum. Gerakan buruh memberikan "penerangan-penerangan" lewat radio dalam siaran berita *Antara*. Kegiatan apa yang disusun, juga jadwal acara perayaan 1 Mei disebarkan ke masyarakat umum lewat radio.

Menteri Sosial juga memberikan pidatonya lewat radio dalam perayaan 1 Mei 1946.[6] Pidatonya berintikan dua hal, yaitu tentang "sedjarah sarekat kerdja di lain negeri", dan juga harapan agar gerakan buruh "memberi bantoean dengan ikoet membangoenkan negara Indonesia jang merdeka. "Menariknya, Menteri Sosial juga menyebut program kerja Kementerian dalam menyusun satu "Oendang-oendang Sosial jang ditoejoekan kepada perbaikan nasib rakjat Indonesia seoemoemnja." Oendang-oendang sosial ini dalam perkembangannya di kemudian hari menjadi UU No. 12/1948 tentang Kerdja.

Selain "penerangan-penerangan", BBI juga mengadakan "pertemoean dimana kaoem boeroeh laki-laki dan perempoean djoega isteri boeroeh, ditoenggoe kedatangannja". Pertemuan umum lebih berupa ajang sosialisasi di antara rekan-rekan aktivis buruh di tingkat nasional. Lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dan lagu perjuangan buruh "Internasionale" diputar berturut-turut. Juga diperkenalkan lagu "Satoe Mei" sebagai lagu perjuangan buruh Indonesia dari kelompok progresif (Lihat: Gambar 4).

Sementara itu di tingkat lokal, perayaan 1 Mei 1946 mengambil bentuk lain. Sebagaimana diberitakan, gerakan buruh di Pati mengadakan "rapat raksasa" yang berupa upacara (yang dimulai pukul 7 pagi) dan dilanjutkan dengan "arak-arakan setjara demonstrasi dengan membawa sembojan-sembojan". Juga diadakan "gerakan pengoempoelan bahan pakaian, obat-obatan dan lain-lain oentoek menolong fakir miskin dan bekas roomoesha." Keprihatinan gerakan buruh terhadap fakir miskin dan bekas rõmusha merupakan bentuk solidaritas yang dipusatkan bagi kesejahteraan masyarakat umum. Gerakan buruh (sudah) menyadari bahwa kesejahteraan rakyat seluruhnya adalah bagian dari cita-cita perjuangannya juga. Sebagai kelompok masyarakat yang "cukup" beruntung memiliki pekerjaan dan memperoleh upah atas

[5] Lihat: *Merdeka,* 27 April 1946
[6] *Merdeka,* 2 Mei 1946

pekerjaannya itu, gerakan buruh melakukan kerja-kerja konkret tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi bagi kaum rendahan keseluruhan. Kerja konkret ini didasarkan pada fakta bahwa bahan makanan pada masa-masa awal kemerdekaan sangatlah sulit didapat – dan harga beras di tanah Jawa melonjak drastis dalam masa kurun 1946-1947, sehingga beberapa serikat buruh menuntut pembayaran upah berupa beras.

Dengan demikian, jelaslah bahwa bagi gerakan buruh Indonesia perayaan 1 Mei bukan semata-mata merupakan euforia sukacita perayaan kemenangan kelompok buruh atas pencapaian-pencapaiannya secara eksklusif, namun ekspresi keprihatinan yang bertujuan mendorong keadilan sosial bagi masyarakat umum. Ini adalah salah butir penting perayaan 1 Mei 1946, yang bisa kita simpulkan.

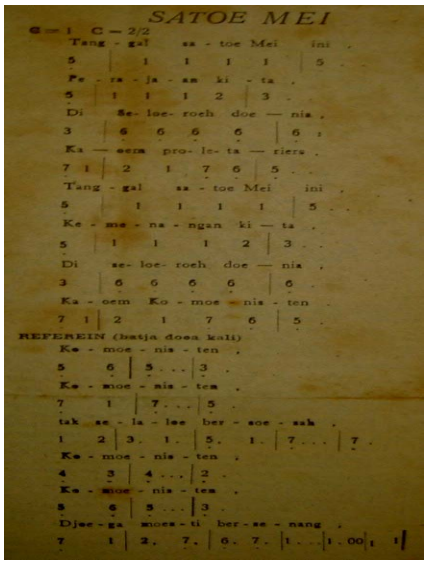
SATOE MEI

Gambar 4. Lagu "Satoe Mei" yang dijadikan lagu utama perjuangan buruh tahun 1946. Sumber: Boeroeh, 29 April 1946. Perpustakaan Nasional, Jakarta.

Satoe Mei

Tanggal satoe Mei ini	Perajaan kita
Di seloeroeh doenia	Kaoem proletariers
Tanggal satoe Mei ini	Kemenangan kita
Di seloeroeh doenia	Kaoem komoenisten
Refrein (batja doea kali):	Komoenisten, Komoenisten,
Tak selaloe bersoesah	Komoenisten, Komoenisten,
Djoega moesti bersenang	

b. Perayaan 1 Mei 1947 sebagai Kegiatan Bersama

Apabila selama 1946 banyak serikat buruh yang terpencar-pencar – karena juga baru mulai tumbuh di akhir 1945 dan aktivitas BBI masih terpusat di Jakarta, maka pada 1947, gerakan buruh mulai menyusun langkah-langkah untuk menuju

persatuan. Untuk memahami kerangka persatuan ini, perlu kiranya dijabarkan singkat tentang dinamika hubungan antarorganisasi serikat pada masa 1945 – 1948. Menjelang deklarasi kemerdekaan Agustus 1945, buruh-buruh langsung membentuk serikat berdasarkan wilayah kerjanya. Buruh kereta api di stasiun Manggarai berkumpul menjadi satu, sementara rekannya di Solo juga demikian. Juga, buruh perkebunan di Jogja langsung membentuk serikat di kalangannya sendiri. Masing-masing memiliki independensinya, namun menyadari bahwa mereka perlu kerjasama, terlebih lagi pada masa itu apa yang dimengerti sebagai "kelas pengusaha" belum terbentuk. Sampai akhir 1945 masing-masing organisasi buruh masih berdiri sendiri. Namun sampai pertengahan 1946, mereka mulai menggabungkan diri berdasarkan industri: buruh kereta api bergabung membentuk SBKA, buruh perkebunan gula membentuk Serikat Boeroeh Goela (SBG), buruh di lapangan minyak membentuk Serikat Boeroeh Minjak (SBM), dan sebagainya. Masing-masing memiliki struktur organisasi mandiri dengan jumlah keanggotaan yang tersebar di banyak daerah di Jawa.

Bagi kita di antara pembaca yang sebelumnya menghadapi dominasi tunggal SPSI dalam rejim Orde Baru, dan kemudian mengalami keberagaman serikat buruh dalam alam Reformasi sekarang ini, mungkin bisa menafsirkan fenomena ini semua sebagai kelemahan gerakan buruh. Namun sesungguhnya, nilai penting dari kenyataan ini adalah kemandirian buruh. Buruh telah mampu menyusun organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Semangat ini pula yang mendasari organisasi buruh 1946-1947. Hanya saja, di mulai sejak awal 1946, negara muda Indonesia mulai menyusun sendi-sendi pemerintahannya. Bersamaan dengan itu, organisasi buruh telah lebih dulu menduduki beberapa institusi penting. Misalnya, SBKA telah menguasai jalur perkeretaapian se-Jawa, SBG menguasai produksi gula untuk kemudian hasilnya dibagi rata di antara semua buruh gula, dan SBM menghimpun buruh-buruh minyak – yang pada masa itu, minyak merupakan sumber energi baru di samping batubara. Mendahului pemerintah, serikat buruh ternyata telah menguasai dan juga mampu mengatur laju jalan sendi-sendi perekonomian yang dianggap penting bagi kelangsungan suatu negara. Padahal, pemerintahan sendiri belum stabil. Kabinet Sjahrir melihat bahwa kemandirian serikat buruh bisa menjadi alat bagi gerakan kemerdekaan Indonesia, tapi juga mesti diwaspadai. Sebab, jika serikat buruh menjadi (terlalu) kuat maka pemerintahan (menjadi) tidaklah diperlukan. Secara hati-hati, pemerintah mulai mendekati gerakan buruh, sekalian juga berupaya merebut institusi-institusi penting itu dari tangan penguasaan serikat buruh.

Namun serikat buruh tidaklah lengah. Beberapa serikat buruh utama, misalnya SBKA dan SBG, terbiasa membaca situasi sosial-politik keseluruhan dan menyadari langkah-langkah pemerintah. Mereka mengupayakan persatuan di kalangan serikat buruh di tanah Jawa. Beberapa aktivis buruh di tingkat pusat juga mendorong upaya ini.

Bagi yang hidup dalam masa pasca-Reformasi mungkin agak sedikit kesulitan memahami makna persatuan buruh pada jaman itu. Yang perlu digarisbawahi, bahwa tiap serikat buruh memiliki identitasnya masing-masing. Sebagaimana digambarkan di

atas, serikat buruh dibentuk dari “bawah” ketika buruh-buruh yang mengetahui usainya penjajahan Jepang, secara otonom dan solider menggabungkan diri dalam organisasi. Jadi, organisasi serikat buruh pada masa itu dibentuk atas dasar inisiatif sendiri tanpa instruksi dan tekanan dari atas. Identitas yang dibentuk lebih menonjolkan bidang lapangan pekerjaan (misal, serikat buruh listrik, serikat buruh gula, dll.) dan daerah tempat kerja (misal, serikat buruh kota Jakarta, serikat buruh Bandung, dll.). Sehingga pada masa itu, persatuan gerakan buruh lebih merupakan pilihan bagaimana menyusun organisasi induk: apakah berdasar lapangan pekerjaan (secara vertikal) atau berdasar wilayah tempat kerja (secara horizontal). Pilihan ini memang terbukti sulit, karena tiap lapangan pekerjaan dan juga tiap wilayah, punya tantangannya masing-masing. BBI mencoba mengatasi pilihan ini dengan mengadakan konferensi di tingkat pusat, pada 19 Maret 1946. Hasilnya, masih jauh dari terang. Konferensi kedua diadakan, pada 21 Mei 1946 di Madiun, untuk memecah kebuntuan. Namun, garis yang terbentuk secara vertikal dan secara horizontal, malah makin menguat, akibatnya malah perpecahan di kalangan buruh. Beberapa serikat buruh lapangan pekerjaan, seperti Serikat Boeroeh Minjak (SBM) dan Serikat Boeroeh Pegadaian yang memang telah memiliki banyak cabang di daerah-daerah berdasarkan kesamaan lapangan pekerjaan, langsung membentuk induk organisasi tersendiri, Gaboeangan Serikat Boeroeh Vertikal. Sementara serikat buruh yang disusun atas dasar wilayah, menjadi kewalahan.

Lahirnya SOBSI di akhir 1946 merupakan peristiwa penting bagi gerakan buruh Indonesia

Di dalam upaya menggalang persatuan itu, terbentuknya SOBSI di akhir 1946 merupakan peristiwa penting bagi gerakan buruh Indonesia. Usaha beberapa aktivis buruh, seperti Alimin dan Hardjono, dalam mempertemukan dua kelompok serikat buruh itu membuahkan beberapa hasil kemajuan. Serikat buruh di tingkat pusat maupun lokal, bergabung dalam SOBSI sebagai satu induk organisasi utama. Masing-masing serikat tetap independen sebagai organisasi anggota, memiliki AD/ART tersendiri dan program kerja yang disahkan Kongres buruh anggota, dan hubungan dengan serikat buruh lain didasarkan atas kesetaraan dalam satu induk organisasi SOBSI – bukan hubungan hirarkis. Jadi, SOBSI tumbuh dan dibentuk “dari bawah”, bukan merupakan pesanan ataupun desakan “dari atas”. Kebutuhan untuk bersatu di kalangan buruh adalah motif utamanya, di dalam menghadapi langkah-langkah pemerintah yang hendak mengatur gerakan buruh sesuai dengan kepentingan negara. Sandra (1961) mencatat bahwa “(L)ahirnja SOBSI bagi pergerakan buruh di Indonesia berarti satu langkah kemadjuan dalam usahanja mentjapai konsolidasi.” Dengan melakukan upaya persatuan “dari bawah,” gerakan buruh membuktikan dirinya sendiri independen, tidak bergantung dan tidak dapat dikendalikan begitu saja oleh pemerintah.

Oleh karena itu, di dalam Perayaan 1 Mei 1947, nuansa persatuan di dalam gerakan buruh terasa kental. Ada baiknya dikutip secara panjang di sini satu liputan berita surat kabar tentang perayaan 1 Mei 1947:

> Pagi djam 9 Balai Pertemoean telah penoeh. Pekarangan, lapangan stasioen Gambir, pekarangan Hotel Shutte Raaf dan Willemkerk poen penoeh. Lapangan perajaan dipenoehi oleh poster2 dan bendera Merah Poetih jang dibawa oleh barisan boeroeh dari masing2 kantor dan Djawatan. Setelah Nona Setiati, ketoea dari Panitia Perajaan tsb, memboeka perajaan, Pak Wirjo membentangkan dengan pandjang lebar akan perdjoeangan boeroeh Djakarta selama ini. ... Kemoedian berganti-ganti berbitjara wakil dari progressieve-groep dari golongan Tionghoa, jaitoe toean Oh Bian Hong, kemoedian toean Mr. de Graaf dari golongan Belanda. Pidato terachir jaitoe toean Soepranoto, dengan soeara jang berkobar-kobar mengatakan bahwa boeroeh Djakarta sanggoep oentoek menjediakan tenaganja dalam perdjoeangan jg. akan datang. Rapat selesai djam 10.15 diachiri dengan lagoe "Internationale." [7]

Dari berita liputan itu dapat kita ketahui bahwa SOBSI melakukan kerja koordinasi dalam perayaan 1 Mei. Nona Setiati adalah seorang aktivis perempuan dari SOBSI, yang di kemudian hari di 1960-an menjabat sebagai salah seorang Wakil Ketua Dewan Nasional SOBSI. "Panitia Perajaan" adalah kerja koordinasi SOBSI yang didukung oleh gerakan buruh dari berbagai golongan. Mulai saat itu, perayaan 1 Mei disusun secara bersama, dan tidak didominasi oleh satu kelompok tertentu saja.

Perayaan 1 Mei bukanlah semata-mata milik kelompok kiri saja (sebagaimana digambarkan dalam sejarah bikinan Orde Baru) sebab, sebagaimana tergambar di atas, tiap kelompok buruh memiliki perannya masing-masing. Memahami perayaan 1 Mei sebagai perayaan bersama gerakan buruh bukan berarti larut hilang identitas tiap serikat buruh. Masing-masing serikat buruh tetap memegang identitasnya – entah itu berdasarkan lapangan pekerjaan ataupun daerah wilayah. Jadi, polarisasi dan segregasi kelompok buruh bukanlah berdasarkan identitas kesukuan atau agama. Kebersamaan gerakan buruh dalam merayakan 1 Mei 1947 memiliki dua arti strategis: bagi perjuangan kemerdekaan negara muda Indonesia, dan bagi konsolidasi gerakan buruh sendiri. Dalam kerangka perjuangan kemerdekaan, gerakan buruh yang bersatu menjadi sumber mobilisasi massa. Terlebih dalam situasi politik akibat Perdjandjian Linggadjati. Sementara itu, bagi konsolidasi gerakan buruh, persatuan dengan berbagai serikat buruh memiliki arti ideologis dan kepentingan bersama bagi buruh anggota, sebab menguatkan daya tawar di hadapan penguasa di dalam mengajukan tuntutan kesejahteraan.

Tanpa adanya persatuan gerakan buruh, perayaan 1 Mei menjadi kesia-siaan belaka

Kesukuan dan agama bukanlah persoalan susunan struktur organisasi buruh pada masa itu. Pilihan susunan berdasar lapangan pekerjaan atau daerah wilayah kerja, yang menghantui benak aktivis

[7] *Merdeka,* 2 Mei 1947; Lihat juga: Lampiran

buruh. Pula, identitas yang hendak dibangun bukanlah identitas kesukuan atau agama secara eksklusif, melainkan identitas kebersamaan sebagai kelas buruh. Selain itu juga, sesungguhnya ada kegagapan di antara kelompok pemuka agama (baik itu kaum ulama ataupun santri) dalam menjangkau kelompok buruh, karena mereka tidak punya kosakata yang pas untuk bisa terjun ke dunia buruh memahami kerasnya kehidupan urban kaum buruh. Serikat Boeroeh Islam Indonesia (SBII), sebagai serikat buruh yang pertama kali bersendikan keagamaan, baru terbentuk di akhir 1948 – dan ia dilahirkan bukan sebagai hasil pengorganisasian buruh anggota dari tingkat basis, melainkan disusun dari tangan-tangan aktivis buruh di tingkat pusat sebagai reaksi ketakutan atas peristiwa Madiun dan tuduhan keterlibatan SOBSI di dalamnya. Dalam konteks demikian, perayaan 1 Mei adalah perayaan kebersamaan buruh yang sungguh dibentuk dari dorongan kuat dari bawah. Dan di dalam menyelenggarakan perayaan 1 Mei bersama itu, SOBSI mampu menggalang kekuatan buruh dari berbagai sektor lapangan pekerjaan dan daerah wilayah kerja, dan terlebih juga secara lintas batas – sebagaimana akan dibahas selanjutnya berikut ini.

c. Perayaan 1 Mei 1947 secara lintas batas

Secara khusus perlu kiranya disebut bahwa upaya persatuan gerakan buruh juga dilakukan secara lintas batas, dengan mengadakan perhubungan dengan serikat-serikat buruh di daerah pendudukan Belanda. Utamanya dengan kelompok buruh di kalangan masyarakat Tionghoa, yang pada saat itu kerap berkumpul di kantor Sin Ming Hui (SMH – "Perkumpulan Cahaya Baru").

Gambar 5. Perayaan 1 Mei 1947 di Yogyakarta. Diasung poster Soekarno dan poster Karl Marx-Engels-Lenin-Stalin. Sumber: Arsip Nasional Belanda (Het Nationaal Archief), Den Haag.
1946. Perpustakaan Nasional, Jakarta.

SMH adalah organisasi sosial di kalangan masyarakat Tionghoa yang terbentuk di awal 1946 di Kota Jakarta (sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa rasial Tangerang). Di samping melakukan kerja-kerja karitatif, di dalam perkembangannya SMH membuka kerja pembelaan hukum bagi golongan buruh ("afdeling kaum buruh"), dan ini menjadi satu kegiatan utama SMH. SOBSI membangun kontak-kontak awal dengan SMH afdeling kaum buruh. Pada 27 April 1947, berhasil diadakan "Pertemoean di antara wakil2 gerakan boeroeh Indonesia terdiri dari sdr.2 Boejoeng Saleh wakil SOBSI,

Soepardjan wakil Serikat Boeroeh Minjak dan Soeparna wakil Sarboepri dengan Poesat Perserikatan Boeroeh Tionghoa Sin Ming Hui jang diwakili oleh sdr.2 Injo Beng Goat ketoea, Oh Bian Hong, Liem Hong Tjiang, dll.", [8] di kantor SMH di Jakarta. Dari pertemuan itu, diberitakan bahwa:

> Sin Ming Hui sedang mendidik kader2 oentoek menjoesoen gerakan boeroeh di daerah2 pendoedoekan Belanda. ... Selanjoetnja sdr. Soeparna atas nama Sentral Biro SOBSI menjerahkan beberapa boeah boekoe, antaranja tentang 1 Mei oentoek perpoestakaan Sin Ming Hui dan seboeah paloe rapat sebagai lambang persaudaraan dan kerdja.[9]

Diketahui pula dalam pertemuan itu disepakati untuk mengadakan perayaan 1 Mei 1947 dengan parade bersama dan pertandingan olahraga (Lihat: Lampiran dan Gambar 5). Juga, SOBSI mengundang wakil SMH untuk hadir di dalam Kongres pendirian organisasi SOBSI di Malang pada 18 Mei 1947. Nampaknya, Oh Bian Hong, wakil SMH yang hadir dalam Kongres SOBSI, belajar banyak dari pengalaman organisasi SOBSI yang mampu menghimpun berbagai serikat buruh dari beragam lapangan industri di pulau Jawa. SMH afdeling kaum buruh di kemudian hari, pada 1 September 1947, berkembang menjadi serikat buruh tersendiri yang lepas dari organisasi sosial induk SMH, yaitu: Sin Ming Lao Kung Hui (Organisasi Buruh Cahaya Baru). Sin Ming Lao Kung Hui kemudian di April 1948, juga berupaya menghimpun berbagai serikat buruh Tionghoa yang tersebar di Jawa, Sumatera, dan juga Makassar dalam satu induk: Federasi Perkumpulan Buruh Seluruh Indonesia. Mereka bisa dengan bangga mencantumkan nama "Indonesia" dalam induk organisasi baru itu.

Demikianlah, bahwa upaya konsolidasi lintas batas ini menumbuhkan rasa solidaritas dan persatuan di antara masing-masing serikat yang saat itu baru mulai tumbuh kembang dalam alam kemerdekaan menghadapi pemerintahan negara muda Indonesia. Serikat buruh melihat ada kepentingan jangka panjang yang mesti diperjuangkan, tidak hanya persoalan sesaat, dan ini memerlukan sinergi bersama dalam satu induk organisasi. Tanpa adanya persatuan gerakan buruh, perayaan 1 Mei menjadi kesia-siaan belaka. Karenanya, persatuan di kalangan buruh merupakan cita-cita dan juga langkah yang terus diupayakan kaum buruh Indonesia, tanpa mendahulukan identitas kesukuan ataupun agama. Persatuan di dalam SOBSI dipandang sebagai kekuatan kelas buruh. SOBSI pada masa itu dipandang cukup mampu menampung aspirasi kepentingan serikat buruh dalam membela kepentingan buruh anggota, di tingkat pusat. Dalam konteks ini, dapat dimengerti bahwa perkembangan SOBSI di kemudian hari di tahun 1948 dalam persetujuannya atas Perdjanjian Renville, yang menjadikannya sebagai identitas politik kelompok tertentu, adalah yang membuka keretakan persatuan buruh ini. Bahwa ketika kekuataan kelas buruh dicucuk oleh kepentingan politik kelompok tertentu, dengan sendiri persatuan gerakan buruh menjadi kemustahilan. Dalam terang sejarah kita tahu bahwa

[8] *Merdeka,* 29 April 1947
[9] *Ibid..*

kebersamaan gerakan buruh ini memang berumur pendek. Namun demikian, perayaan 1 Mei 1947 membuktikan bahwa upaya-upaya persatuan telah berhasil ditanamkan. Dan SOBSI, sampai di akhir 1948, terbukti mampu menyusun kekuataan kaum buruh menjadi satu kekuatan sosial masyarakat yang diperhitungkan oleh pemerintah negara baru Indonesia.

d. Perayaan 1 Mei Dalam Rumusan Hukum UU No.12/1948

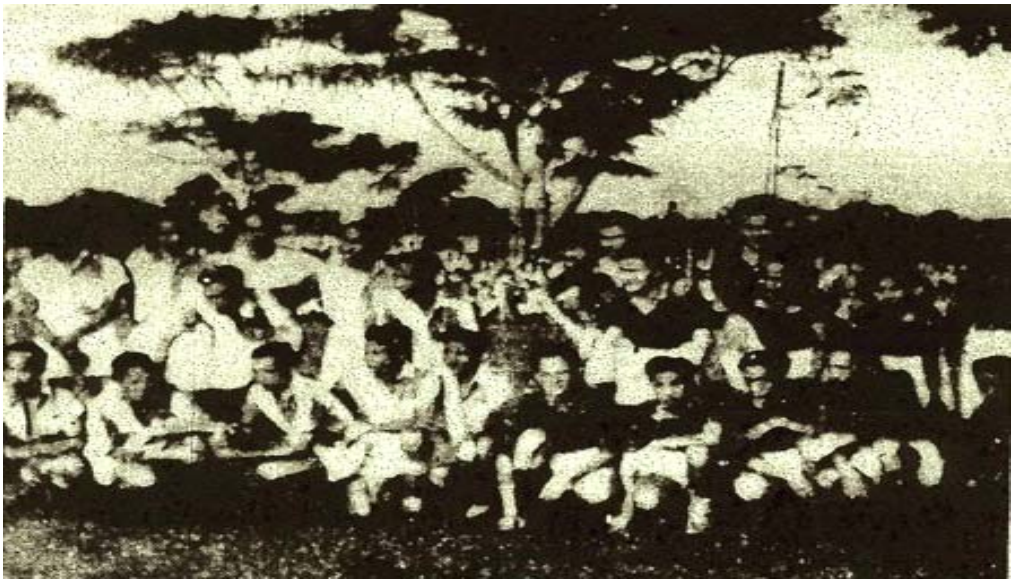

Gambar 6. Foto bersama kesebelasan sepak bola tim Chung Hua Hui dan P.O.R.I., Djakarta, 2 Mei 1947. Sumber: Merdeka, 29 Mei 1947. Modern Indonesia Project Microfiche collection (Cornell University).

Upaya-upaya persatuan dari gerakan buruh memperoleh gaungnya di dalam perumusan UU No. 12/1948. Satu "Rancangan oendang-oendang sosial" seperti yang diungkapkan Maria Ulfah sudah berhasil disusun selama masa Kabinet Sjahrir kedua, dan hingga akhir 1946 telah terdapat satu naskah awal rancangan undang-undang. Namun rancangan undang-undang itu tidak pernah diajukan ke BP-KNIP untuk dibahas.

Pada saat itu, di awal 1947, Presiden Soekarno memperluas keanggotaan BP-KNIP dengan memberikan sejumlah kursi tambahan yang didominasi oleh Sayap Kiri agar dapat mendukung posisi pemerintah, sebagai bagian dari krisis politik akibat Perdjandjian Linggadjati. Dari sini, beberapa aktivis buruh memasuki ranah politik praktis, duduk sebagai "wakil golongan boeroeh" di dalam parlemen transisi negara muda Indonesia tersebut. Keterwakilan ini menjadi insentif tersendiri bagi upaya persatuan gerakan buruh di tingkat lokal. Mereka adalah: Asraroedin (aktivis serikat buruh PTT Bandung), Koesnan (aktivis Gaboengan Serikat Boeroeh Vertikal) dan K. Werdojo (Persatoean Goeroe Repoeblik Indonesia).

Sejak penunjukkannya sebagai wakil golongan buruh di dalam BP-KNIP di Maret 1947, Asraroedin mendesakkan pembahasan rancangan "oendang-oendang

sosial" susunan Kementerian Sosial. Pada 26 April 1947, Asraroedin mengajukan mosi pembahasan "oendang-oendang sosial" di BP-KNIP yang didukung oleh 10 anggota lainnya – kesemuanya dari Sayap Kiri.[10]

Menanggapi mosi tersebut, rancangan "oendang oendang sosial" tersebut baru diajukan oleh pemerintah pada 7 Mei 1947. Pembahasan di BP-KNIP cukup berlarut-larut seiring dengan memburuknya situasi politik yang menghantar kejatuhan kabinet Sjahrir kedua pada Juli 1947, dan digantikan oleh Amir Sjarifoeddin. Dalam kabinet Amir, Kementerian Perburuhan untuk pertama kalinya terbentuk, dengan dipimpin oleh seorang perempuan muda S.K. Trimoerti. Beliau melanjutkan program kerja Maria Ulfah, termasuk tentang soal pembahasan rancangan "oendang-oendang sosial" dalam rapat-rapat BP-KNIP. Tujuannya, agar rancangan "oendang-oendang sosial" ini bisa diterima, sebab ini dapat menjadi bukti penting sebagai klaim keberpihakan pemerintah atas kelas buruh.

Di dalam perjalanan rapat-rapat pembahasan "oendang-oendang sosial" ini, ternyata terjadi penambahan 4 pasal baru atas naskah awal: tentang penetapan batas usia 14 tahun anak-anak, tentang buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid, tentang hak istirahat 3 bulan bagi buruh yang telah bekerja 6 tahun berturut-turut, dan tentang hari 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajibannya bekerja. Penambahan 4 pasal baru ini dilakukan oleh panitia pembahas dari Sayap Kiri dalam rapat BP-KNIP pada 18-19 September 1947. Penambahan ini baru disepakati pemerintah enam bulan kemudian – dikarenakan jatuhnya kabinet Amir di awal 1948, yang kemudian digantikan oleh Hatta, sehingga pihak pemerintah agak terlambat mengambil sikap dalam rapat pembahasan yang kerap ditunda.

Sementara itu, memburuknya situasi sosial-ekonomi negara muda Indonesia (salah satunya disebabkan oleh blokade Belanda), dan juga naiknya harga beras dan bahan pakaian sepanjang 1947, menimbulkan kegelisahan di kalangan buruh anggota. Persoalan kesejahteraan menjadi titik perhatian utama Serikat Buruh. Untuk meredam gejolak tuntutan dari gerakan buruh, kabinet Hatta tanpa ragu sedikitpun menyetujui penambahan 4 pasal baru usulan Sayap Kiri. Hatta menyadari perlunya dukungan politik dari gerakan buruh, karena minim mendapatkan sokongan dari partai politik lain. Namun, Hatta juga mengambil sikap hati-hati menghadapi potensi gerakan buruh sebagai kekuatan sosial. Menteri Perburuhan yang ditunjuknya adalah Koesnan, seorang aktivis moderat yang sebelumnya duduk di dalam BP-KNIP dan mengetahui proses pembahasan rancangan "oendang-oendang sosial" itu. Ini memberinya

Bagi Pemerintah sendiri, gerakan buruh memiliki potensi kekuatan sosial yang tidak bisa disepelekan

[10] Lihat: Arsip No. 103, Inventaris Arsip Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Poesat 1945-1950. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

sedikit kekuatan tawar untuk dapat mengalihkan tuntutan buruh akan kesejahteraan dengan pencapaian dalam rumusan hukum. Kurang dari dua bulan sejak terbentuknya kabinet Hatta, Koesnan langsung menyetujui penambahan 4 pasal baru tersebut dan mengirim nota persetujuannya pada 10 Maret 1948.[11] Sebulan kemudian, rancangan "oendang oendang sosial" itu disetujui dan disahkan sebagai "oendang oendang kerdja" pada 20 April 1948. Undang-undang ini kemudian dikenal sebagai pencapaian tertinggi bagi gerakan buruh – walau sesungguhnya, beberapa pasal di dalamnya belum sempat dilaksanakan penuh, bahkan sampai hari dihapuskan keberlakuannya oleh UU Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masuknya perumusan jaminan hukum bagi buruh untuk "dibebaskan dari kewajiban bekerja untuk merayakan hari kemenangannya" bukanlah semata-mata hadiah cuma-cuma dari pemerintah negara muda Indonesia, yang berbaik hati tanpa pamrih mendukung gerakan buruh. Ada pertautan antara kepentingan negara (yang memerlukan dukungan gerakan buruh bagi perjuangan kemerdekaan dan dukungan politik bagi stabilitas pemerintahan) dengan perjuangan tuntutan gerakan buruh (baik di dalam parlemen maupun di tingkatan basis anggota). Dinamika pertautan kepentingan negara dengan tuntutan kesejahteraan buruh ini dipengaruhi konteks sosial-politik-ekonomi Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Gerakan buruh memang mendukung kemerdekaan Indonesia, sebagaimana merupakan cita-cita umum sebagai bangsa yang terjajah dan memandang kemerdekaan itu sebagai alat bagi perjuangannya. Namun, gerakan buruh tidak serta-merta tunduk akan segala keputusan pemerintah. Gerakan buruh berani mengajukan inisiatif perayaan 1 Mei dan juga tuntutan kepentingan buruh anggota, terhadap pemerintah. Bagi pemerintah sendiri, gerakan buruh memiliki potensi kekuatan sosial yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Walau tidak semua tuntutan buruh dapat dipenuhi, pemerintah juga melakukan manuver-manuver politik dalam upaya meredam gejolak gerakan buruh.

6. Penutup

Catatan awal ini telah memberikan gambaran tentang bagaimana hari 1 Mei dipersepsikan, dimaknai dan dirayakan serikat buruh pada masa-masa awal kemerdekaan 1946-1947, hingga pada pengakuannya oleh negara dalam aturan hukum di tahun 1948. Terbitan-terbitan serikat buruh dari masa itu memberikan petunjuk-petunjuk dasar dalam rekaman sejarah buruh tentang perjuangan buruh dalam pemaknaan perayaan 1 Mei sebagai hari kemenangan dan juga ekspresi keprihatinan gerakan buruh akan keadilan sosial. Jaminan hukum bagi buruh dalam merayakan hari kemenangannya merupakan satu bentuk kemenangan kecil gerakan buruh dari masa 1946-1947. Kemenangan ini dapat dinikmati tanpa kendala ancaman

[11] Lihat: Arsip no. 194, Inventaris Arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia 1945-1949. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

negara sepanjang tahun 1948-1950 hingga di tahun 1952. Ini juga merupakan masa bagi perkembangan gerakan buruh Indonesia menjadi satu kekuatan sosial di dalam masyarakat. Demonstrasi dan pemogokan yang dilancarkan serikat buruh sepanjang 1948 hingga 1950 menyingkap tuntutan akan pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Sayangnya, perjuangan buruh ini dipandang sebagai ancaman serius oleh pihak militer yang mulai menyusun kekuatan internal. Gubernur Militer Jawa Tengah, Gatot Soebroto, menetapkan pada 25 Februari 1950 larangan pemogokan di perusahaan-perusahaan vital negara dengan ancaman pidana 3 tahun penjara. Perjuangan gerakan buruh akan kesejahteraan, terutama diorganisir serikat buruh perusahaan negara, yang dilancarkan lewat pemogokan, dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas politik. Setahun kemudian, pada 13 Februari 1951, Perdana Menteri yang juga Menteri Pertahanan ad-interim, Mohammad Natsir, menetapkan Peraturan Kekuasaan Militer Pusat nomor 1 yang melarang segala bentuk pemogokan di perusahaan-perusahaan vital, kantor-kantor jawatan dan lembaga negara. Walau sepanjang 1952 sampai 1957 tidak ada hambatan bagi gerakan buruh dalam merayakan 1 Mei, namun bayang-bayang ancaman pidana dari berbagai peraturan pelarangan pemogokan itu menghantui kerja-kerja pengorganisasian serikat buruh di tingkat basis. Peraturan pelarangan pemogokan itu menjadi keprihatinan utama serikat buruh dalam perayaan 1 Mei 1951, dan ramai diperdebatkan sepanjang 1952, sampai akhirnya dicabut di tahun 1957.

Referensi

Adisoemarta. (ed.) *Revoloesi Nasional dan 1 Mei*. Jogjakarta: Badan Penerbitan – Oesaha Kaoem Boeroeh, 1947.

Anderson, Benedict. *Java in A Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ithaca: Cornell University Press, 1972.

Hadiz, Vedi. *Workers and the State in New Order Indonesia*. London/ New York: Routledge, 1997.

Sandra. *Satoe Mei: Hari Kemenangan Boeroeh Sedoenia*. Djokja: Pendidikan Boeroeh, 1947.

_____. *Sedjarah Pergerakan Boeroeh Indonesia*. Djakarta: PT Pustaka rakjat, 1961.

Suprapti, I.N. *Djedjak Dynamica Masjarakat.* Poestaka Boeroeh. Djakarta: Barisan Boeroeh Wanita. 1946 (?)

Suryomenggolo, Jafar. "Sejengkal menjadi Sehasta: THR dalam Dinamika Hukum dan Gerakan Buruh Indonesia," dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, hal. 197-218. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Trimurti, S.K. *ABC Perdjoangan Boeroeh*. Jogjakarta: Poesat Pimpinan Partai Boeroeh Indonesia, 1948.

Lampiran

Tabel 1. Rencana Kegiatan Olahraga Perayaan 1 Mei 1947 antara SOBSI dan Poesat Perserikatan Boeroeh Tionghoa Sin Ming Hui
Sumber: *Merdeka*, 29 April 1947

Atjara hari boeroeh 1 Mei

Rapat Oemoem
Tempat : di Balai Pertemoean Gambir
Waktoe : djam 9.00 pagi (tepat)
Atjara : Pidato pemboekan oleh Ketoea Panitia
Pidato samboetan oleh:

a. Pak Wirjo
b. Wakil Partai Sosialis
c. Wakil Sin Ming Hui
d. Wakil Progressieve Groep
e. Wakil SOBSI

Ditoetoep (selesai) kira-kira djam 11.00
Olah Raga:
Bola Krandjang:
Tanggal : 2 Mei 1947
Tempat : di lapangan Deca Park
Waktoe : dari djam 16.00 – 17.05 sore
Antara : kedoea belasan Chung Hua – P.O.R.I.
Adapoen soesoenannja sbb:

CHUNG HUA:	P.O.R.I. :
1. Kwee Hwat Gie	1. Nj. Satir
2. Ong Sioe Tjiang	2. Nn. Titi Rasaul
3. Kwa Hok Liong	3. Nn. Sriwati
4. Pong Lay Kim	4. Nn. N. Kawilarang
5. Oh Thion Hok	5. Nj. Haroen
6. Tan Siauw Tjong	6. Nj. Soemadji
7. Nn. Martha Tjie	7. Aljon
8. Nn. Lie Tjien Koem	8. Parmo
9. Nn. Tan	9. Soeleiman
10. Nn. Tan Sioe Loan	10. Haroen
11. Nn. Kho Lip Hiang	11. J. Siregar
12. Nj. Lie Tjwan Sie	12. Soebagio

1. Sepak Bola:
   Tanggal : 2 Mei 1947
   Tempat : lapangan Deca Park
   Waktoe : dari djam 17.10 – 18.25
   Antara : Kesebelasan Tionghoa – P.O.R.I.
   Adapoen soesoenannja sbb:
   Zakaria, Moh. Salim, Boeang, Abdullah, H. Fatoellah, Daoed, Agoes, Oscar, Mat dongker, Soebari, Moegeni
   Kesebelasan Tionghoa: beloem dapat dioemoemkan
2. Badminton:
   Tanggal : 2 Mei 1947
   Tempat : dekat "Korra" (sebelah Departemen Economische Zaken, Molenvliet)
   Waktoe : dari djam 19.00 – habis (selesai)
   Antara : Chung Hua – P.O.R.I.

Single: 1. Tan Tjin Ho 2. Lim Soey Liong 3. Kauw Hon Swie	Single: 1. Soedirman 2. Soejoedana 3. Aseli
Double: 1. Lim Soey Liong (dan) Tan Jok Soei 2. Tan Tjin Ho (dan) Ho Tik Gwan	Double: 1. Soedirman (dan) Aseli 2. Soejoedana (dan) Soekadie

3. Tennis:
   Tanggal : 4 Mei 1947
   Tempat : Pegangsaan Barat (belakang Kementerian Kemakmoeran)
   Waktoe :
   a. pagi, dari djam 7.30 – 12.00
   b. sore, dari djam 16.00 – habis (selesai)
   Adapoen soesoenannja sbb:
   1. Double: Kho See Kiat, Liem Keng Kiem, Nn. Soepandi
   2. Single: Ketje, Katilli
   3. Mixed: W. Latumeten, Nj. Tinangon, Liem Yoe djiem, Nj. Soenarjo

GERAKAN SOSIAL DI BOLIVIA: PENGALAMAN MELAWAN PRIVATISASI

Angga Natariandi

Abstrak

This article discusses about social movements in Bolivia especially that developed and expand from 1985 to 2006. The social movement that more expand along government policy that perform of political change in Bolivia that assumed bringing a negative impact for the Bolivian. Eradication coca and new economic policy with privatization (water and hydrocarbon) became a factor that make the struggle of the Bolivian rise and expand. The struggle of people be unique when social movement can be said successfully makes the government power is fallen (in this article is focused to neoliberalism). The success of the social movements will be the objectives of the writers to flatten and explain the phenomenon in Bolivia. The success of the social movements indicators can not quit from MAS and Morales, they took political change to the left ideology and Gramscian's hegemony theory.
Keywords: Social movements, coca, privatization, neoliberalism

I. PENDAHULUAN

Amerika Latin bak wahana "perang". Bisa perang dalam arti sesungguhnya atau perang dalam arti pertarungan ideologi semata. Namun, satu yang pasti, gerakan sosial di Amerika Latin masih bertahan di tengah perubahan arus zaman.

Pada awal abad ke-21, gerakan kiri[12] cukup mendapat perhatian di wilayah selatan benua Amerika itu. Misal, yang diperlihatkan oleh Presiden Luiz Inasio Lula Da Silva di Brazil maupun Presiden Venezuela Hugo Chavez. Dengan kadar yang berbeda-beda, ideologi "kiri" juga sedang dianut oleh pemerintahan di Bolivia, Kuba, Argentina, Panama, Uruguay, dan Chile.[13] Uniknya para pemimpin yang disebut "kiri" itu terpilih secara demokratis melalui pemilihan umum.[14] Mereka menjadi simbol kemenangan politik kemandirian di tengah agenda pasar bebas, yang terangkum

[12] Istilah "kiri" merujuk pada paham yang menginginkan perbaikan taraf kesejahteraan dan kebebasan. Arti "kiri" di sini mengacu pada sosialisme reformis. Sosialisme mengacu pada perubahan tatanan baru (sosial, ekonomi, politik). Lihat Sidney Webb, "The Basis of Socialism: Historic," dalam G. Bernard Shaw, *Fabian Essay in Socialism* (London: Fabian Society, 1931), 27, 30, dalam Anthony Giddens, *Beyond Left and Right: Tarian Ideologi Alternatif di Atas Pusara Sosialisme dan Kapitalisme, (terj. Beyond Left and Right)* (Yogyakarta: IRCiSod, 2002), hlm. 100.

[13] Lutfi Anggara, "Fenomena Anti-Liberalisme di Amerika Latin", *Global Jurnal Politik Internasional.* Vol. 9, No. 1, Mei-November 2007, 86. Lihat juga Matthew R. Cleary, "Explaining The Left's Resurgence", *Journal of Democracy*, Vol 17, No. 4, Oktober 2006

[14] Kecuali Kuba, yang memiliki sejarah tersendiri. Rakyat Kuba melihat bahwa politik multipartai tidak banyak positifnya. Lihat Robert E. Quirk, *"Poros Setan" Kisah Empat Presiden Revolusioner: Fidel Castro, M. Ahmadinejad, Evo Morales, Hugo Chavez* (Yogyakarta: Prismasophie, 2007)

dalam *Washington Consensus,*[15] yakni paket kebijakan privatisasi dan liberalisasi ekonomi.

Perkembangan "kiri" di Amerika Latin bukan hal yang baru. Menurut Abigail Noble, nilai-nilai dan prinsip-prinsip "kiri" sudah terbentuk dan menjadi pondasi masyarakat di benua ini.[16] Namun, deraan kebijakan rejim neoliberalisme[17] telah menjadikan wilayah tersebut miskin dan ketiadaan perlindungan dari negara.[18]

Tulisan ini akan mengupas tentang fenonema gerakan sosial yang konon identik dengan "kiri" di Bolivia.

Bolivia merdeka dari kolonial Spanyol pada 1825. Pasca kemerdekaan itu, Bolivia tidak menjadi negara yang damai dan tenteram. Tapi pergolakan politik mewarnai perjalanan negara tersebut di kawasan Amerika Latin. Contohnya pengambilalihan pemerintahan dengan kudeta militer. Peristiwa lainnya adalah Revolusi Rakyat 1952[19] yang diprakarsai oleh intelektual-intelektual kelas menengah dan para petani.

Setelah Revolusi 1952 itu, pada 1964 sampai 1985, Bolivia mengalami pergantian presiden sebanyak 18 kali. Hanya satu presiden yang menyelesaikan kepemimpinan selama satu periode. Pada pemilihan 1978, 1979, dan 1980 pengambilalihan kekuasaan dilakukan dengan penuh kekerasan. Pada 1981, setelah militer memaksa mundur Garcia Mesa dari kursi kepresidenan, Bolivia mengalami tiga kali kepemimpinan militer selama 14 bulan berikutnya.[20]

---

[15] *Washington Consensus* adalah butir-butir kesepakatan ketentuan ekonomi yang harus dijalankan oleh negara-negara penghutang. Isinya; 1. Mengurangi pengeluaran publik, 2. liberalisasi keuangan, 3. Liberalisasi perdagangan, 4. Mendorong investasi asing langsung (FDI), 5. Privatisasi BUMN, 6. Deregulasi ekonomi, 7. Nilai tukar yang kompetitif untuk perekonomian berbasis ekspor, 8. Menjamin disiplin fiskal, 9. Reformasi pajak, 10. Perlindungan hak cipta. Lihat Yuziro Hayami, "From the Washington Consensus to the Post-Washington Consensus: Retrospect and Prospect" dalam Asian Development Review, Vol. 20, No. 2, 2003. Lihat juga James E. Mahon, Jr, "Good-Bye to the Washington Consensus?", *Current History*, Vol, 102, No. 661, Februari 2003, hlm. 59.

[16] Selama abad 19 dan awal abad 20, ide-ide dan gerakan sosial di Amerika Latin memiliki pengaruh di kalangan intelektual "kiri" dan penduduk imigran Eropa. Lihat Abigail Noble dan Martin Weinstein, "A Resurgent Left in Latin America: Implications for the Region and U.S Policy", LOGOS, *Journal of Modern Society and Culture*, No. 42, Spring 2005, 3 dalam Nurani Soyomukti, *Hugo Chavez: Revolusi Bolivarian dan Politik Radikal,* (Yogyakarta: Resist Book, 2007), hlm. 41.

[17] James Petras mengatakan, Bolivia menerapkan neoliberalisme gelombang ke-4, setelah Chili, Uruguay, dan Argentina pada 1970an. James Petras dan Henry Veltmeyer, *Social Movementsand State Power: Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador* (London: Plutu Press), hlm. 179-180

[18] Airlangga Pribadi. *Kemenangan Demokrasi Popular Amerika Latin.* dalam Pengantar Nurani Soyomukti. *Revolusi Sandinista: Perjuangan Tanpa Akhir Melawan Neoliberalisme.* (Garasi: Yogyakarta, 2008), hlm. 19.

[19] Samuel Huntington melihat bahwa Revolusi Rakyat 1952 merupakan revolusi yang tidak selesai. Samuel Huntington. *Political Order in Changing Society, (terj) Tertib Politik di Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah.* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 504-506.

[20] Karen Biddle, Fiona Kenyon, dan Fernando Prada. "Bolivia's New Economic Policy", dalam http://www-personal.umich.edu/~kathrynd/Bolivia.w06.pdf; Internet; diakses pada 17 Oktober 2008

Bolivia merupakan salah satu negara dengan banyaknya gerakan masyarakat lokal: gerakan tani, *cocaleros, campesinos,*[21] dan organisasi-organisasi Indian, yang berbasiskan koalisi "horisontal" yang luas termasuk pekerja tambang, kaum miskin perkotaan dan serikat buruh di La Paz dan Cochabamba. Mereka sukses menggulingkan rejim neoliberal represif Gonzalo Sanchez de Lozada.[22] Selanjutnya, gerakan tani mengalami beberapa kemunduran, ketika salah satu pemimpin kuncinya, Deputi Parlemen Evo Morales,[23] mendukung presiden Carlos Mesa[24] yang menerapkan kebijakan neoliberal.[25]

Pada 22 Januari 2006, terjadi peristiwa bersejarah bagi rakyat Bolivia, yaitu dilantiknya pemimpin gerakan tani Bolivia Evo Morales. Peristiwa ini disambut juga oleh para pemimpin “kiri” yang terlebih dahulu memimpin di kawasan Amerika Latin.

Kemenangan Morales tidak terlepas dari peran MAS (Movimento Al Socialismo). MAS merupakan koalisi berbagai gerakan sosial: gerakan tani, gerakan buruh, dan gerakan masyarakat adat, serta berbagai organisasi akar rumput yang mendukung gerakan antiprivatisasi.[26] MAS, pada awalnya gerakan sosial yang bertransformasi menjadi partai politik peserta pemilu. Pada pemilu 2002, MAS berada di bawah MNR *(Movimiento Nacional Revolucionario)* dan MBL *(Movimiento Bolivia Libre)*. Program antineoliberalisme menjadikan MAS sebagai pemenang pemilu 2006 dan mendudukkan Morales sebagai presiden.[27]

Gerakan sosial di Bolivia merupakan pelaku perubahan politik dan ekonomi. Tulisan ini mengkaji fenomena politik gerakan sosial di Bolivia, pada saat diberlakukannya program-program neoliberalisme. Tulisan ini akan menelusuri;

(1) Bagaimana pengaruh perkembangan struktur ekonomi dan politik negara pascakebijakan Ekonomi Baru terhadap gerakan sosial di Bolivia?

(2) Bagaimana peran aktor-aktor politik gerakan sosial yaitu: Coordinadora (*Coordinadora de Defensa del agua y de la Vida*), NCDRG (*National Coordinator for the Defence and Recovery of Gas*), *Cocaleros* dalam mengorganisasikan dan memobilisasi berbagai sumber daya untuk melawan program neoliberalisme?

---

[21] *Campesino* berarti petani, juga etnis asli *Aymara* yang bermukim di timur Danau Titicaca, di bagian utara La Paz.

[22] Gonzalo Sanchez de Lozada (Goni) adalah kepala pertambangan, memenangkan pemilu pada Juni 1993 setelah gagal pada 1989.

[23] Juan Evo Morales Ayma adalah Presiden Bolivia ke-80. Morales menjabat presiden sejak 22 Januari 2006. Lihat Hempri Suyatna, *Evo Morales: Presiden Bolivia Menantang Arogansi Amerika* (Jakarta: Hikmah: PT Mizan Publika, 2007); Eko Prasetyo, *Inilah Presiden Radikal!*, (Resist Book: Yogyakarta, 2006); lihat juga BBC News, Profile :Evo Morales “Aymara Indian Evo Morales has become in recent years both a key and controversial figure in Bolivian politics” dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3203752.stm; diakses pada 4 Maret 2008

[24] Carlos Mesa adalah Wakil Presiden Gonzalo Sanchez lozada. Setelah berhenti sebagai presiden dan melarikan diri ke luar negeri, Mesa menjabat sebagai Presiden Bolivia pada 17 Oktober 2003. Protes terhadap kebijakan privatisasi dikenal dengan *Bolivian Gas War.* Mesa berhenti pada 6 Juni 2005.

[25] James Petras, “The Centrality of Peasant Movements in Latin America,” dalam: http://www.counterpunch.org/petras06042005.html, diakses pada 4 Maret 2008

[26] Hempri Suyatna, *op. cit*, hlm. 87.

[27] *Ibid,* hlm. 95.

I. Konsepsi Gerakan Sosial

Wilson mendefinisikan gerakan sosial sebagai, "Sebuah gerakan terorganisir dan terpimpin untuk melakukan perubahan sebuah tatanan sosial yang sudah ada, dengan cara yang noninstitusional."[28] Selanjutnya, gerakan sosial juga mengacu pada sebuah aksi kolektif untuk mengubah semua atau beberapa aspek dalam masyarakat. Gerakan sosial dapat pula mengakibatkan kekacauan, demonstrasi, kekerasan, pembentukan perserikatan dan partai politik baru atau mengambil bagian dalam sebuah aksi protes.[29]

Jenkins mengemukakan bahwa gerakan sosial dapat terjadi karena adanya perubahan kesempatan, tersedianya sumberdaya, dan adanya organisasi untuk melakukan aksi kolektif.[30] Gerakan sosial adalah sebuah gerakan yang rasional, dilandasi oleh pemikiran yang matang dan penuh perhitungan dalam memperoleh kesempatan politik.

Keberhasilan suatu gerakan sosial bergantung pada beberapa kondisi, di antaranya; dedikasi dan loyalitas anggota, efektivitas pemimpin dalam membuat keputusan, dan kondisi sosial yang kondusif untuk menyatukan masyarakat.[31] Terdapat beberapa konsep yang dapat dipergunakan untuk menganalisis bagaimana gerakan sosial mencapai tujuan-tujuannya secara praktis. Beberapa konsep itu adalah:

1. *Political Opportunity Structure*

Political Opportunity Structure (POS) merupakan mekanisme yang menjelaskan bahwa gerakan sosial terjadi karena memanfaatkan keterbukaan struktur politik.[32] Sidney Tarrow menekankan bahwa bentuk-bentuk ketegangan politik mengalami peningkatan, ketika para pelaku perubahan mendapatkan dukungan sumberdaya eksternal untuk keluar dari masalah atau mencapai tujuan yang mereka inginkan.

> Ketika suatu akses institusi telah terbuka, terjadinya perpecahan di dalam elit pemerintah, terbentuknya pihak lawan, dan kapasitas negara menjadi lemah, penantang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tuntutannya. Ketika

[28] John Wilson, *Introduction to Social Movement*, (New York: Basic Book, 1973), hlm. 8.
[29] Rober J. Brym, "Toronto International Women's Day Posters", 1979, dalam Lorne Tepperman dan R. Jack Richardson, *An Introduction to Sociology: The Social World 2nd Edition*, (Mc Graw-Hill Ryerson Limited, 1991), hlm. 671.
[30] Craig J. Jenkins, *Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movement*, (Annual Review of Sociology, 1983), hlm. 530.
[31] Bruce J. Cohen dan Terri L. Orbuch, *Introduction to Sociology*, (Mc Graw-Hill Inc,1990), hlm. 177-178.
[32] Doug McAdam, "Conceptual Origins, Current Problems, Future Deirections" dalam *Comparative Perspective on Social Movements Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings.* ed. Doug McAdam, John D. McCarthy and Mayer N. Zald (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), dalam Abdul Wahib Situmorang *op. cit,* hlm. 29.

> dipadukan dengan kekuatan tinggi untuk melakukan suatu aksi, kesempatan politik tersebut akan menghasilkan bentuk perlawanan.[33]

2. Struktur Mobilisasi

Struktur Mobilisasi adalah cara gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif: pilihan taktik gerakan, bentuk organisasi, dan "pengisian" posisi-posisi strategis dalam masyarakat.[34] Dengan kata lain, Struktur Mobilisasi merupakan kendaraan kolektif dalam memobilisasi masyarakat.

Struktur Mobilisasi masuk ke posisi-posisi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, unit-unit keluarga, jaringan pertemanan, asosiasi tenaga sukarela, unit-unit tempat bekerja, dan elemen-elemen negara menjadi lokasi-lokasi struktur mobilisasi mikro. Memperjelas definisi struktur mobilisasi, McCarthy mengungkapkan dua kategori, yaitu struktur formal dan informal.[35] Struktur informal berwujud jaringan kekerabatan dan persaudaraan, yang menjadi dasar rekruitmen anggota. Sementara struktur informal menjadi kontributor penting munculnya gerakan-gerakan lokal. Lebih jauh, McAdam menambahkan bahwa hubungan formal dan informal di antara masyarakat dapat menjadi sumber solidaritas dan memfasilitasi gerakan itu berkembang.[36] Tarrow menambahkan:

> Kesulitan dari pembentuk (organisator) gerakan adalah model organisasi yang cukup kuat untuk berhubungan dengan pihak lawan, tetapi cukup fleksibel untuk mengijinkan koneksi informal yang menghubungkan orang dan jaringan lainnya untuk bersama-sama berkoordinasi melakukan perlawanan.[37]

Struktur formal memiliki bentuk kelembagaan yang beragam, salah satunya adalah kelompok akar rumput yang mandiri.[38] Kelompok akar rumput adalah jenis struktur lokal di masyarakat bawah.[39] Rucht menambahkan bahwa model organisasi akar rumput mampu menjadi pelaku politik yang radikal dan berkomitmen tinggi terhadap gerakan.[40]

3. *Framing*

Framing merupakan salah satu acuan yang digunakan untuk memahami sukses dan gagalnya gerakan sosial.[41] Dalam hal ini, sejauh mana pelaku perubahan

---

[33] Sidney Tarrow, *Power in Movement Social Movement and Contentious Politics,* 2nd ed (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hlm. 71.
[34] Abdul Wahib Situmorang*, op. cit,* hlm. 7.
[35] *Ibid*, hlm. 8.
[36] *Ibid*, hlm. 8 & 31.
[37] Sidney Tarrow*, op. cit*, hlm. 124.
[38] Abdul Wahib Situmorang, *op. cit, hlm.* 31.
[39] John Lofland, *Protest: Studies of Collective Behavior and Social Movements* (New Brunswick: Transaction Book, 1985)
[40] Abdul Wahib Situmorang*, op. cit,* hlm. 9.
[41] *Ibid,* hlm. 10.

memiliki komitmen dalam memengaruhi dan meyakinkan publik, yang notabene memiliki keragaman dan perbedaan karakter.

Zald, mengidentifikasikan bagaimana pembentukan *framing.*[42] Contoh pembentukan *framing* adalah ketidakadilan yang terus-menerus sehingga aksi kolektif terjadi. Peranan media menjadi sangat penting dalam mengomunikasikan *framing* gerakan.[43]

McCarthy dan Zald memiliki gagasan serupa mengenai *framing* dalam media. Mereka menekankan bahwa media adalah alat utama bagi proses *framing*. Media bukanlah satu-satunya. Upaya-upaya langsung memengaruhi pemerintah, pemilihan umum dan agenda publik juga menjadi prioritas *framing*. Agen-agen gerakan berupaya membawa isu mereka ke dalam kelompok sasaran yang beragam, seperti media, partai politik, pejabat parlemen, dan pemerintah.[44]

d. Teori Hegemoni Antonio Gramsci

Pengaruh dan sumbangan terbesar Gramsci adalah kritiknya terhadap pendidikan politik indoktrinisasi dan pendidikan sebagai penindasan. Beberapa pemikirannya mengenai *civil society, counter hegemony* dan konsepnya mengenai *war of position* serta *war of manuver* telah menginspirasi *popular education*.[45] Pendidikan yang dimaksud merupakan 'aksi kultural' bagi *civil society* untuk membangkitkan kesadaran kritis rakyat terhadap sistem dan struktur yang menyebabkan ketertindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan.

Hegemoni, menurut Gramsci, terjadi melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Proses hegemoni dicapai dengan mekanisme konsensus, seperti halnya melalui institusi yang ada di masyarakat.[46] Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologis kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil (dominasi).[47]

Selain Hegemoni, Gramsci mengajukan gagasan Blok Historis. Blok historis digambarkan dengan:

> Jika hubungan antara intelektual dan people-nation, antara pemimpin dan yang memimpin, penguasa dan yang memerintah, disediakan oleh kohesi organik yang di dalamnya terdapat semangat untuk merasakan serta memahami dan dari sana pengetahuan akan didapat. Kemudian dan baru setelah itu, hubungan yang mewakili akan menggantikan elemen individu di antara penguasa dan yang memerintah, pemimpin dan yang memimpin, dan

[42] *Ibid*, hlm. 33.
[43] Media massa dan media elektronik, ruang publik menjadi sarana mengomunikasikan *framing* gerakan. Lihat, Sidney Tarrow, *op. cit*, hlm. 110-117.
[44] Abdul Wahib Situmorang, *op. cit,* hlm. 13.
[45] *Ibid*, hlm. xvi.
[46] Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 119-121.
[47] Richard Bellamy, *Modern Italian Social Theory, From Pareto to the Present*, (terj) Vedi R. Hasan, *Teori Sosial Modern: Perspektif Itali*), (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 185.

> hidup akan dapat dibagi, kekuatan sosial akan dapat diwujudkan melalui pembentukkan Blok Historis.[48]

Blok Historis dapat digunakan oleh kaum borjuis maupun kaum proletar. Jika kelas pekerja ingin mencapai hegemoni, maka harus pula menciptakan Blok Historis baru dengan memadukan kepemimpinan dalam bidang politik dan ekonomi.

Perang Posisi adalah perjuangan panjang yang ditujukan untuk mendominasi institusi-institusi masyarakat sipil. Kemudian, kekuatan pekerja diharuskan melancarkan perjuangan kebudayaan dan ideologi.[49] Perang Posisi bertujuan untuk mengepung aparatus negara dengan *counter hegemony*.[50] Hal ini, bukan memberikan serangan frontal pada negara, namun sebagai pondasi budaya baru. Perang Posisi merupakan penggabungan berbagai kekuatan sosial dalam sebuah konsepsi yang sama. Gramsci mengatakan:

> Hegemoni memerlukan penyatuan berbagai kekuatan sosial yang berbeda ke dalam sebuah aliansi yang luas yang mengungkapkan kehendak kolektif semua rakyat. Sehingga, masing-masing kekuatan bisa mempertahankan otonominya sendiri dan memberikan sumbangan dalam gerak maju menuju sosialisme.[51]

Pada dasarnya, alur berpikir di atas akan menjelaskan bagaimana gerakan sosial tumbuh dan berkembang. Di samping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik di Bolivia memengaruhi keadaan gerakan sosial untuk melakukan berbagai bentuk perlawanan.

Tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Sifat dan teknik analisis yang digunakan adalah penelitian eksplanatif, yang bertujuan menemukan penjelasan tentang mengapa suatu fenomena atau gejala sosial terjadi. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur. Berbagai data sekunder seperti buku, jurnal, dan sumber lain seperti internet dijadikan sumber penelitian.

II. KEBIJAKAN EKONOMI BARU DI BOLIVIA

Awalnya, Bolivia bernama *Upper Peru* atau Characas, dan *Lower Peru* yang saat ini menjadi Negara Peru. Kedua daerah tersebut dibentuk Spanyol sebagai jajahan sekaligus wilayah administrasi politik. Pada 1545, *Upper Peru* memunyai potensi cadangan perak yang sangat besar dan kaya dengan tambang.[52] Pada 1825,

---

[48] Antonio Gramsci, *Selection from The Prison Notebooks,* Quentin Hoare dan Nowell Smith (ed.), (New York: International publisher, 1976), hlm. 418.

[49] Monica Stillo, "Antonio Gramsci," dalam http://www.theory.org.uk/ctr-gram.htm,; internet; diakses pada 10 Maret 2008

[50] Nezar Patria dan Andi Arief, o*p. cit,* hlm.172-173.

[51] Roger Simon, o*p. cit*, hlm. 24.

[52] Spanyol datang ke Bolivia pada 1524 dan melakukan kolonialisasi pada 1532. Lihat Jan Knippers Black, *Latin America: It's Problem and It's Promise*, (London: Westview Press, 1984), hlm. 403.

Upper Peru (Bolivia) meraih kemerdekaan.[53] Simon Bolivar[54] menjadi salah satu tokoh pembebasan rakyat Bolivia dari kolonialisme Spanyol. Bolivia, pada awal berdirinya, merupakan negara dengan daerah teritorial yang sangat besar. Tercatat, bagian selatan Chili, daerah perbatasan Brasil, dan daerah perbatasan dengan Paraguay (*Chaco*) merupakan bagian dari Bolivia. Banyaknya peperangan membuat Bolivia kehilangan sebagian teritorialnya.[55]

Hilangnya Daerah Teritorial Bolivia (1825-1985)

ke Daerah Negara)	**Km²**
Argentina	170.758
Brasil	490.430
Chili	120.000
Paraguay	234.000
Peru	250.000
Total Area 1825	**2.363.769**
Total Area 1985	**1.098.581**

Sumber: Atlas Geografico de La Republica de Bolivia, Barcelona, 1985 dalam Benjamin Kohl dan Linda Farthing, op. cit, hlm. 43.

Setelah merdeka, Bolivia dihadapkan pada instabilitas politik dan ekonomi. Berbagai aksi pemberontakan dan kudeta militer mewarnai pembentukan negara Bolivia. Pada 1949,[56] aksi pemberontakan terjadi di daerah Catavi, yang mendapat dukungan dari Partai MNR. Dua tahun setelah gerakan di Catavi, pemilu dilakukan dan mengantarkan Paz Estenzorro (MNR) sebagai pemenang. Kemenangan tersebut tidak terlepas dari program kebijakannya yang menasionalisasi dan mereformasi

[53] Abad 18, perak tidak menjadi andalan, karena biaya ekspor meningkat. Kedudukan Spanyol yang melemah dimanfaatkan untuk mendeklarasikan kemerdekaan, pada 6 Agustus 1825. Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance,* (London:Zed Books, 2006), hlm. 40.

[54] Simon Bolivar dikenal sebagai tokoh pembebas Amerika Latin dan Presiden Pertama Bolivia (12 Agustus 1825-26 Januari 1825). Dikenal dengan *"el libertador"* (pembebas). Selain Simon Bolivar, ada pula Simon Rodriguez, Francisco de Miranda, Ezequiel Zamora Tupac Amaru, Jose Marti, Sandino dan Farabundo Marti. Lihat Richard Gott, *Hugo Chavez and the Bolivarian revolution*, (London: Verso, 2005), hlm. 91-116.

[55] Pada 7 Juni 1879 terjadi perang antara Peru, Chili, dan Bolivia yang lebih dikenal dengan *war of the pacific*. Perang berlangsung selama lima tahun. Bolivia mengalami kekalahan, pada 1880. Pada 1904, Bolivia menyerahkan daerah pantai kepada Chili dengan menandatangani *Treaty of Peace and Friendship.* Lihat Contry Studies: Bolivia, "From the War of the Pacific to the Chaco War"; diperoleh dari http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0020); Internet, diakses 24 Agustus 2008.

[56] Sepanjang tahun 1825-1949 instabilitas sosial, ekonomi, politik Bolivia berhadapan pada situasi yang cukup sulit, kehilangan daerah teritori sampai pada kudeta militer terjadi melanda Bolivia. Di tahun 1949 merupakan situasi sebagai bentuk perlawanan rakyat atau dapat dikatakan sebagai sebuah respon rakyat terhadap keadaan yang telah terjadi.

kepemilikan tanah bagi penduduk pribumi. Tetapi, hasil ini diinterupsi oleh militer dengan menghapuskan hasil pemilu.[57] Kesatuan militer mengalami krisis kepemimpinan. MNR mencoba mengambil alih kekuasaan dan dengan merampas gudang persenjataan serta mendistribusikannya kepada masyarakat sipil terutama kelas pekerja (buruh tambang). Keadaan ini memaksa militer mundur dan menyerah dalam pertempuran tiga hari. Setelah berhasil, Paz Estenssoro naik kembali sebagai presiden, pada 16 April 1952.[58]

Ketika nasionalisasi dan *land reform,* perusahaan pertambangan Bolivia (*Corporacion Minera Boliviana* – COMIBOL) menjadi bagian penting pertambangan nasional. Para pekerja tambang menjadi bagian pemerintahan. Para pekerja tambang mengorganisir persatuan para pekerja (*Confederacion Obrera Boliviana* – COB). Tujuan COB adalah menjamin keselamatan dan mengontrol para pekerja. MNR memberikan hak veto kepada para pekerja untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan di COMIBOL. Selain itu, pemerintah menaikkan upah buruh dan mempekerjakan kembali para pekerja yang telah dikeluarkan sebelumnya.[59]

Rene Barrientos[60] adalah presiden pertama yang bersifat diktator dan militeristik. Barrientos menjanjikan pemulihan ekonomi dan stabilitas politik Bolivia pascarevolusi 1952. Akan tetapi, kebijakannya masih melanjutkan kebijakan ekonomi yang dibentuk oleh MNR, yaitu kebijakan Indusri Subsitusi Impor (ISI). Di bawah kepemimpinan Barrientos pula, sektor ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar

[57] Argentina merupakan negara Paz Estenzorro dan para intelektual MNR mengasingkan diri. Ketika Paz memenangkan Pemilu 1951, Jenderal General Hugo Ballivián Rojas (1951-1952) naik sebagai Presiden. Di bawah Ballivan, Bolivia kacau: kerusuhan semakin membesar dan tidak terbendung. Lebih dari 190 kudeta dan percobaan kudeta terjadi semenjak kemerdekaan Bolivia. Lihat Donna Lee Van Cott, *Bolivia: The Construction of a Multiethnic Democracy*, dalam Howard J Wiarda dan Harvey F. Kline*, Latin American Politics and Development, 6th edition*, (Colorado: Westview Press, 2007), 17

[58] Pada 1952, ekonomi Bolivia memburuk. Pemerintah mencoba menstabilisasi sektor ekonomi dengan menaikkan pajak bagi golongan atas dan mereduksi pengeluaran sosial. MNR sebagai partai berkuasa terkooptasi oleh kelompok konservatif. MNR menjadi partai politik yang kental dengan klientelisme dan patronase. Lihat Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit*, hlm. 48; Contry Studies: Bolivia, "The Unfinished Revolution", diperoleh dari http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0029); Internet; diakses 24 Agustus 2008; Samuel P. Huntington, *op. cit,* hlm. 504-513.

[59] Contry Studies: Bolivia, "The Bolivian National Revolution 1952-1964: Radical Reforms", http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0028); Internet; diakses 24 Agustus 2008.

[60] Rene Barrientos Ortuno (Presiden 1964-65; Wakil Presiden, Mei 1965-January 1966; dan Presiden, 1966-69) adalah Presiden Pertama dengan kepemimpinan diktator. Barrientos meninggal dalam kecelakaan helikopter, pada 27 April 1969. Answer.com. "Biography: Renne Barrientos Ortuno", http://www.answers.com/topic/ren-barrientos; Internet; diakses 24 Agustus 2008; Bookrags. "Rene Barrientos Ortuno Biography.", http://www.bookrags.com/biography/rene-barrientos-ortuno/. Internet; diakses 17 Oktober 2008.

6,5% per tahun, yang disumbang dari kenaikan harga timah, pada 1966. Barrientos mendorong sektor swasta dan investasi asing untuk menanamkan modal di Bolivia.[61]

Kekacauan politik di Bolivia tidak bisa dihindari lagi, ketika Barrientos mulai mendiskriminasikan kelas pekerja melalui pengurang upah, pemutusan tenaga kerja, dan pembubaran konfederasi serikat pekerja Bolivia (Confederacion Obrera Boliviana – COB). Pekerja tambang melakukan penolakan. Pada 1967, para pekerja tambang beserta keluarganya dibunuh oleh militer sebagai bagian dari program stabilisasi ekonomi dan politik.[62]

Kepemimpinan diktator militer selanjutnya adalah Hugo Banzer,[63] yang mendapatkan dukungan dari Nationalist Popular Front (*Frente Popular Nacionalista* – FPN), MNR, dan The Bolivian Socialist Falange (*Falange Socialista Boliviana* – FSB). Di tahun pertama , ekonomi Bolivia mengalami pertumbuhan, ekspor meningkat tiga kali lipat. Hal tersebut didorong melalui produksi pertambangan minyak, gas alam, kapas, dan sumber mentah lainnya.[64] Pada 1974, keadaan politik mulai memburuk: mata uang Bolivia (Peso) mengalami devaluasi, harga kebutuhan pokok meningkat. Pemerintahan militer melakukan aksi brutal, untuk membasmi perlawanan masyarakat dan petani lokal.[65]

Bolivia mengalami krisis ekonomi: hutang negara meningkat tajam dari US $500 juta pada 1971 menjadi US $2,5 milyar, pada 1978.[66] Dunia Internasional, terutama negara-negara pemberi hutang menekan Banzer meliberalisasi sistem politik dan mendesak untuk mengadakan pemilu.[67]

Di masa Banzer, peta politik Bolivia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada 1980, Hernan Siles Zuazo dan Partai UDP (*Unidad Democrática Popular*) memenangkan pemilihan umum. Tetapi, diambil alih oleh Jenderal Luis García Meza. Kebijakan mengekspor kokain sebesar US$ 850 juta pada 1980 sampai dengan 1981, membuat Meza terancam di pergaulan internasional. Meza dituduh melakukan korupsi, dan kekejaman militer. Meza hanya memimpin satu tahun.

---

[61] Salah satu perusahaan swasta Gulf Oil Company diijinkan Barrientos untuk mengekspor minyak tanah dan gas alam dari Bolivia. Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit,* hlm. 50.

[62] Contry Studies: Bolivia, "Military Rule 1964-1982: The Presidency of Barrientos", http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0030); Internet; diakses 24 Agustus 2008

[63] Hugo Banzer adalah Presiden dari militer. Karir kepresidenannya berlangsung selama dua periode, 22 Agustus 1971-21 dan Juli 1978. Banzer dikenal sebagai diktator. Kepemimpinan pertamanya diperoleh melalui kudeta terhadap Juan Jose Torres. Lihat Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit,* hlm. 50.

[64] Contry Studies: Bolivia, "The Banzer Regime", http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0032); Internet; diakses 24 Agustus 2008.

[65] Aksi kekerasan dilakukan oleh Kolonel Andrés Sélich (Menteri Dalam Negeri) dengan menghapuskan persatuan buruh serta penutupan universitas. Pembunuhan disertai pembantaian terjadi pada 1974 ketika massa melakukan aksi pemblokiran jalan. *Ibid.*

[66] Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit,* hlm. 51.

[67] Hugo Banzer terpaksa mengadakan pemilu pada 1978, yang merupakan tuntutan dan syarat pinjaman utang atau pencairan dana pinjaman. Pemilu gagal berjalan karena banyak kecurangan. *Ibid*, hlm. 150-153.

Hernan Siles Zuazo akhirnya menyudahi kepemimpinan militer melalui kongres. Zuazo menjabat sebagai presiden Bolivia pada 10 Oktober 1982.[68]

Pada 1985, penurunan nilai ekonomi melanda Bolivia, dengan inflasi tertinggi di dunia dan mata uang Bolivia hampir tak bernilai. Inflasi terus meningkat dari 1982 sebesar 296%, 1984 sebesar 2.175%, dan pada 1985 mencapai lebih dari 8.168% (lihat grafik inflasi).[69]

Grafik Inflasi di Bolivia 1950-2000

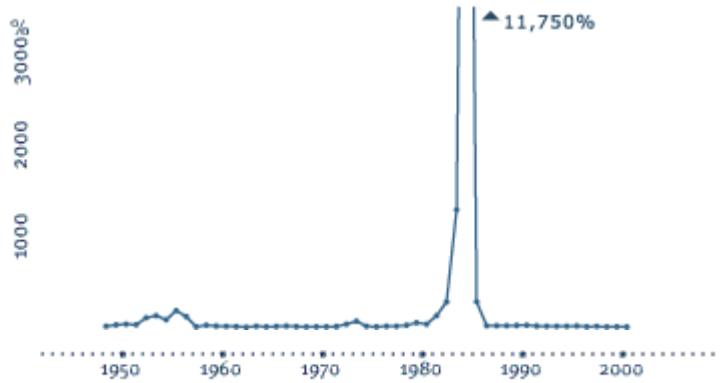

sumber: *http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/lo/countries/bo/bo_inf.html*

Sejatinya, sejak masa Estensorro (1985-1989) telah terjadi kerjasama dengan Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF).[70] Saat itu, Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Programme/SAP) dicanangkan untuk mengembalikan sekaligus menata ulang perekonomian Bolivia. Program tersebut diperkuat oleh Dekrit Presiden 21060 (*Decretos Supremos* – DSs 21060),[71] yang

[68] Jenderal David Padilla Arancibia (1978-1979) menjadi Presiden Bolivia setelah kudeta berdarah terhadap Jenderal Pereda. Arze menjadi presiden sementara pada 8 Agustus 1979. Pada November kembali terjadi kudeta di bawah pimpinan Kolonel Alberto Natusch Busch. Lidia Gueiler Tejada (1979-80) menjadi presiden sementara Bolivia berikutnya dengan dukungan AS. Tejada adalah Presiden wanita pertama Bolivia. Lihat Contry Studies: Bolivia, "Transition to Democracy", http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0033); Internet; diakses 24 Agustus 2008.

[69] Carlos F. Toranzo Roca, *Bolivia: Crisis, Structural Adjustment, and Democracy*, dalam Alex E. Fernandez Jilberto and Andre Mommen, *Liberalization in the Developing World: Institusional and Economic Changes in Latin America, Africa, and Asia* (New york: Routledge, 1996), hlm. 162-164.

[70] Bolivia, Polandia, dan Russia adalah negara-negara yang mendapatkan saran dari Jeffrey Sachs. Lihat wawancaranya dalam, http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitextlo/int_jeffreysachs.html; internet; diakses 19 Mei 2009

[71] DSs dipergunakan untuk melengkapi hukum yang ditinggalkan oleh lembaga legislatif. Dalam beberapa hal, lembaga eksekutif dapat menggunakan DSs untuk menggantikan peran legislatif. Lihat Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit,* hlm. 83.

diberi nama Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy* – NEP). Isi dan butir NEP adalah:

> Menghapuskan pembatasan impor dan ekspor (liberalisasi kebijakan impor dan ekspor), menetapkan tingkat perdagangan tunggal dan fleksibel, membekukan upah sektor publik selama empat bulan (kemudian dikurangi sampai tiga bulan), memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan negara satu bulan untuk mengemukakan program-program rasionalisasi (yaitu pemutusan hubungan kerja) staf, memperkenalkan "kontrak bebas" pada semua firma.[72]

Pada tahun 1987, dampak sosial NEP dirasakan kelas pekerja dan para petani.[73] Penghapusan pekerjaan, kontrol harga, dan penghapusan tunjangan-tunjangan menjadi awal dari resesi. SAP menyebabkan sebagian besar kredit dan investasi perdesaan tidak dinikmati petani kecil. Para petani kecil kekurangan modal, namun kesulitan menjamin kredit. Satu bank yang secara tradisional memberikan pinjaman kepada para petani kecil, Banco Agricola Boliviano, telah ditutup. Di bawah NEP, tingkat bunga rata-rata di atas 20% per tahun. Para petani sulit meminjam uang.[74]

Sektor pertanian telah mengalami krisis. Hal ini diperparah dengan masuknya barang-barang impor dan pencabutan subsidi bahan bakar minyak. Hasilnya, terjadi peningkatan kemiskinan. Bahkan, studi Dana Internasional bagi Pengembangan Pertanian menyatakan, 97% dari populasi perdesaan hidup di bawah garis kemiskinan.[75]

Pada masa pemerintahan Goni (1993-1997), Bolivia melanjutkan program NEP, yakni: kapitalisasi dan privatisasi sektor publik (umum). Selanjutnya, melalui Sistem Pengatur Sektoral *(Sistema Regulatorio Sectoral)* dan sistem pengaturan yang independen diberlakukan hubungan antara sektor swasta, konsumen, dan negara. Semua itu, bertumpu pada kekuatan investor asing.

Program privatisasi dibingkai dalam SIRESE (*Sistema de Regulacion Sectorial*), yang dijadikan undang-undang pada 1994. Undang-undang tersebut melegalisir sistem pengaturan (*superintendency*) sektor infrastruktur.[76] Sektor yang termasuk

---

[72] Diambil dari Tony Avirgan, Laura Parsons, dan Ross Harmond, *Membujuk untuk Memproduksi Obat Bius Ilegal: Pengalaman Bolivia,* dalam William I. Robinson et al., eds., *Hantu Neoliberalisme* (Jakarta: C-BOOKS, 2003), hlm. 125.

[73] Paul Mosley, "Microfinance and Poverty in Bolivia", Journal of Development Studies, April 2001 dalam http://www.tradewatch.org/documents/Bolivia_(PDF).PDF; Internet; diakses 24 Agustus 2008

[74] Tony Avirgan, Laura Parsons, dan Ross Harmond*, op. cit*, hlm. 128.

[75] The Development Group, "The World Bank, The IMF, and Illegal Drug Production: The Case of Bolivia", dalam http://www.developmentgap.org/americas/Bolivia/The_WorldBank_theIMF_and_Illegal_Drug_Production_The_Case_of_Bolivia.pdf; Internet; diakses 24 Agustus 2008.

[76] SIRESE dikelola secara independen, pengawasannya dilakukan selama lima tahun. Fungsinya: pengabulan atas hak, mengatur tarif, mempromosikan kompetisi, mengawasi perjanjian operator, memecahkan permasalahan di antara perusahaan, persetujuan, mendengar permohonan pihak pertama, dan menerima keluhan konsumen. Lihat Gover Barja, David McKenzie, dan Miguel Urquiola,

dalam *superintendency* di antaranya listrik, telekomunikasi, hidrokarbon, dan industri transportasi.

Di awal pemerintahan, Goni menerapkan kebijakan yang dikenal dengan nama "*the Plan de Todos*" (rencana untuk semua). Kebijakan yang diterapkan Goni merupakan 'penajaman' NEP. Isi program ini adalah pembentukan hubungan negara dan masyarakat melalui privatisasi perusahaan negara, desentralisasi administrasi dan fiskal, "reformasi agraria" kedua, reformasi pendidikan. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan iklim kapitalisasi yang dapat menghasilkan dana untuk merestrukturisasi ekonomi dan memberikan pelayanan sosial. Goni, juga merevisi undang-undang kewarganegaraan (*Law of Popular Participation* – LPP), pada 1994.

Dengan LPP, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan ekonomi, sosial, maupun politik. Melalui LPP, organisasi-organisasi di tingkat akar rumput mulai diakui. Untuk pertama kalinya, pemerintah Bolivia mengakui organisasi-organisasi massa di tingkat akar rumput seperti organisasi warga urban, serikat-serikat petani *campesino* dan organisasi komunitas asli Indian.[77] Untuk menyukseskan LPP, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar 20% dari anggaran nasional.[78] Selain itu, pemerintah pun memberikan hak politik kepada organisasi-organisasi untuk menjadi bagian dari *Organizacaiones Teritoriales de Base* – OTB.

Dalam implementasinya, LPP melahirkan permasalahan, terutama mengenai keterwakilan legitimatif organisasi dalam OTB. Konfederasi buruh dan petani Bolivia (*Confederacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia* – CSTUCB) mengkritik LPP sebagai 'desentralisasi kemiskinan' dan pelepasan tanggungjawab pemerintah.[79]

Pada 1996, Goni membentuk kebijakan "reformasi agraria" (*the National Agrarian Reform Institute* – INRA). Kebijakan ini ditujukan untuk para *campesino* dan para penduduk asli pemilik tanah. INRA gagal diterapkan. Karena, kebijakan tersebut tidak memiliki perencanaan yang matang.[80] INRA menuai banyak protes kalangan petani. Alih-alih memberikan kepemilikan tanah kepada para petani kecil, justru memberikan hak kepemilikan tanah kepada para tuan tanah. Program 'reformasi agraria' semakin meningkatkan konsentrasi kepemilikan tanah kepada segelintir individu.[81] INRA mendatangkan kesulitan-kesulitan bagi masyarakat lokal, karena menghilangkan akses sumberdaya masyarakat. Akibat INRA, muncul praktik

---

"Capitalization and Privatization in Bolivia: An Approximation and to an Evaluation"; http://www.mpd-ucb.edu.bo/publicaciones/WP_007_Capitalization%20and%20privatization%20in%20Bolivia%20an%20approximation%20to%20an%20evaluation.pdf; internet; diakses 24 Agustus 2008.

[77] *Ibid,* hlm. 94.

[78] George Gray Molina, "Popular Participation, Social Service Delivery, and Poverty Reduction 1994-2000"; http://www.adb.org/Documents/Events/2002/Citizen_participation/Bolivia.pdf; internet; diakses 24 Agustus 2008.

[79] *Ibid,* hlm. 133.

[80] Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit,* hlm. 92.

[81] *Ibid,* hlm. 93.

penjualan tanah tanpa persetujuan penggarap lahan. Tanah kehilangan nilai sosialnya, karena menjadi komoditas baru.

Privatisasi perusahaan negara (*state-owned enterprises* – SOEs) menjadi salah satu agenda kebijakan pemerintahan Goni. Lima perusahaan negara menjadi bagian dari proses kebijakan privatisasi sebesar 50 persen. Hal ini dilakukan untuk menarik minat investor asing, meningkatkan persaingan di lingkungan global, menggenjot pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ribuan lapangan kerja.[82]

Sejatinya, privatisasi bukan kebijakan baru. Privatisasi mengacu pada tiga perubahan besar, di antaranya perubahan kepemilikan, perubahan organisasi, dan perubahan pengelolaan.[83] Privatisasi merupakan perangkat efektif untuk memperbesar akses pasar perusahaan multinasional atau asing (transnational corporations – TNCs).[84]

Di masa Goni, tingkat pertumbuhan ekonomi Bolivia mencapai lebih dari 4%. Bolivia melakukan sejumlah perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko dan menjadi anggota organisasi ekonomi regional Mercosur. Goni berkeyakinan, kebijakan menarik minat investor internasional akan meningkatkan potensi pendapatan pajak, yang secara tidak langsung dapat menggantikan biaya atau pendapatan yang hilang dari penjualan perusahaan negara.

Tabel 2 Penjualan Perusahaan Negara (Privatisasi) di Bawah Kepemimpinan Goni (1993-1997)

Sektor	Perusahaan	Tgl Pelepasan	Pemegang Saham Pokok	Negara Asal	Penawaran 50% saham perusahaan (US $ Jutaan)
Hidrokarbon (YPFB)	Petrolera Chaco Transredes Empresa Petrolera Andina	April '97 April '97 April '97	Amoco Enron, Shell YPF,Perez, Pluspetrol	AS AS, Belanda Argentina Spanyol	306.7 263.5 264.8
Telekomunikasi	ENTEL	November '95	STET	Italia	610.0
Transportasi	LAB (penerbangan) ENFE (kereta api) Andina Oriental	October '95 Maret '96 Maret '96	VASP Cruz Blanca Cruz Blanca	Brasil Chili Chili	47.5 13.2 25.9
Listrik	Corani Guaracachi Hermoso	Juli '95 Juli '95 Juli '95	Dominion Energy Energy Initiatives Constellation Energy	AS AS AS	33.0 35.0 30.0

Sumber: Diambil dari Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and popular Resistance*, (London: Zed Books, 2005), 110

[82] Goni berkeyakinan, pajak pendapatan dari perusahaan asing akan dapat menutupi penghasilan perusahaan sebelum diprivatisasi (SOEs). *Ibid,* hlm. 103-104.

[83] V. V. Ramanadhan, *Constraints and Impact of Privatization* (London: Routledge, 1993), hlm. 2.

[84] Bon Databank and Research Center, *op. cit,* hlm.2.

Lima perusahaan negara yang telah diprivatisasi, yakni sektor telekomunikasi, transportasi, listrik, perusahaan minyak dan gas negara (*Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos* – YPFB), menaikan pamor perusahaan tersebut di tingkat Internasional.[85] Organisasi minyak internasional OPEC (*Organization Petroleum Exporties Countries*) menilai Bolivia memiliki peran penting dalam menunjang pendapatan negara untuk mendukung pembangunan sektor ekonomi.

A. Rejim Neoliberalis: Penataan Tanaman Koka?

Koka adalah tanaman berdaun rimbun, yang berasal dari sisi timur Pegunungan Andes. Daunnya dapat digunakan sebagai bahan baku kokain. Secara tradisional, masyarakat Bolivia menggunakan sebagai bahan tambahan masakan atau dikunyah untuk menahan rasa sakit dan lapar, obat-obatan dan juga untuk kebutuhan sehari-hari lainnya.[86] Koka telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Bolivia. Tanaman *Erythroxylon coca* itu banyak ditanam di Bolivia, Peru, dan Ekuador.[87] Di Bolivia, koka dikembangkan di perbukitan Yungas dan Chapare.

Antara 1978 sampai dengan 1985, penanaman daun koka meningkat dari 12.000 hektar sampai dengan 80.000 hektar. Peningkatan ini dapat dialokasikan sebagai hasil produksi yang cepat dari 35.000 metrik ton sampai dengan 150.000 metrik ton. Penghasilan yang didapat koka US$ 6.000 sampai dengan US$ 9.000 per hektar per tahun.[88]

Peningkatan produksi koka terus berlanjut memasuki pertengahan 1980 sampai dengan 1997. Produksi koka mencapai US$ 500 juta per tahun atau sekitar 5 sampai 8 persen dari GDP, melebihi produksi pertanian lainnya.[89] Pada 1989, Amerika Serikat (AS) menyatakan perang terhadap narkotik dan obat-obatan terlarang yang dikenal dengan *War on Drugs*.[90] Kebijakan AS juga ditujukan dalam rangka menguatkan dan menciptakan iklim perekonomian yang sehat bagi kedua negara (AS-Bolivia). [91] Petani koka terkena imbasnya.

---

[85] Pemisahan tiga perusahaan YPFB adalah Petrolera Chaco kepada Amoco-AS, Transredes ke Enron-AS dan Shell-Belanda, dan Empresa Petrolera Andina ke YPF Perez-Argentina dan Pluspetrol-Spanyol. Semuanya dilepas pada 1997. Lihat. Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit,* hlm. 110.

[86] Lihat Belen Boville, *The Cocaine War in Context: Drugs and Politics* (New York: Algora Publishing, 2004), hlm. 72-73

[87] http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0312/19/Jendela/755332.htm; Internet; diakses 24 Agustus 2008

[88] Jumlah tersebut mencapai sepuluh kali keuntungan produksi jeruk. Kevin Healy, "Bolivia and Cocaine: a Developing Country's Dillemas", http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119465363/PDFSTART; Internet; diakses 24 Agustus 2008.

[89] Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit,* hlm. 74.

[90] Selain Bolivia, Peru dan Kolombia merupakan dua negara penghasil daun koka dan kokain. Ketiga negara ini menjadi fokus pemerangan peredaran obat-obatan terlarang.

[91] Kampanye Anti-Terorisme George Bush menjadi salah satu cara untuk mengatasi krisis kapitalisme global. Nurani Soyomukti, *Revolusi Sandinista: Perjuangan Tanpa Akhir Melawan Neoliberalisme* (Yogyakarta: GARASI, 2008), hlm. 152.

Hugo Banzer Presiden Bolivia 1997, mengeluarkan kebijakan pengembangan alternatif tanaman dan pembasmian koka (*anti-drugs*), yang dikenal dengan *coca zero*. Pembasmian ladang koka kembali dikuatkan dengan undang-undang *law anti-drug* 1008.[92] Berbagai aksi penangkapan, pembunuhan dan penghancuran ladang koka oleh pemerintah Bolivia mendapatkan dukungan AS. Para petani koka semakin tersisihkan akibat hilangnya sumber produksi.[93]

Produksi koka dan peredaran obat bius (kokain), yang sampai ke kawasan Amerika Bagian Utara mengancam posisi AS dalam mengendalikan perdagangan bebas.[94] Prakarsa perdagangan bebas dibentuk pemerintah AS dalam: NAFTA[95] (*North American Free Trade Agreement*) untuk AS, Kanada, dan Meksiko; Mercosur untuk Amerika Selatan (termasuk Bolivia); serta APEC (*Asia Pacific Exportiers Countries*) untuk wilayah Asia Pasifik.

Banzer melanjutkan pembasmian ladang koka (*coca zero*). Sementara itu, program privatisasi terus berlanjut. Pada 1999, undang-undang tentang air *Water Law* 2029 dikeluarkan.[96] Hasilnya, pemerintah menjual perusahaan air negara chocabamba (SEMAPA) kepada Aguas del Tunari (Tunari Waters), pada September 1999, selama 40 tahun. Penjualan SEMAPA menambah panjang daftar perusahaan negara yang telah diprivatisasi.[97]

Menurut World Bank, pengelolaan air oleh negara menyebabkan buruknya kualitas dan rendahnya penetrasi sistem pengelolaan air di seluruh dunia. Hanya dengan mengurangi peran pemerintah, akan terjadi alokasi sumberdaya, mengusahakan pelayanan yang lebih murah dan berkualitas, serta membuka kesempatan bagi keterlibatan pihak swasta.[98]

---

[92] Setelah terpilih menjadi Presiden Bolivia melalui pemilu 1997, pada 2000, Banzer digantikan oleh Jorge Fernando Quiroga, yang sebelumnya sebagai wakil presiden. Lihat "Bolivia", dalam DVD-ROM Microsoft ® Encarta ® Encyclopedia 2008.

[93] Berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi di Bolivia; penangkapan disertai pembunuhan para petani koka.

[94] Di dalam IMF, AS memiliki kekuasaan mayoritas. Hak voting AS mencapai 17,8 %, negara anggota lain tidak lebih dari 6 %. Noer Fauzi, *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Insist Press, 2005), hlm. 157-160.

[95] Bertepatan dengan diluncurkannya NAFTA, pemberontakkan Zapatista di Chiapas muncul. Sebagian akademisi menilai bahwa gerakan Zapatista telah mengilhami gerakan antiglobalisasi sedunia. Zapatista diambil dari nama tokoh revolusi Meksiko, Emiliano Zapata (1910-1920). Lihat Subcomandante Marcos*, Kata Adalah Senjata* (Yogyakarta: Resist Book, 2005)

[96] Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit,* hlm. 162.

[97] Pemegang saham utama perusahaan adalah Lyonnaise Des Eaux dengan jumlah 35%. Lihat "Gover Barja, David McKenzie, dan Miguel Urquiola", *loc. cit;* lihat juga Public Citizens, "Water Privatization Case Study: Chocabamba, Bolivia"; http://www.tradewatch.org/documents/Bolivia_(PDF).PDF; Internet; 24 Agustus 2008.

[98] World Bank, *The State in a Changing World: World Development Report* (Oxford: Oxford University Press, 1997), hlm.61-62.

B. Respon Gerakan Sosial Pasca-Kebijakan Ekonomi Baru

Gerakan sosial terbentuk dari pertemuan berbagai perlawanan dan protes sosial atas kebijakan ekonomi politik Pemerintah Bolivia yang menganut strategi neoliberalisme. Penting untuk melacak kembali bagaimana reaksi terhadap berbagai kebijakan rejim neoliberal berpengaruh terhadap pembentukan gagasan politik yang menjadi hegemoni tandingan dan juga terbentuknya formasi blok politik persatuan gerakan sosial.

Semenjak 1980an, petani koka diharuskan mengganti hasil panennya dengan tanaman alternatif. Pada 1997, meskipun program antikokain berlangsung, tapi peredaran kokain dan arus perdagangannya semakin meningkat. Selain itu, aksi penolakan dan perlawanan terhadap pembasmian koka dilakukan oleh para petani koka yang bermukim di daerah Chapare Chocabamba, yang merupakan lahan subur tumbuhnya koka.[99]

Pada masa Banzer, pemusnahan ladang koka menggunakan kekuatan militer. Salah satu daerah yang menjadi daerah operasi adalah Yungas bagian timur La Paz.[100] Amerika Serikat sebagai negara pengusung pembasmian koka berupaya menggantikan pertumbuhan koka dengan tanaman lain. Negara itu menggelontorkan dana sebesar US$ 2 miliar untuk memberantas produksi dan peredaran kokain, serta insentif untuk para petani yang bersedia menanam pertanian ekspor nontradisional, seperti lada, nenas, dan kacang.[101]

Kebijakan penataan koka dan peralihan produksi sebenarnya bukan kebijakan yang adil bagi masyarakat. Produksi pertanian nontradisional mendatangkan masalah seperti tiadanya pasar dan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli pembasmi hama pestisida dan herbisida. Salah satu petani koka bernama Zurita menambahkan;

> "Kebijakan pembasmian koka (illegal) telah membuat hancur lima belas rumah cocaleros. Kebijakan pengembangan alternatif tidak menghasilkan perubahan bagi kehidupan petani koka, tidak ada pasar untuk hasil dari pengembangan alternatif ini. Kebijakan pengembangan alternatif merugikan petani Bolivia."[102]

---

[99] Chapare merupakan daerah yang subur untuk ladang koka. Para petani koka bukan hanya dari daerah Chapare asli, daerah pedesaan Cochabamba dengan suku Quechuas, Aymara dari daerah *altiplano,* yang tadinya pekerja tambang, penduduk lokal, serta penduduk miskin perkotaan berbondong-bondong menjadi petani dan pedagang koka di Chapare.

[100] Yungas Timur merupakan salah satu daerah yang dilegalkan pemerintah untuk produksi koka sebagai kebutuhan sehari-hari dan pengobatan. Lihat Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit*, 151

[101] Tony Avirgan, Laura Parsons, dan Ross Harmond*, op. cit*, hlm. 132.

[102] Yasmin Khan, "The War of Cocaleros Has Brought Bolivia Nothing But Poverty and death: The Story of Leonilda Zurita Vargas", dalam http://www.narconews.com/Issue34/article1031.html; intenet; diakses 24 Agustus 2008

Akibatnya, pengangguran dan kemiskinan melanda penduduk dan petani koka Bolivia. Salah seorang petani mengatakan;

> "Koka merupakan satu-satunya alternatif bagi saya. Saya tak bisa menjual pisang ke pasar, biarpun saya bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Bagaimana lagi saya bisa memberi nafkah keluarga saya?"[103]

Salah satu pemimpin kaum tani Bolivia, Valentin Gutierrez menambahkan bahwa kalimat 'pengembangan alternatif' sudah menjadi makna yang sangat negatif. Bukannya memberikan alat-alat atau bantuan teknis untuk meningkatkan produksi pertanian tradisional, malah mendesak ekspor hasil-hasil pertanian.[104] Akibatnya, perlawanan para petani dan pedagang koka menjadi tidak dapat dihindarkan.

> Demonstrasi para pedagang dan petani koka khususnya di Chapare tidak dapat dihindarkan lagi. Kesatuan aparat polisi dan tentara dikerahkan pemerintah di daerah yang merupakan pertumbuhan terbesar produksi koka.[105]

Peningkatan jumlah produksi koka disumbang pula oleh korban pemutusan hubungan kerja di perusahaan-perusahaan yang telah diprivatisasi. Privatisasi air di Cochabamba, pembasmian dan pelarangan koka telah memaksa penduduk untuk melakukan perlawanan. Tepatnya di Chapare federasi persatuan para guru di perdesaan dan perkotaan melakukan aksi penolakan undang-undang penghapusan tanaman koka.

Komunitas petani di Chapare, menyadari bahwa untuk melawan kebijakan yang ingin menghentikan peredaran koka maka mereka harus bersatu di dalam bentuk konfederasi pekerja yang dapat mereka gunakan sebagai kelompok yang kuat. Sekitar 1960-1970-an tercatat enam federasi petani koka yang dibentuk. Sekitar 1980-an penambahan petani koka diperkuat dengan bergabungnya mantan pekerja tambang yang tergusur akibat privatisasi. Memasuki 1990-an, gerakan petani koka telah menyadari perlunya mereka untuk berperan secara politik.[106]

---

[103] Tony Avirgan, Laura Parsons, dan Ross Harmond*, op. cit*, hlm. 131.
[104] I*bid*, hlm. 133.
[105] Belen Boville, *op. cit,* hlm. 73
[106] Leonardus Satrio Wicaksono, "Pengaruh Politisasi Gerakan Sosial terhadap Kultur Demokrasi: Analisis Komparatif terhadap Gerakan MBR-200 di Venezuela dan Gerakan MAS di Bolivia," (Skripsi Sarjana Reguler Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2007), hlm. 87-88

Bagan 1 Proses Pembentukkan LPP

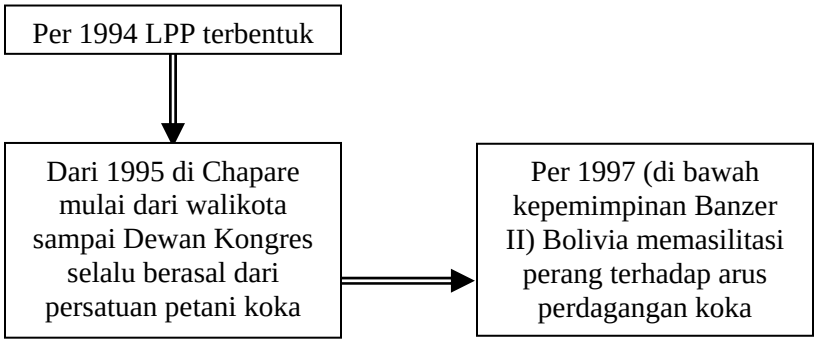
Per 1994 LPP terbentuk
Dari 1995 di Chapare mulai dari walikota sampai Dewan Kongres selalu berasal dari persatuan petani koka
Per 1997 (di bawah kepemimpinan Banzer II) Bolivia memasilitasi perang terhadap arus perdagangan koka

Dari bagan di atas, ketika LPP dibentuk pada 1994 posisi petani koka cukup kuat. Bahkan, organisasi petani koka dapat berpartisipasi di tingkat daerah (walikota). Mulai 1995, serikat petani dan pedagang koka telah menjadi lembaga formal dan bagian OTB. Pemilihan di Chapare, pada 1995, posisi walikota sampai anggota dewan kongres diisi oleh federasi atau organisasi petani koka.[107]

Perlawanan petani dan pedagang koka melalui *cocaleros* dan *campesino* menjadi semakin kuat dengan terbentuknya federasi. Pada situasi tersebut, MAS sebagai alat politik Morales, berhasil mengakomodir kepentingan para petani dan pedagang koka. Di bawah pemerintahan Banzer yang kedua, popularitas Morales dan MAS semakin besar.

Setelah Banzer memasilitasi AS dalam pembasmian koka, berikutnya adalah privatisasi perusahaan air SEMAPA. Privatisasi air telah menyebabkan permasalahan yang cukup besar. Dari sisi sosial, terjadi kesenjangan dan kesejahteraan rakyat; menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi, kurangnya lapangan kerja[108] dan peningkatan harga melebihi batas yang tidak dapat ditolerir lagi. Berdasarkan data, sebesar 35% tarif air mengalami peningkatan mencapai $ 20.[109]

Banyak penduduk hanya mendapatkan akses air sekitar dua jam sehari. Rakyat harus menggunakan ember untuk mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari. Sebagai contoh, seorang pensiunan guru yang berpenghasilan $80 dalam sebulan, membayar tagihan air yang awalnya hanya membayar $5, setelah privatisasi mencapai $25.[110]

---

[107] Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit,* 157

[108] Sebagai contoh, perusahaan penerbangan LAB Bolivia yang dijual kepada VASP, membuka lapangan kerja baru secara besar di Seattle (AS). Lihat *Ibid,* hlm. 112.

[109] Evo Morales, "From Coca to Congress", dalam http://www.zmag.org/znet/viewArticle/11408; internet; diakses 21 Mei 2009.

[110] Multinational Monitor, "The Fight for Water and Democracy: An Interview With Oscar Oliviera", dalam http://multinationalmonitor.org/mm2000/00june/interview.html; internet; diakses 21 Mei 2009

Dalam pengalaman gerakan sosial terdapat satu unsur yang unik dan nyaris tidak terdapat di negara lain, yaitu bergabungnya petani tanaman koka yang dilarang dan diperangi karena sifatnya yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan obat bius. Dalam pengalaman Bolivia pertemuan gerakan sosial yang memiliki tujuan antineoliberalisme dan berperan penting bagi perjuangan di ranah politik.

Peningkatan tarif air, menurut Bank Dunia, pengelolaan air harus dilakukan dengan membayar *full cost recovery.*[111] Privatisasi air beriringan dengan krisis air. Di Cochabamba, krisis air berwujud hilangnya akses air bersih.[112]

Penjualan perusahaan air negara (SEMAPA) kepada pihak Aguas del Tunari telah mendatangkan reaksi rakyat Bolivia. Aguas del Tunari memiliki hak penuh untuk mendistribusikan sistem pengairan di Cochabamba, termasuk pengambilalihan sumur milik warga pedesaan. Air telah menjadi barang yang sangat langka, khususnya yang berada di daerah perbatasan.[113]

Sebelum SEMAPA diprivatisasi, rakyat telah melakukan protes menolak penjualan perusahaan negara. Pada 1997, dalam usaha melindungi hak rakyat akan air bersih serta mengantisipasi penjualan SEMAPA, terbentuk komite yang diberi nama CODAEC (*Comite para la Defensa del Agua y la Economia Familiar*). Komite terdiri atas FEDECOR (*Federation of Irrigation's Association from the Department of Cochabamba*), berbagai macam komite air kota dan persatuan delegasi peduli lingkungan (el Pueblo en Marcha – PUMA).[114]

Pada 1999, setelah SEMAPA diprivatisasi, rakyat yang mengelola air bersih secara mandiri, bersama CODAEC melakukan demonstrasi di sekitar Cochabamba. Mereka menolak privatisasi air yang dilegitimasi dengan undang-undang *Water Law* 2029.[115] Pada 2000, terbentuk Komite Koordinasi (Coordinadora de Defensa del agua y de la Vida – Coordinadora). Platform yang disepakati adalah "air untuk kehidupan".

Bagi pemerintah, Coordinadora adalah organisasi ilegal. Meski demikian, pemerintah terpaksa mengakui kehadiran Coordinadora dan bersedia bernegosiasi dengan kelompok tersebut.[116]

Coordinadora memberikan referensi dan menjadi bagian penting dari perkembangan organisasi sosial yang melakukan penguatan masyarakat dan

---

[111] *Full cost recovery,* berarti pengguna air akan dibebani biaya sistem pengelolaan air, biaya operasional, pemeliharaan, dan pengeluaran modal.

[112] "Gover Barja, David McKenzie, dan Miguel Urquiola", *loc.cit.*

[113] Cochabamba dikenal dengan *zona sur* (daerah selatan) dengan sumber ekonomi sangat minim. Cochabamba mengelola air secara mandiri. *Ibid*

[114] Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit,* hlm. 163.

[115] *Ibid*, hlm. 164.

[116] Rieza Rahadian, *Interaksi Negara dengan Organisasi Internasional dan Perusahaan Multinasional dalam Privatisasi Air Cochabamba Tahun 1999-2000 dan Implikasinya bagi Masyarakat Sipil*. Skripsi Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. 2005.

melawan rejim privatisasi. Coordinadora terbentuk dari bermacam koalisi yang menghargai perbedaan gender dan ras. Salah satunya terlihat dari peran para wanita yang tergabung dalam aksi perlawanan dan demonstrasi. Di samping itu, petani lokal (yang di antaranya para petani koka), para pemimpin dari suku Mestizo, dan "golongan kulit putih" yang berasal dari profesional perkotaan mengambil bagian dari proses perlawanan.[117] Dalam koalisi tersebut, Evo Morales merupakan perwakilan pimpinan dari kaum tani *cocaleros* dan *campesino*.[118]

Fredy Villagomez mengatakan, "Para pria tertuju pada pusat kota, mencoba untuk mempertahankan plaza. Yang lain mencoba membentuk barikade di jalan. Banyak para Campesino dan Cocaleros mengambil bagian dalam aksi ini dengan berjalan menuju Cochabamba. Para wanita dengan memakai topi jerami dan lipatan beludru yang terang dengan rambut hitamnya yang dikuncir ikut ambil bagian dalam aksi."[119]

Coordinadora merupakan suatu struktur mobilisasi. Struktur Mobilisasi adalah cara gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif: pilihan taktik gerakan, bentuk organisasi, dan "pengisian" posisi-posisi strategis dalam masyarakat.[120] Dengan kata lain, Struktur Mobilisasi merupakan kendaraan kolektif dalam memobilisasi masyarakat.

Struktur Mobilisasi masuk ke posisi-posisi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, unit-unit keluarga, jaringan pertemanan, asosiasi tenaga sukarela, unit-unit tempat bekerja, dan elemen-elemen negara menjadi lokasi-lokasi struktur mobilisasi mikro. Memperjelas definisi struktur mobilisasi, McCarthy mengungkapkan dua kategori, yaitu struktur formal dan informal.[121] Struktur informal berwujud jaringan kekerabatan dan persaudaraan, yang menjadi dasar rekruitmen anggota. Sementara struktur informal menjadi kontributor penting munculnya gerakan-gerakan lokal. Lebih jauh, McAdam menambahkan bahwa hubungan formal dan informal di antara masyarakat dapat menjadi sumber solidaritas dan memfasilitasi gerakan itu berkembang

Per Februari, lebih dari 50.000 rakyat berpartisipasi dalam aksi protes. Akibatnya, kegiatan kota lumpuh selama lebih dari 24 jam. Walaupun aksi dilakukan secara damai, pemerintah dengan bantuan aparat kepolisian menanggapinya dengan kekerasan. Ratusan orang terluka. Meskipun demikian, Coordinadora berhasil mendesakkan beberapa kesepakatan, di antaranya pemerintah diharuskan mengembalikan tarif air pada level semula dalam jangka dua bulan.[122]

---

[117] Susan Spronk, "Roots of Resistance to Urban Water Privatization in Bolivia: The New Working Class, The Crisis of Neoliberalism, and Public Services", dalam http://www.socialsciences.cornell.edu/0609/ILWCH.pdf; internet; diakses 24 Agustus 2008

[118] "Evo Morales", *loc. cit*

[119] William Finnegan, "Leasing the Rain", dalam http://www.waterobservatory.org/library.cfm?refID=33711; internet; diakses 21 Mei 2009

[120] Abdul Wahib Situmorang*, op. cit,* hlm. 7.

[121] *Ibid*, hlm. 8.

[122] "Susan Spronk", *loc. cit*

Setelah dua bulan, pemerintah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Aksi gerakan sosial tidak terhindarkan. Seketika, demonstrasi rakyat membesar. Lebih dari 100.000 ribu rakyat memadati jalan di Cochabamba. Aksi tersebut dikoordinasikan oleh Coordinadora. Menanggapi aksi tersebut, Presiden Banzer mengumumkan "negara dalam keadaan perang".[123]

Tekanan rakyat yang semakin membesar memaksa Banzer mengikuti tuntutan rakyat. Pemerintah bersedia berunding dengan Coordinadora. Pertemuan tersebut mencapai kesepakatan untuk membatalkan kerjasama dengan perusahaan Aguas del Tunari. Pada 11 April, pemerintah mengeluarkan keputusan undang-undang *Water Law* (2066) mengenai hak rakyat untuk mendapatkan air.

Kasus di Cochabamba telah meninspirasi perlawanan di daerah perkotaan El Alto, pada 2005. Kontrol perusahaan air negara oleh Perancis, Aguas del Illimani, pada 1997, mendapatkan protes keras masyarakat. El Alto merupakan daerah berpenduduk miskin di Bolivia. Penduduk El Alto melalui FEJUVE (*the Federation of Neighborhood Councils of El Alto*) melakukan aksi mobilisasi rakyat. FEJUVE dari 500 organisasi akar rumput yang berada pada tingkatan terendah basis rakyat (akar rumput).[124] FEJUVE dipimpin oleh Abel Mamani juga menentang privatisasi hidrokarbon.

Perlawanan rakyat kembali terjadi mempertanyakan privatisasi hidrokarbon, pada masa pemerintahan Goni 1993-1997 dan 2002-2003.

Sebelum dilakukan privatisasi, seluruh kegiatan industri hidrokarbon berada dalam kontrol dan pengawasan negara, YPFB. Dengan privatisasi, undang-undang hidrokarbon diperkenalkan. Undang-undang tersebut menegaskan prioritas utama kegiatan YPFB adalah mempromosikan ekspor ke bagian selatan Brasil, melakukan eksplorasi dan pembangunan infrastruktur serta membangun saluran pipa menuju Brasil. Kegiatan yang dilakukan merupakan usaha meningkatkan cadangan gas alam dan investasi.[125]

Kegiatan eksplorasi cadangan minyak di Bolivia telah mengalami peningkatan, dari 5,7 triliun kubik pada 1997 menjadi 52,3 triliun kubik pada 2002. Karena itu, Bolivia menempati posisi terdepan di Amerika Latin dalam hal perolehan cadangan gas alam.[126]

Pada 2002, Goni mengeluarkan kebijakan penjualan industri gas di daerah Tarija.[127] Usaha eksplorasi gas di Bolivia sudah direncanakan sejak Presiden Jorge Queroga, pada 2002, di mana telah dibentuk sebuah konsorsium pertambangan yang disebut Pasific LNG dengan anggota Repsol YPF, British Gas, dan Pan American Energy. Konsorsium sepakat melakukan eksplorasi di daerah Tarija dan mengirimkan hasilnya untuk diperdagangkan di pasar Meksiko dan California (AS). Konsorsium

[123] Setelah kesepakatan dibatalkan, rakyat kembali melakukan aksi protes. Lebih dari ratusan orang terluka. Oscar Olivera Pimpinan Coordinadora ditahan kepolisian. *Ibid.*

[124] *Ibid.*

[125] "Gover Barja, David McKenzie, dan Miguel Urquiola", *loc. cit*

[126] *Ibid*

[127] Bolivia adalah salah satu negara dengan cadangan gas minyak bumi terbesar kedua di Amerika Latin setelah Venezuela.

setuju melakukan kerjasama dengan perusahaan Sempra Energy untuk kegiatan pendistribusian gas Bolivia di pasar Amerika Latin. Negosiasi eksplorasi gas menyetujui pengiriman gas melalui pipa yang dibangun melewati daerah Chili. Privatisasi gas mendapatkan penolakan.

Gerakan sosial semakin mengarah ke penolakan privatisasi perusahaan air negara (SEMAPA). Pada saat itu telah terbentuk sebuah badan koordinasi perlindungan gas (National Coordinator for the Defence and Recovery of Gas – NCDRG), yang berfungsi melakukan koordinasi penolakan privatisasi gas. NCDRG melakukan aksi mobilisasi massa, 50.000 orang melakukan aksi protes di daerah distrik La Paz dan 20.000 orang di daerah Chocacamba. NCDRG dan MAS bersama penduduk asli terutama suku Aymara dan Chequa melakukan aksi menentang privatisasi gas.[128]

Juli 2002, dua puluh satu organisasi tergabung dalam NCDRG yang dipimpin oleh Morales dan Filemon Escobar (Senator terpilih MAS). Di dalam organisasi tersebut terdapat para pemimpin militer, massa antiglobalisasi, para aktivis, *Juntas Vecinales*, pensiunan tahunan dan veteran, *union representatives*, *campesino* yang berada di dataran tinggi, dan penanam koka.[129] Aksi-aksi protes semakin masif. Salah satu organisasi yang lantang menentang kebijakan pemerintah adalah Konfederasi Serikat Buruh *Campesino* Bolivia (Confederacion Sindical Unica de Trabajadores – CSUTCB). Agenda perjuangan CSUTCB adalah melawan neoliberalisme dan reforma agraria.

Felipe Quispe sebagai pimpinan CSTUCB menyerukan untuk melakukan aksi mobilisasi massa secara nasional. Suku Aymara yang mendiami *altiplano*[130] di sekitar La Paz dan petani penghasil koka di Chapare melancarkan aksi demonstrasi. Evo Morales memimpin aksi pemblokiran jalan. Aksi demonstrasi diwarnai aksi kekerasan dan penghancuran sarana umum.[131]

Masifikasi aksi protes memaksa Goni turun dari jabatan kepresidenan dengan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden Carlos Mesa. Mesa menjanjikan referendum untuk menangani isu gas Bolivia.

Berbagai elemen organisasi seperti COR (Confederacion de Obreros Regionales), FEJUVE, UPEA (El Alto Public University), COB, CSTUCB, dan NCDRG, mempertanyakan referendum yang telah disepakati Mesa. Berbagai organisasi dan lapisan masyarakat tersebut menuntut nasionalisasi. Menurut pemimpin dari gerakan sosial, referendum dari Mesa hanya untuk membentuk popularitas Mesa.[132]

Pada 18 Juli 2004, Mesa mencantumkan nasionalisasi pada daftar referendum kongres Bolivia. Berdasarkan referendum tersebut, kongres Bolivia memberlakukan pajak tambahan sebesar 32% serta royalti sebesar 18%, yang harus dibayar oleh

---

[128] Benjamin Kohl dan Linda Farthing, *op. cit,* hlm. 173.

[129] *Ibid,* hlm. 173-174.

[130] *Altiplano* adalah dataran tinggi yang membelah pegunungan Andean, dan memiliki ketinggian lebih dari 3.600 meter (11.880 kaki) berada diatas permukaan laut. *Ibid,* hlm. 58.

[131] *Ibid,* hlm. 167.

[132] Forrest Hylton, "The Ghost of Gonismo: Popular Participation in Bolivia's Gas Referendum", dalamhttp://www.counterpunch.org/hylton07202004.html; internet; diakses 19 Mei 2009.

perusahaan asing. Setelah peraturan itu disepakati, Mesa gagal menjalankan kebijakannya. Mesa mengundurkan diri pada juni 2005.[133]

4. GERAKAN SOSIAL MENENTANG PRIVATISASI AIR DAN HIDROKARBON SERTA PEMBASMIAN KOKA DI BOLIVIA (1985-2006)

Pembatalan kebijakan privatisasi air dimungkinkan oleh *framing* situasi yang diterjemahkan ke dalam program perjuangan. *Framing* menjadi wacana gerakan sosial dan berhasil menjatuhkan kekuatan yang telah mapan. *Framing* di sini dimaksudkan sebagai titik acuan/fokus suatu masalah. Di sini, *framing* menjadi istilah mengenai sejauh mana pelaku perubahan memiliki komitmen dalam memengaruhi dan meyakinkan publik, yang notabene memiliki keragaman dan perbedaan karakter.

Mekanisme proses *framing* digunakan sebagai salah satu acuan yang digunakan akademisi gerakan sosial. Proses *framing* digunakan dalam memahami sukses dan gagalnya gerakan sosial.[134] Dalam hal ini para pelaku perubahan dituntut sampai sejauh mana mereka mempunyai komitmen yang tinggi dalam mempengaruhi publik, tugas yang sangat penting dilakukan pelaku perubahan dalam mencapai sasaran dan tujuan perjuangannya, untuk meyakinkan publik yang notabene memiliki keragaman dan perbedaan karakter dari masing-masing kelompok.

Zald, lebih lanjut, mengidentifikasikan yang tidak hanya berhubungan dengan proses *framing* tetapi juga memainkan peranan penting dalam membentuk *framing.*[135] Contoh nyata pembentukan *framing* adalah ketidakadilan yang terus-menerus, sehingga aksi kolektif mungkin terjadi. Dalam menjalankan mekanisme *framing* alat yang digunakan aktor gerakan adalah media. Peran media menjadi sangat penting dalam mengomunikasikan *framing* gerakan.[136]

Framing "air sebagai sumber kehidupan" dapat menarik kekuatan massa dan menyatukan berbagai kepentingan; pekerja tambang, pekerja di perkotaan, buruh pabrik ataupun kaum tani. Isu yang dikedepankan bukan "worker's issues", tetapi berhubungan dengan kondisi kehidupan "neighborhood issues". Dalam hal ini, Susan Spronk menyebutnya sebagai kelas pekerja baru "new working class".[137]

Coordinadora bukan hanya mengorganisir buruh dan serikat buruh. Apa yang disebutkan McCarthy sebagai struktur informal tecermin dalam Coordinadora.

---

[133] Pengunduran Mesa sebagai presiden merupakan kedua kalinya, setelah Maret mendapat penolakan atas pengunduran diri dari kongres, dan digantikan oleh presiden dari Mahkamah Agung Bolivia Eduardo Rodriguez sebagai pengisi kedudukan sementara sampai dijalankannya pemilu ditahun 2005. Robert E. Quirk, *op. cit*, hlm. 125-126.

[134] Abdul Wahib Situmorang*, Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*, (Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 10.

[135] *Ibid*, hlm. 33.

[136] Media cetak dan elektronik, buku, pamflet menjadi sarana mengkomunikasikan *framing* gerakan. Aktivis gerakan *sosial* mempergunakan warung kopi, café, dan ruang-ruang pertemuan sebagai media berdebat untuk mensosialisasikan isu sehingga kelompok masyarakat berkeinginan untuk terlibat dalam gerakan *sosial*. Lihat, Sidney Tarrow, *op. cit*, hlm. 110-117.

[137] "Susan Spronk", *loc. cit* .

Coordinador menjadi kontributor dan inspirasi penting munculnya gerakan perlawanan di wilayah lain.

Sementara itu, LLP, sebagai lembaga formal, mampu mewadahi organisasi-organisasi formal yang berserakan, sekaligus menjadi basis kekuatan organisasi di tingkat akar rumput. Seperti yang dikatakan Rucht, bahwa model organisasi formal akar rumput ini mampu menjadi pelaku politik yang radikal dan berkomitmen tinggi terhadap gerakan. Para petani dan pedagang koka yang notabene berasal dari akar rumput telah menjadi kekuatan yang radikal. Di samping itu, korban pemutusan hubungan kerja yang beralih profesi menjadi pedagang koka (baik legal ataupun illegal) menambah jumlah pedagang dan petani koka semakin besar. Para pekerja informal tersebut bergabung dengan organisasi formal untuk melakukan perlawanan. Kombinasi organisasi formal dan informal disempurnakan dengan adanya Struktur Peluang Politik, yakni keadaan ekonomi dan politik pascapenerapan NEP dan pembentukkan LPP pada 1994.

Faktor-faktor di atas, menjadi penggerak aktor-aktor politik gerakan sosial. Dapat pula dikatakan bahwa faktor tersebut telah memacu masifikasi perlawanan gerakan sosial dengan memanfaatkan sumberdaya eksternal.

A. MAS sebagai Blok Antineoliberalisme

Gramsci menekankan dalam membangun kelompok besar harus terdiri dari berbagai kekuatan sosial yang disatukan oleh sebuah konsepsi yang sama. Peran ini dimainkan oleh MAS dalam membangun koalisi dari berbagai organisasi dan gerakan-gerakan yang berbasiskan akar rumput.

Begitu terjadi pemutusan kontrak privatisasi air dengan Aguas del Tunari di Cochabamba, massa kemudian menolak privatisasi hidrokarbon dan memaksa rejim privatisasi mundur. Kedua kasus privatisasi tidak terlepas dari persatuan gerakan di dalam Coordinadora dan NCDRG. Melalui LPP, bentuk perlawanan *cocaleros* (produsen koka) meningkat, bahkan menguat. Represi dan pembiaran negara terhadap tuntutan rakyat, menjadi penyebab radikalisasi perlawanan petani dan pedagang koka.

Perkembangan gerakan di atas mengerucut pada MAS. MAS menjadi mesin politik yang menyuarakan gerakan antiprivatisasi tanpa melepaskan basis utamanya, yakni penduduk asli di tingkat daerah hingga tingkat nasional.[138]

Morales sebagai pimpinan MAS memimpin perlawanan terhadap keputusan Presiden DS 26415 tentang penutupan produksi koka legal di Chapare. Aktivitas

[138] Proses perkembangan partai politik MAS mirip dengan Brazilian Worker's Party (PT), yakni akumulasi perlawanan di tingkatan *grassroots* menuju tingkat nasional dan bertransformasi menjadi partai politik. Lihat Jan Rocha, "Cutting the Wire: The Landless Movement in Brazil", *Current History*, Vol, 102, No. 661, Februari 2003, hlm. 86-90.

tersebut meningkatkan popularitas Morales di mata publik Bolivia. Selain bergaul dengan massa, Morales juga menggalang dukungan Kuba dan Venezuela.[139]

Pada 22 Desember 2006, pemilihan umum presiden diadakan di Bolivia dan menempatkan Morales sebagai presiden terpilih dengan suara terbanyak sebesar 53,899% dari 98,69% pemilih.[140] Morales adalah presiden pertama yang berasal dari suku Indian. Setelah terpilih sebagai presiden, Morales melakukan kerjasama dengan Venezuela dan Kuba dalam bidang kesehatan, pendidikan dan membuka kantor minyak nasional Venezuela (PDVSA). Secara khusus, Kuba memberikan dukungan program pendidikan terpadu dan pemberian beasiswa kepada 5.000 pelajar Bolivia.[141] Kesepakatan ketiga pemimpin semakin menguatkan aliansi antarnegara di Amerika Latin. Kerjasama tersebut dilandasi semangat nasionalisme-patriotik dan antineoliberalisme.

B. Aliansi Organisasi Gerakan Sosial sebagai Blok Historis

Masifikasi perlawanan telah meningkatkan kesadaran berserikat untuk memeroleh *bargaining position* di hadapan negara. Rakyat semakin menyadari bahwa kebijakan neoliberalistik tidak membuat hidup sejahtera.

Pada sisi yang berbeda, MAS menjadi instrumen perjuangan organisasi-organisasi akar rumput. Isu antiprivatisasi dan antineoliberalisme menjadi pengikat gerakan dan menjadikan MAS sebagai oposisi, pada pemilu 2002. James Petras menganalisis bahwa Morales dan MAS sebagai instrumen politik telah menjadi penggerak perlawanan privatisasi air dan gas.[142] MAS membangun koalisi dengan berbagai organisasi rumput. Tidak segan, MAS dan Morales rela "turun ke jalan" dan bergabung dengan aliansi gerakan lain.

Bagan 2 Kebangkitan Aktor-aktor Gerakan Sosial

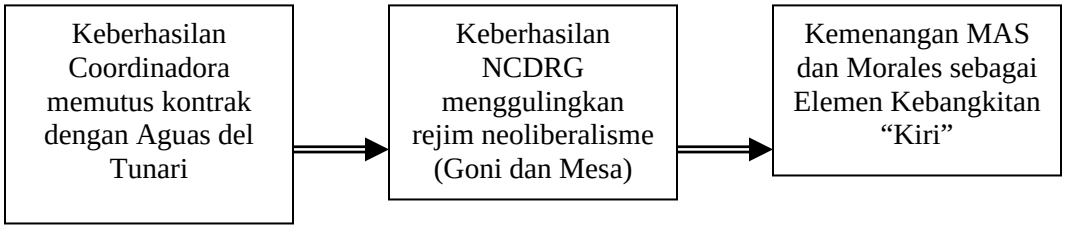
Keberhasilan Coordinadora memutus kontrak dengan Aguas del Tunari
Keberhasilan NCDRG menggulingkan rejim neoliberalisme (Goni dan Mesa)
Kemenangan MAS dan Morales sebagai Elemen Kebangkitan "Kiri"

[139] Eduardo A. Gamarra, Bolivia on the Brink, CSR no. 24, February 2007, Council of Foreign Relations dalam http://d.scribd.com/docs/2cr6qqcewhfqqx9lxuge.pdf; internet; diakses 24 Agustus 2008

[140] Robert E. Quirk, *op. cit*, hlm. 131. Setelah Pemilu 2002, Morales di posisi kedua dengan memenangkan 8 dari 27 kursi senat dan 27 dari 130 kursi di kongres. Lihat Hempri Suyatna, *op. cit,* hlm. 110-112.

[141] *Ibid*

[142] James Petras dan Henry Veltmeyer, *Social Movement and State Power: Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador* (London: Plutu Press, 2005),hlm. 201

5. KESIMPULAN

Kemenangan MAS dan Morales sebagai presiden, pada 2006, telah mengidentifikasikan siginikansi Blok Historis sebagai alat perlawanan efektif. Blok Historis ampuh menahan laju proyek neoliberalisme di Bolivia. Selain itu, keberhasilan memanfaatkan Struktur Peluang Politik melalui LPP (*Law of Popular Participation*) merupakan posisi meraih partisipasi politik lokal. Perpaduan organisasi formal dan informal semakin meningkatkan gairah perlawanan rakyat.

Program Penyesuaian Struktural (SAP) di Bolivia tidak ada untungnya bagi rakyat. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan GDP dengan privatisasi dan alih pertanian koka malah 'membunuh' kehidupan rakyat. Kebijakan neoliberalisme diperparah dengan sikap militeristik rejim. Program stabilisasi politik melalui dekrit penghapusan pekerjaan (khususnya buruh tambang), kontrol harga, dan penghapusan tunjangan membuat rakyat gerah.

Bagian terpenting dari proses perlawanan gerakan sosial adalah persatuan antargerakan sosial dalam satu platform bersama. Persatuan tersebut diikat dengan platform "air sebagai sumber kehidupan".

Referensi

Bellamy, Richard. *Modern Italian Social Theory, From Pareto to the Present*, (terj) Vedi R. Hasan, *Teori Sosial Modern: Perspektif Itali*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Black, Jan Knippers. *Latin America: It's Problem and It's Promise*. London: Westview Press, 1984.

Boville, Belen. *The Cocaine War in Context: Drugs and Politics.* New York: Algora Publishing, 2004.

Databank, Bon and Research Center. *Privatization: Corporate Takeover of Government.* Manila: IBON BOOKS, 2003.

Fauzi, Noer. *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Insist Press, 2005.

Giddens, Anthony. *Beyond Left and Right, (terj) Tarian Ideologi Alternatif di Atas Pusara Sosialisme dan Kapitalisme,* Yogyakarta: IRCiSod, 2002.

Gott, Richard. *Hugo Chavez and the Bolivarian Revolution*. London: Verso, 2005.

Gramsci, Antonio. *Selection from The Prison Notebooks,* Quentin Hoare dan Nowell Smith et al., ed. New York: International publisher, 1976.

Huntington, Samuel. *Political Order in Changing Society, (terj) Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. London: Yale University Press

Jenkins, Craig J. *Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movement*. Annual Review of Sociology, 1983.

Kohl, Benjamin, dan Linda Farthing, *Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance*. London: Zed Books, 2005.

Lofland, John. *Protest: Studies of Collective Behavior and Social Movements*. New Brunswick: Transaction Book, 1985.

Marcos, Subcomandante. *Kata Adalah Senjata.* Yogyakarta: Resist Book, 2005.

Patria, Nezar dan Andi Arief. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Petras, James dan Henry Veltmeyer. *Social Movementsand State Power: Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador*. London: Plutu Press, 2005.

Quirk, Robert E. *Poros Setan: Kisah Empat Presiden Revolusioner: Fidel Castro, M. Ahmadinejad, Evo Morales, Hugo Chavez.* Yogyakarta: Prismasophie, 2007.

Ramanadhan, V. V. *Constraints and Impact of Privatization*. London: Routledge, 1993.

Situmorang, Abdul Wahib*. Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Pustaka Pelajar, 2007.

Soyomukti, Nurani. *Hugo Chavez: Revolusi Bolivarian dan Politik Radikal.* Yogyakarta: Resist Book, 2007.

_____. *Revolusi Sandinista: Perjuangan Tanpa Akhir Melawan Neoliberalisme.* Yogyakarta: Garasi, 2008.

Suyatna, Hempri. *Evo Morales: Presiden Bolivia Menantang Arogansi Amerika.* Jakarta: Hikmah: PT Mizan Publika, 2007.

Tarrow, Sidney. *Power in Movement Social Movement and Contentious Politics,* 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Tepperman, Lorne dan R. Jack Richardson. *An Introduction to Sociology: The Social World 2nd Edition*. Mc Graw-Hill Ryerson Limited, 1991.

Wiarda, Howard J. dan Harvey F. Kline*. Latin American Politics and Development, 6th edition*. Colorado: Westview Press, 2007.

Wilson, John. *Introduction to Social Movement.* New York: Basic Book, 1973.

Artikel pada Jurnal

Anggara, Lutfi. "Fenomena Anti-Liberalisme di Amerika Latin." *Global Jurnal Politik Internasional,* Vol. 9, no. 1, Mei-November 2007: hlm. 86-102

Cleary,Matthew R. "Explaining The Left's Resurgence." *Journal of Democracy*, Vol 17, No. 4, Oktober 2006: hlm. 35-49

Hayami, Yuziro. "from the Washington Consensus to the Post-Washington Consensus: Retrospect and Prospect." *Asian Development Review*, Vol. 20, No. 2, 2003

Mahon, James E Jr. "Good-Bye to the Washington Consensus?" *Current History*. Vol, 102, No. 661, Februari 2003: hlm. 58-64

Skripsi

Rahadian, Rieza. "Interaksi Negara dengan Organisasi Internasional dan Perusahaan Multinasional dalam Privatisasi Air Cochabamba Tahun 1999-2000 dan Implikasinya bagi Masyarakat Sipil." Skripsi Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, 2005.

Wicaksono, Leonardus Satrio. "Pengaruh Politisasi Gerakan Sosial terhadap Kultur Demokrasi: Analisis Komparatif terhadap Gerakan MBR-200 di Venezuela dan Gerakan MAS di Bolivia." Skripsi Sarjana Reguler Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2007.

Artikel online

Barja, Gover, David McKenzie, dan Miguel Urquiola. "Capitalization and Privatization in Bolivia: An Approximation and to an Evaluation."24 Agustus 2008.

<http://www.mpd-ucb.edu.bo/publicaciones/WP_007_Capitalization%20and%20privatization%20in%20Bolivia%20an%20approximation%20to%20an%20evaluation.pdf>

Biddle, Karen, Fiona Kenyon, dan Fernando Prada. "Bolivia's New Economic Policy." 17 Oktober 2008 <http://www-personal.umich.edu/~kathrynd/Bolivia.w06.pdf>

Finnegan, William. "Leasing the Rain." 21 Mei 2009 <http://www.waterobservatory.org/library.cfm?refID=33711>

Gamarra, Eduardo A. "Bolivia on the Brink." *CSR* no. 24, February 2007. *Council of Foreign Relations*. 24 Agustus 2008 <http://d.scribd.com/docs/2cr6qqcewhfqqx9lxuge.pdf>

Healy, Kevin. "Bolivia and Cocaine: a Developing Country's Dillemas." 24 Agustus 2008 <http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119465363/PDFSTART>

Hylton, Forrest. "The Ghost of Gonismo: Popular Participation in Bolivia's Gas Referendum." 19 Mei 2009 <http://www.counterpunch.org/hylton07202004.html>

Khan, Yasmin. "The War of Cocaleros Has Brought Bolivia Nothing but Poverty and death: The Story of Leonilda Zurita Vargas." 24 Agustus 2008 <http://www.narconews.com/Issue34/article1031.html>

Morales, Evo. "From Coca to Congress." 21 Mei 2009 <http://www.zmag.org/znet/viewArticle/11408>

Molina, George Gray. "Popular Participation, Social Service Delivery, and Poverty Reduction 1994-2000." 24 Agustus 2008."<http://www.adb.org/Documents/Events/2002/Citizen_participation/Bolivia.pdf>

Mosley, Paul. "Microfinance and Poverty in Bolivia", *Journal of Development Studies*, April 2001. 24 Agustus 2008 <http://www.tradewatch.org/documents/Bolivia_(PDF).PDF>

Petras, James. "The Centrality of Peasant Movements in Latin America." 4 Maret 2008 <http://www.counterpunch.org/petras06042005.html; Internet>

Spronk, Susan. "Roots of Resistance to Urban Water Privatization in Bolivia: The New Working Class, The Crisis of Neoliberalism, and Public Services." 24 Agustus 2008 <http://www.socialsciences.cornell.edu/0609/ILWCH.pdf>

Stillo, Monica. "Antonio Gramsci." 10 Maret 2008. <http://www.theory.org.uk/ctr-gram.htm>

Answer.com. "Biography: Renne Barrientos Ortuno." 17 Oktober 2008 <http://www.answers.com/topic/ren-barrientos>

BBC News, Profile: Evo Morales "Aymara Indian Evo Morales has become in recent years both a key and controversial figure in Bolivian politics" 4 Maret 2008 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3203752.stm>

Bookrags. "Rene Barrientos Ortuno Biography." 17 Oktober 2008 <http://www.bookrags.com/biography/rene-barrientos-ortuno/>

Contry Studies: Bolivia. “From The War of The Pacific to The Chaco War.” 24 Agustus 2008 <http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0020)>
Contry Studies: Bolivia. “The Bolivian National Revolutions, 1952-1964: Radical reforms.” 24 Agustus 2008 <http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0028)>
Contry Studies: Bolivia. “The Unfinished Revolution.” 24 Agustus 2008 <http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0029)>
Contry Studies: Bolivia. “Military Rule 1964-1982: The Presidency of Barrientos.” 24 Agustus 2008 <http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0030)>
Contry Studies: Bolivia. “The Banzer Regime.” 24 Agustus 2008 <http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0032)>
Contry Studies: Bolivia. “Transition to Democracy.” 24 Agustus 2008 <http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+bo0033)>
Public Citizens. “Water Privatization Case Study: Chocabamba, Bolivia.” 24 Agustus 2008.<http://www.tradewatch.org/documents/Bolivia_(PDF).PDF>
The Development Group. “The World Bank, The IMF, and Illegal Drug Production: The Case of Bolivia.” 24 Agustus 2008 http://www.developmentgap.org/americas/Bolivia/The_WorldBank_theIMF_and_Illegal_Drug_Production_The_Case_of_Bolivia.pdf>
http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0312/19/Jendela/755332.htm, 24 Agustus 2008
http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitextlo/int_jeffreysachs.html, 19 Mei 2009

PRIVATISASI, FLEKSIBILISASI DAN PEMBERANGUSAN SERIKAT

Komite Solidaritas Nasional[143]

I. PENDAHULUAN

Labor Market Flexybility (LMF) atau Pasar Tenaga Kerja muncul karena penemuan teknologi baru dan/atau tata cara pengelolaan sumber daya manusia. Fleksibilisasi Tenaga Tenaga Kerja berarti upaya penyesuaian tenaga kerja terhadap permintaan dan fluktuasi pasar. Di Indonesia, Fleksibilisasi diyakini dapat menarik investasi, mengatasi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, meratakan upah pekerja informal dan formal.

Skema fleksibilisasi telah dipropagandakan oleh lembaga-lembaga multilateral seperti Lembaga Keuangan Dunia (IMF/International Monetary Fund) dan Bank Dunia (WB/World Bank), para akademisi, dan bahkan, oleh "masyarakat sipil" dari birokrasi LSM (NGO/Non-Governmental Organisation). Indonesia pun telah mengadopsi skema fleksibilisasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Juga, dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2005 Bab 23 tentang Perbaikan iklim Ketenagakerjaan, yang menyebutkan:

Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan produktivitas pekerja dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan **fleksibilitas pasar kerja** dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekruitmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta **memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.**
2. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini, Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi. Iklim usaha yang kondusif memerlukan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, biaya produksi yang rendah, kepastian hukum serta peningkatan ketersediaan infrastruktur.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki pelayanan pendidikan, pelatihan serta memperbaiki pelayanan kesehatan.
4. Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan.
5. Memperbaiki berbagai kebijakan yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja, baik itu migrasi tenaga kerja internal maupun eksternal.
6. Menyempurnakan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja serta membentuk bursa kerja.

[143] Tulisan ini bagian dari materi Rapat Akbar Komite Solidaritas Nasional yang dilaksanakan…. Tulisan ini mengalami penyuntingan.

Akan tetapi, pada saat perkembangan teknologi dan pengaturan ketenagakerjaan fleksibel dilakukan, terjadi penggelembungan keuntungan para kapitalis, minus kesejahteraan para buruh. Di satu sisi, angka ekspor semakin meningkat, kawasan-kawasan industri tumbuh di berbagai wilayah. Di sisi lain, di setiap sektor industri muncul cerita mengenai PHK terhadap buruh dan aktivis buruh, upah riil terus menurun, angka kecelakaan kerja bertambah dan buruh kontrak semakin bertambah.[144]

Serikat buruh di Indonesia, mengistilah fleksibilisasi tenaga kerja dengan kontrak dan outsourcing. Fleksibilisasi telah menjadi penyebab melemahnya kekuatan serikat: menyebabkan penurunan anggota, menghambat kaderisasi anggota, berkurangnya anggota, dan secara otomatis pendapatan serikat pun menjadi berkuran*g*.

A. Ragam Fleksibilisasi[145]

1. Fleksibilisasi Eksternal

Fleksibilisasi Eksternal merupakan skema ketenagakerjaan untuk memodifikasi jumlah dan komposisi tenaga kerja sesuai permintaan. Skema ini terang-terangan mengaburkan, bahkan melemahkan hubungan antara majikan–pekerja. Tujuan utama skema ini adalah memudahkan pengurangan tenaga kerja dan penyerapan kembali (pergantian buruh), sambil memelihara kestabilan buruh-buruh intinya. Ada dua rute dalam fleksibilisasi eksternal ini:

(i) *Outsourcing* atau Subkontrak atau penggunaan agen atau beberapa agen (subkontraktor, kontraktor khusus buruh, agen penempatan tenaga kerja) antara perusahaan pusat dan tenaga kerja. Contoh-contoh dari hal ini adalah sistem kontrak, subkontrak, atau menyewa agensi sebagai ganti dari tenaga kerja reguler.

Skema fleksibilisasi tenaga kerja mengandaikan perjanjian individual antara pengusaha dengan buruh

(ii) Tenaga Kerja Cabutan atau penyewaaan langsung tenaga kerja yang tidak memunyai jaminan kepastian kerja. Contohnya: buruh paruh waktu, kasual, kontraktual, pegawai magang, tenaga *training*, dan semacamnya.

---

[144] Angka-angka tersebut dapat dilihat, Arifin, Syarif dkk. *Krisis Finansial Global; Petaka Bagi Buruh yang Tak Kunjung Usai*. dalam, Jurnal Sedane Vol. 6 No. 2 2008. Hal., 21-58

[145] Sebagian tuilisan ini diadopsi dari Eiler, Inc. Labor Flexibilization and Imperialist Crisis; Intensifying Exploitation, Dismantling Job Security, Liquidating Unions. **1 May 2000.** Online tersedia: www.eilerinc.org

2. Fleksibillisasi Internal atau Inti

Fleksibilisasi Internal berkaitan dengan pengaturan internal struktur pekerjaan dan organisasi kerja bagi para tenaga kerja inti (regular/tetap). Yang termasuk bagian ini adalah:

(i) Jam Kerja Fleksibel - sebagai contoh, jam lembur baik yang rutin maupun yang dipaksakan, perputaran *shift* kerja selama 24 jam, *shift* kerja di akhir pekan dan sebagainya. Semua rencana kerja tersebut adalah usaha untuk memaksimalkan penggunaan aset (perlengkapan, mesin, bangunan, dan lain sebagainya) dan mempercepat kembalinya modal dengan cara intensifikasi kerja.

(ii) **Fungsi Fleksibel -** tugas ganda, kerja yang bervariasi, pembagian kerja, tingkatan kerja, kerja tim, lingkaran kualitas dan semua perencanaan pengklasifikasian pekerjaan dan sistem pembagian gaji, membuat semua posisi dan jenis pekerjaan bisa "digantikan oleh siapa saja". Sistem kerja ini memberikan para pemilik modal sebuah "fleksibilitas" untuk menempatkan dan mengatur pekerja-pekerja individual di segala tempat tanpa biaya. Pada umumnya, akan mengakibatkan penumpukan tenaga kerja, sehingga akan terjadi pengurangan tenaga kerja dan pengurangan gaji. Ilmu Manajemen menyebut fungsi fleksibel sebagai pekerja *multitasking*.

(iii) **Upah Fleksibel** - secara tradisional, adalah sebuah ucapan halus untuk menghindari upah "ketat" (upah minimum yang ditetapkan). Istilah tersebut mencakup skema upah yang beraneka dan berusaha mengaitkan upah perseorangan dengan "performa pekerja". Upah Fleksibel tidak menghitung jam kerja, hanya produktivitas buruhlah yang dikategorikan layak mendapatkan upah.

Secara umum, union busting memiliki dua bentuk dasar. Pertama, perusahaan dan pengusaha berupaya mencegah buruh untuk membangun serikat buruh. Kedua, berusaha melemahkan kekuatan serikat buruh yang telah ada

B. Pemberangusan Serikat

Skema fleksibilisasi tenaga kerja mengandaikan perjanjian individual antara pengusaha dengan buruh. Karena itu, tidak menghendaki keberadaan serikat buruh. Dalam konteks fleksibilisasi, keuntungan didapat dengan mudah dan tenaga kerja didapat dengan murah.

Union busting atau pemberangusan serikat buruh adalah suatu praktik di

mana perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghentikan atau menghalang-halangi aktivitas dan fungsi dasar serikat buruh di wilayah perusahaan. Cara pemberangusan ada beragam dengan menggunakan berbagai macam cara dan alasan. Pada saat ini, jika praktik *union busting* semakin meningkat karena ada kecenderungan pembiaran yang dilakukan oleh pejabat atau instansi yang seharusnya menjaga dan mengawasi pelaksanaan hak berserikat bagi buruh, yang dijamin konstitusi dan undang-undang.

Secara umum, *union busting* memiliki dua bentuk dasar. Pertama, perusahaan dan pengusaha berupaya mencegah buruh untuk membangun atau menggabungan diri dengan serikat buruh. Tindakan ini dilakukan agar perusahaan bebas melakukan eksploitasi tanpa adanya kontrol dari serikat buruh. Kedua, berusaha melemahkan kekuatan serikat buruh yang telah ada. Sanksi perusahaan bagi pengurus dan anggota, intimidasi dan tindakan diskriminatif adalah hal umum yang dilakukan untuk melemahkan serikat buruh.

liberalisasi sudah menjadi pilihan rejim sebagai solusi dari krisis ekonomi. Investasi asing dan pertumbuhan ekonomi dianggap dapat menyelesaikan persoalan pengangguran.

II. KILAS BALIK KEBIJAKAN SISTEM KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING[146]

Pasca krisis ekonomi 1997/1998 persoalan sosial masyarakat Indonesia tampak tidak terselesaikan: kesejahteraan dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak masih menjadi masalah pokok. Sementara itu, jumlah pengangguran meninggi dan angkatan kerja baru tidak terfasilitasi, pemutusan hubungan kerja (PHK) individual maupun massal terus terjadi. Data resmi pemerintah menyebutkan bahwa sektor formal terus menurun, tapi informalisasi membengkak. Gelembung kemiskinan dinikmati oleh kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota dan perempuan. Posisi tersebut dialami sejak rejim Orde Baru berkuasa.

Prestasi rejim Orde Baru dalam menciptakan stabilitas politik dan angka pertumbuhan ekonomi tinggi mengorbankan kepentingan dasar rakyat Indonesia. Sebaliknya, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia telah dipertaruhkan untuk kepentingan kapital monopoli internasional. Agen-agen lembaga dunia seperti Bank Dunia, International Monetery Fund (IMF), dan lembaga dunia lainnya bersama pemerintah Indonesia mempraktikkan pemiskinan massal.

[146] Judul asli tulisan, *Sistem Kerja Kontrak & Outsourcing Solusi Krisis di atas Penderitaan Kaum Buruh*, oleh Anwar "Sastro" Ma'ruf, Koordinator Badan Pekerja Nasional Aliansi Buruh Menggugat (BPN ABM), Ketua Nasional Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP), dan Koordinator Komite Solidaritas Nasional (KSN). Tulisan ini pernah disampaikan dalam seminar "Outsourcing: Inikah Masa Depan Ketenagakerjaan Indonesia?" 6 Desember 2007 di Universitas Indonesia.

Seperti dikupas Vedy R. Hadiz, reformasi 1998 telah menghasilkan, *pertama*, reformasi kebijakan developmentalis, yang dijaga rejim militer menuju alam liberalisasi atau pasar bebas. *Kedua*, membuat kebijakan untuk menjamin liberalisasi. Program-program seperti pemerintahan bersih dan korporatis, desentralisasi, dan privatisasi adalah wujud dari posisi kedua di atas. *Ketiga*, pergilah ke pasar internasional (pasar bebas) sebagai *ending* dari gelombang demokratisasi atau reformasi.

Proses liberalisasi tercermin dalam (Instruksi Presiden) Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Perbaikan Iklim Investasi. Inpres tersebut merekomendasikan: Pertama, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 Tahun 2003, yang sudah mengakomodir fleksibilitas (legalisasi kontrak dan *outsourcing*). Revisi berangkat dari keyakinan, UUK sebelumnya kurang fleksibel. Meskipun revisi UUK tertunda, tetapi upayanya dibuat jalan melingkar, yakni dengan RPP Pesangon dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Kedua, amandemen UU PMA (Penanaman Modal Asing) No. 1 Tahun 1967 menjadi UU PM (Undang-Undang Penanaman Modal) No. 25 Tahun 2007. Dalam beberapa hal, undang-undang tersebut merestorasi kebijakan Kolonial Belanda. Salah satunya adalah sewa tanah atau lahan dapat diperpanjang hingga 90 tahun dari 25-35 tahun. Ketiga, menerapkan PPAN (Program Pembaharuan Agraria Nasional). Serikat-serikat tani progresif menyatakan bahwa PPAN adalah reformasi agraria palsu. PPAN telah menganulir ketetapan dalam UU PA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960.

Intinya, liberalisasi sudah menjadi pilihan rejim sebagai solusi dari krisis ekonomi. Investasi asing dan pertumbuhan ekonomi dianggap dapat menyelesaikan persoalan pengangguran. Padahal, setiap digit pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mampu membuka lapangan kerja yang dibutuhkan rakyat. Karena, investasi yang masuk sesungguhnya hanya bermain saham dan mengambil alih perusahaan-perusahaan sektor vital sejalan dengan agenda privatisasi. Juga, desentralisasi melalui otonomi daerah ternyata diboncengi oleh investasi langsung untuk memudahkan akses pada sumber daya alam yang ada di daerah memotong jalan panjang birokrasi. Alhasil, hampir semua program merupakan kepentingan dari kapitalisme global dengan mengabaikan kepentingan rakyat mayoritas dan konstitusi negara.

A. Sistem Kerja Kontrak dan *Outsourcing* serta Dampaknya Bagi Buruh

Pertanyaan kritis, kenapa revisi UUK 13 Tahun 2003 ditolak dengan gelombang aksi besar-besaran gerakan buruh Indonesia yang puncaknya di May Day 2006? Jawabannya sederhana, karena kaum buruh tahu dan sudah merasakan dampak buruk dari UUK 13 Tahun 2003, yakni dilaksanakannya sistem ketenagakerjaan yang fleksibel (kontrak dan outsourcing). Beberapa masalah yang dialami oleh buruh yang berstatus kontrak atau outsourcing antara lain;

Pertama, masalah jaminan kepastian dan keamanan kerja, di mana tidak ada perlindungan jangka panjang terhadap buruh yang berstatus kontrak atau outsourcing: kapan dibutuhkan bisa direkrut, kapan tidak dibutuhkan dapat dipecat.

Kemudian pengusaha tidak perlu repot bayar pesangon atau adanya penolakan masif dari buruh ketika di-PHK. Kalau bicara pesangon kenapa harus tinggi nilainya? Hal ini sebagai jaring pengaman dari kemudahan pemecatan, karena tidaklah mudah mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang cepat. Negara wajib melindungi rakyatnya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2 UUD 1945), seperti tecermin dalam UU No. 22 Tahun 1957 dan UU No. 12 Tahun 1964 jelas perlindungan dan keberpihakannya. Namun, tidak untuk UUK No. 13 Tahun 2003. Dan, revisi UUK berupaya mengurangi nilai pesangon.

Kedua, menurunnya upah dan kesejahteraan buruh. Buruh yang berstatus kontrak ataupun *outsourcing*, upahnya lebih rendah bila dibandingkan yang buruh yang berstatus tetap bahkan banyak yang di bawah upah minimum (UMK), tidak ada jaminan sosial tenaga kerja serta dihilangkannya tunjangan-tunjangan, seperti uang makan, uang transport, tunjangan masa kerja.

Ketiga, lemahnya posisi tawar buruh dan sulitnya berserikat. Hal ini sebagai dampak dari hubungan kerja individual. Ketika berstatus permanen/tetap hubungan kerja bersifat kolektif: dapat berserikat, bernegosiasi dan membuat PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang tentu akan lebih kuat mengatur dan melindungi di luar hak-hak normatif. Terkait masalah kesejahteraan, karena rendahnya posisi tawar berpengaruh pula pada jam kerja panjang (skorsing waktu), yaitu penambahan jam kerja atau lembur tanpa di bayar. Perusahaan bisa saja menentukan target yang tinggi yang tidak mampu dicapai oleh buruh. Buruh kontrak atau *outsourcing* akan meng-iyakan semua jenis penghisapan dan penindasan yang ditimpakan kepada dirinya.

Keempat, terjadi praktik human *trafficking* (perdagangan manusia). Perusahaan-perusahaan semakin gemar menggunakan jasa lembaga atau perusahaan *outsourcing.* Agen-agen *outsourcing* memungut biaya antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah dari para pencari kerja. Padahal, pekerjaan yang disediakan waktunya pendek (KKWT/Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu). Sebagai contoh, untuk mendapatkan pekerjaan dengan usia kontrak tiga bulan dengan upah UMK 972.604,- buruh harus bayar 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Berarti dalam satu bulan buruh kerja bakti dengan tidak dibayar. Belum lagi harus dipotong upahnya setiap bulan. Ada juga yang menerapkan registrasi setiap tiga bulanan. Tenaga kerja mengurus administrasi di *outsourcing*, namun bekerja di perusahaan lain. Terjadi *biased* hubungan kerja dengan sistem kerja alih daya (*outsourcing*). Selain itu, terdapat pula sistem pengalihan barang ke rumah penduduk. *Outsourcing* barang menciptakan buruh-rumahan.

Undang-Undang Ketengakerjaan No. 13 Tahun 2003 menggunakan kata: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang mengacu pada buruh kontrak. Dan, pemborongan pekerjaan serta penyedia jasa tenaga kerja untuk menyebut *outsourcing*. UUK No. 13/2003 menegaskan batasan-batasan untuk kerja kontrak dan *outsourcing*. Namun, pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah studi,[147] bahwa:

[147] Indrasari Tjandraningsih dan Hari Nugroho, *Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggung Jawab Negara,* Kertas Kerja, LIPS, LABSOSIO UI, Akatiga, Prakarsa. 2007

1. *Outsourcing* sebagai bentuk fleksibilitas pasar kerja dapat ditemukan di hampir seluruh bagian dalam rangkaian proses produksi.
2. Situasi konkret yang ditemukan di lapangan menunjukkan bentuk fleksibilitas pasar kerja adalah penggantian status buruh tetap menjadi buruh kontrak.
3. Maraknya penggunaan buruh *outsourcing* di bagian-bagian produksi atau bagian inti pekerjaan, yang sebenarnya dilarang oleh UUK 13/2003.
4. Hak-hak buruh kontrak dan *outsourcing* menjadi tidak jelas
5. Periode kontrak yang keluar dari aturan undang-undang (misalnya kontrak 1 tahunan) dalam prakteknya terus diperpanjang lebih dari 3 kali (di antara kontrak ada jeda waktu satu bulan).
6. Perusahaan seringkali melepas buruh tetap yang aktif di serikat dan menggantinya dengan buruh kontrak
7. Semakin maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) tiba-tiba dengan pemberitahuan singkat atau tanpa pemberitahuan sama sekali sebelumnya.
8. Penyedia jasa tenaga kerja belum tentu merupakan perusahaan yang berbadan hukum.

Matrik di bawah ini menunjukkan bagaimana perbedaan hak yang seharusnya diberikan pada buruh. Data buruh kontrak diambil dari 150 perusahaan, yang diteliti pada 2003-2004 (pascadisahkannya UUK No. 13 Tahun 2003). Angka tersebut dapat dipastikan terus meningkat sejalan dengan PHK massal, pergantian status buruh tetap ke kontrak dengan berbagai pola. Pertama, dengan pemutihan. Buruh diminta (dengan sukarela) mengundurkan diri dan diberikan pesangon, lalu direkrut lagi secara langsung menjadi kontrak. Hal ini bisa massal atau tambal sulam dengan memasukkan beberapa buruh baru dengan status kontrak. Kedua, dengan cara yang keras dan intimidatif, yakni pabrik ditutup dengan alasan rugi, penurunan kapasitas produksi dan lain-lain, lalu ada tawaran pesangon ala kadarnya. Beberapa bulan kemudian perusahaan tersebut akan beroperasi lagi dengan nama PT yang sama ataupun diubah (pemiliknya sama). Cara lain adalah, perusahaan ditinggal kabur; buruhnya rebutan aset dengan pihak kreditor (bank). Hal ini, dapat dilihat dalam kasus kasus PT Taewa, Spotec, Dongju dan banyak lagi. Keempat, dengan cara relokasi ketempat UMK rendah, seperti di Ungaran Jawa Tengah, Sukabumi Jawa Barat. Selain mendapatkan upah murah, mereka mempraktikkan perekrutan buruh kontrak maupun *outsourcing*.

Praktik Fleksibilisasi di Cimahi Jawa Barat

Praktik fleksibilitas lainnya ialah ”Pemutihan”, yaitu pekerja tetap yang masa kerjanya di atas 5 tahun, diberi sejumlah uang tertentu dan diubah status kerjanya menjadi kontrak. Pemberian uang tersebut bukanlah uang pesangon, karena perusahaan tidak melakukan PHK dan jumlahnya jauh di bawah ketentuan perundang-undangan. PT Reksindo Mangun Jaya (malfarel) dan PT Korin Garmentama, termasuk perusahaan yang melakukan pemutihan. Di PT Tiodor pemutihan dilakukan terhadap ratusan orang, awal 2007 lalu.

Seperti yang terjadi di PT. Benang Warna Indonusa, cuti haid hanya diberikan satu hari saja. Di PT. Sansan Lima, pekerja kontrak tidak mendapatkan cuti haid sama sekali. Di PT. Tegar Primanusantara, pekerja perempuan tidak mendapat cuti haid. Di PT. Mewah Niaga

Jaya, pekerja yang mangkir kerja cuti tahunannya dipotong 3 (tiga) hari setiap 1 (satu) hari mangkir kerja, khusus pekerja perempuan mereka tidak mendapat cuti haid. Perusahaan menganggap cuti haid hanya menghambat produktivitas, sehingga dianggap sebagai kekakuan hubungan kerja.

Praktik fleksibilitas lainnya, yaitu dengan tidak mengikutsertakan sebagian atau seluruh pekerja pada jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), seperti terjadi di PT. Sanlit-Santo Plastik, PT Benang Warna Indonusa, dan PT Opelon Garment Indonesia. JPK dan jaminan kesehatan serta kesejahteraan lainnya dipandang sebagai beban perusahaan.

Sumber: Fleksibilisasi Pasar Kerja dan Pengorganisasian Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia. Dalam Teori dan Praktik Fleksibilitas Tenaga Kerja. Jurnal Sedane Vol. 7 No. 1 2009.

Sebagaimana dinyatakan di awal, mayoritas buruh kontrak dan *outsourcing* bekerja di bagian inti produksi. Yang menurut UUK 13 Tahun 2003 tidak diperbolehkan. Setidaknya, hal ini mencerminkan peran pemerintah, dalam hal Dinas dan Departemen Tenaga Kerja, semakin melemah di hadapan rejim fleksibilisasi pasar tenaga kerja.

Hak-hak Buruh Tetap dan Buruh Kontrak

Hak-hak buruh	Buruh Tetap	Buruh Kontrak
Upah Pokok (UP)	Minimal UMK Tunjangan Masa Kerja (TMK) (bertambah sesuai dengan masa kerja) UP=UMK+TMK	Hanya UMK
Premi Kehadiran	Dapat	Tidak
Tunjangan Jabatan	Pada posisi tertentu ada	Tidak ada
Jamsostek	Dapat Jaminan Kecelakaan kerja Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (fasilitas bagi buruh dan keluarga)	Tidak dapat Berobat harus bayar sendiri
Uang makan & Transpor	Dapat	Tidak dapat
Hak Cuti: Tahunan, haid & cuti hamil	Dapat; Buruh perempuan yang hamil mendapat cuti 3 bulan dengan dibayar upahnya.	Tidak dapat; Buruh perempuan ketika hamil diputus kontraknya
Tunjangan Hari Raya	Dapat	Tidak dapat
Pesangon	Dapat (dilindungi UU)	Tidak dapat
Kebebasan Berserikat	Ada dan dapat dijalankan	Buruh takut berserikat karena diancam putus kontrak
Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja	Kolektif melalui PKB	Individu yang ditandatangani diawal
Contoh: Perbandingan Pendapatan buruh per-bulan antara buruh tetap dan buruh kontrak untuk dengan buruh masa kerja 3 tahun (Tahun 2004)	UMK: Rp. 660.000 TMK: Rp. 3000/thn x 3 UP: Rp. 669.000 PH: Rp. 25.000 TJ: Rp. 20.000 UMT: Rp. 75.000 Upah Kotor=Rp. 789.000 (tanpa lembur)	UMK: Rp.660.000 Upah Kotor: Rp. 660.000 (tanpa lembur)

Sumber: Position Paper KBC (Komite Buruh Cisadane) April 2004. Hasil Pendataan terhadap 150 Perusahaan di Kota dan Kabupaten Tangerang 2003-2004.

Contoh 1. Perbandingan upah di perusahaan otomotif di Kawasan Industri Manis Tangerang dengan produksi *Spare part* mobil untuk ekspor dan lokal, modal PMA Taiwan, yang mempekerjakan 540 orang buruh (90% laki-laki), dengan status tetap 270 orang, 17 orang kontrak langsung dan 253 orang melalui PT penyalur tenaga kerja.

Keterangan	**Buruh tetap**	**Buruh kontrak**	**Buruh Outsourcing**
Jumlah Buruh	270 orang	17 orang	253 orang
1. Pola Perekrutan			
Pola perekrutan dan syarat-syarat	Test langsung di PT	Test langsung di PT dan harus sarjana	Melalui Test di Yayasan atau Agen Penyalur
Biaya	Tidak dipungut biaya	Tidak dipungut biaya	Formulir: Rp. 20.000,- Test : Rp. 50.000,- Masuk : Rp. 300.000,-
2. Upah & Tunjangan	**(per-bulan)**	**(per-bulan)**	**(per-bulan)**
➢ Upah pokok	Rp. 832.500,-	Rp. 832.500,-	Rp. 832.500,-
➢ Tunjangan Pekerjaan	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
➢ Kehadiran	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-
➢ Transportasi	Rp. 100.000,-	-	-
➢ Uang makan	Rp. 170.000,-	-	-
➢ Uang Shif	Rp. 30.000,-	-	-
Total Upah tanpa lembur	**Rp. 1.222.500,-**	**Rp. 922.500,-**	**Rp. 922.500,-**
Selisih upah kotor tanpa lembur	**Rp. *300.000,-***	**(Rp. *300.000,-*)**	**(Rp. *300.000,-*)**
3. Hak Cuti	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Tahunan, hamil, haid	Cuti hamil untuk buruh perempuan diberikan 3 bulan dengan upah penuh	Buruh perempuan dilarang hamil atau kalau hamil diputus kontraknya. Ketika libur Hari Raya tidak dibayar upahnya	Buruh perempuan dilarang hamil atau kalau hamil diputus kontraknya. Ketika libur Hari Raya tidak dibayar upahnya
4. Jaminan Kepastian dan Kemanan Kerja			
➢ Jamsostek	Paket A (JHT,JKK,JK) (Paket B belum ada klinik mandiri)	Tidak ada perlindungan (Paket B belum ada klinik mandiri)	Tidak ada perlindungan (Paket B belum ada klinik mandiri)
➢ THR	1 bulan upah	Dihitung sesuai masa kerja	Dihitung sesuai masa kerja
➢ Bonus tahunan	Dapat	Dapat	Tidak Dapat
➢ Masa kerja dan hak pesangon	Dijamin atau dilindungi oleh UU, bila di PHK dapat pesangon rata-rata 2xPMTK. (direkrut sebelum 2002)	Tidak ada jaminan atau perlindungan. 6bulan-2tahun dan dapat dipecat kapan saja tanpa harus bayar pesangon. (direkrut mulai 2002)	Tidak ada jaminan atau perlindungan. Per 3bulan dan dapat dipecat kapan saja tanpa harus bayar pesangon. (kalau order banyak direkrut mulai 2005)
5. Hak berserikat	Meskipun ada intimidasi buruh tetap berani mendirikan SB	Buruh takut bergabung ada ancaman di putus kontraknya	Buruh takut bergabung ada ancaman di putus kontraknya

Dari data di atas, sesungguhnya pengusaha sudah melanggar undang-undang, yaitu dengan mempekerjakan buruh kontrak pada produksi utama. Hak buruh yang dicuri, dengan dalih efisiensi, melalui fleksibilitas buruh, kalau dihitung dari upah 270 orang buruh saja lebih dari 81 juta/bulan atau 972 juta/tahun atau 3,6 juta/orang/tahun. Sementara hasil survei yang dilakukan KASBI Agustus-November 2005 kebutuhan untuk buruh lajang adalah Rp. 1.450.000

(Dokumentasi Investigasi KASBI Banten 2005-2006)

Contoh 2. Perusahaan garmen di Kawasan Industri Bunder Tangerang, yang memproduksi pakaian jadi merk GAP, modal PMDN, dengan jumlah buruh 1100 orang, (80% perempuan), dengan status tetap 400 orang, 700 orang kontrak langsung.

Keterangan	**Buruh Tetap**	**Buruh Kontrak**	**Buruh *Outsourcing***
Jumlah Buruh	400 orang	700 orang	
1. Pola Perekrutan			
Pola perekrutan dan syarat-syarat	Test langsung di PT	Test langsung di PT	
Biaya	Tidak dipungut biaya	Tidak dipungut biaya	
2. Upah & Tunjangan			
➢ Upah pokok	Rp. 800.000,- (Rp. 26.666 x jumlah hari/bulan)	Rp. 693.500,- (Rp. 26.666 x jumlah hari/bulan, dipotong hari minggu tidak dibayar)	
➢ Transportasi	Bis jemputan	Bis jemputan	
➢ Uang makan	Rp. 2.000,-/hari	-	
➢ Uang Shif	Rp. 1.500 – 2.500/ hari Rp. 2.000x13=Rp.26.000 (rata-rata)	-	
➢ Upah lembur	Rp. 4.624/jam berjalan (jam 1:1.5x, jam ke-2 s.d ke-7 x 2, jam ke-8 dst x 3	Rp. 4.624/jam mati dan terbatas 4 jam/hari	
Total Upah/bulan tanpa lembur	**Rp. 878.000,-**	**Rp. 693.500,-**	
Selisih upah kotor tanpa lembur	**Rp. *184.000,-***	**(Rp. *184.000,-*)**	
3. Hak Cuti	Ada	Tidak ada	
Tahunan, hamil, haid	Cuti hamil untuk buruh perempuan diberikan 3 bulan dengan upah penuh	Buruh perempuan dilarang hamil atau kalau hamil diputus kontraknya.	
4. Jaminan Kepastian dan kemanan kerja			
➢ Jamsostek	Paket A (JHT,JKK,JK) (Paket B JPK)	Tidak ada perlindungan	
➢ THR	1-3thn 1 x 1 bulan upah 3-4thn 1 x 1.2bulan upah 8-9thn 1 x 1.7bulan upah (variasi sesuai masa kerja)	Tidak ada	
➢ Masa kerja dan hak pesangon	Tetap bila di PHK dapat pesangon rata-rata 2xPMTK. (direkrut sebelum 2002)	Tidak ada jaminan atau perlindungan. 6bulan-2tahun dan dapat dipecat kapan saja tanpa harus bayar pesangon. (direkrut mulai 2002)	
5. Hak berserikat	Ada SB Buruh mendirikan SB	Buruh takut bergabung ada ancaman di putus kontraknya	

Keterangan: Dari data di atas, sesungguhnya pengusaha sudah melanggar undang-undang, yaitu mempekerjakan buruh kontrak dan *outsourcing* pada produksi utama. Hak buruh yang dicuri dengan dalih efisiensi melalui Fleksibilitas buruh kalau dihitung dari upah 700 orang buruh saja lebih dari 129.150.000,- juta/bulan atau 1.549.800,- /tahun atau 2.214.000,- juta/orang/tahun. Sementara hasil survei KASBI Agustus-November 2005 kebutuhan untuk buruh lajang adalah Rp. 1.450.000

Dari kedua contoh di atas, bagaimana sistem kerja kontrak dan *outsourcing* sangat merugikan buruh.

Praktik buruh kontrak maupun outsourcing merupakan bagian terkecil dari skema neoliberalisme. Skema tersebut tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi melanda di berbagai negara.

B. Privatisasi: Beban Lain yang Harus Ditanggung

Aneh, bila negeri yang kaya raya dengan sumberdaya alam, tapi rakyatnya menderita kelaparan, busung lapar, lumpuh layu dan penyakit kekurangan gizi lainnya. Tentu rakyat tidak ingin semuanya diberikan gratis, tetapi akses terhadap kesejahteraan seperti pangan hanya akan didapat lebih manusiawi, jika ada lapangan pekerjaan dengan upah yang layak dan berhari depan. Artinya, upah yang cukup untuk kebutuhan fisik, mental, sosial dan keluarganya.

Hal tersebut diperparah dengan buruk dan mahalnya pelayanan kesehatan. Kampanye tentang subsidi keluarga miskin ternyata ilusi, karena tidaklah mudah bagi rakyat miskin untuk dapat memanfaatkan. Sudah menjadi rahasia umum terkait dengan korupsi birokrasi sampai level pemerintahan terendah. Ditambah lagi, akses pendidikan yang mahal dan tidak bermutu. Adanya BOS (Bantuan Operasional Sekolah), juga ilusi, karena pendidikan tetap mahal bagi rakyat, apalagi di perguruan tinggi. Barang-barang publik telah lari dari *khitoh*-nya, dari pelayanan sosial menjadi *bussines oriented*.

Pemerintah menganggap subsidi untuk pendidikan, kesehatan dan kebutuhan publik lainnya sebagai beban anggaran. Karena itu, dijalankan pula proyek privatisasi. Privatisasi telah memperparah penderitaan rakyat.

III. PEMBERANGUSAN SERIKAT[148]

"Seratusan buruh PT Audio Sumitomo Techno Indonesia berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Semarang, Senin (11/5). Mereka menggelar aksi solidaritas mendukung 6 buruh yang dipecat perusahaan. Penyelesaian kasus pemecatan terhadap buruh PT AST Indonesia karena mendirikan serikat pekerja ini mencuat beberapa waktu lalu." http://www.vhrmedia.com/Buruh-PT-Sumitomo-Demo-PN-Semarang-berita1294.html

"Sekarang sekitar 200 pekerja masih terkatung-katung nasibnya, sebanyak 56 pekerja diantaranya terancam kehilangan pekerjaan, sebab sudah masuk pengajuan PHK. Bahkan, satu pekerja telah memasuki proses pemberhentian lantaran manajemen perusahaan tidak menyambut baik kehadiran serikat pekerja di lingkungan pabrik." Jurnal Bogor, 26 Mei 2009

"Menurut hakim, aksi unjuk rasa pegawai Bank Mandiri sudah menunjukkan itikad untuk menurunkan nama baik bank milik pemerintah itu. Hakim mengabulkan

[148] Judul asli, *Perjuangan (Panjang) Melawan Union Busting Di Indonesia: Catatan Komite Solidaritas Nasional,* disumbangan oleh KASBI.

permohonan PHK perusahaan kepada pengurus serikat pegawai Bank Mandiri. Lagi, Pengadilan Sahkan Tindakan Anti Serikat Pekerja." www.hukumonline.com

"Koordinator aksi mogok massal Serikat Pekerja PT Angkasa Pura (AP) I Bandara Sepinggan Balikpapan menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK). "Kemarin Arif menerima surat PHK karena dianggap melakukan pelanggaran disiplin berat," ujar Rian, koordinator pengganti aksi mogok massal di Bandara Sepinggan Balikpapan. Selain Arif, 7 orang pengurus DPP dan DPC SP AP I juga menerima skrosing selama 3 bulan yang disertai dengan pengurangan upah." Koordinator Aksi Mogok AP I Kena PHK, http://news.okezone.com

Kumpulan petikan berita di atas kian menguatkan lonceng tanda bahaya bagi kaum buruh. Sungguh ironis, memang. Sejak Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh disahkan, korban pemberangusan serikat buruh (union busting) justru terus berjatuhan.

Ambil contoh, pengalaman Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Pada 2006, pengurus dan anggota serikat buruh di PT ISI, PT SM Global, PT Panah Forest Perkasa, PT EJP, dan lain-lain di Tanggerang yang berafiliasi dengan KASBI, diberangus secara serentak. Begitu juga dengan aktivis serikat buruh PT Istana Magnoliatama.

Hal serupa, terjadi pada aktivis Serikat Buruh Karya Utama (SBKU) Tanggerang. Belasan pengurus SBKU langsung dipecat beberapa hari, setelah mereka memberitahu manajemen telah mendirikan serikat buruh. Pemberangusan yang sama juga dialami pengurus dan anggota FNPBI PT Katexindo KBN Cakung.

Kejadian yang sama, menimpa pengurus dan anggota GSPB PT Traya, Tambun Bekasi Jawa Barat. Lalu, pemecatan pengurus PT Hancang Tangerang. Mutasi dan pemecatan pun dialami pengurus SP Transportasi Pusat Blue Bird Grup dan Ketua SP PT Bank Lippo Karawaci.

Pemberangusan pun merambah ke sektor-sektor lainnya, seperti yang dialami pengurus Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Melia (Kuningan, Jakarta) yang berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM). *Union Busting* lainnya menimpa pengurus Safari Garden Hotel Bogor, PT Karung Nasional, dan pengurus SP LIA Teacher Association (LIATA).

Union busting juga dialami sektor media. Berdasarkan catatan Komite Solidaritas Nasional (KSN), *Union busting* di sektor ini sudah terjadi sejak 2002. Mulai dari yang dialami Serikat Pekerja Antara, Serikat Pekerja Jakarta News FM, hingga Perkumpulan Karyawan Warta Kota (PKWK). Akhir 2007 silam, *union busting* menimpa Sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK), Bambang Wisudo. Ia dimutasi ke Ambon, tak lama setelah PKK menuntut dikembalikannya saham karyawan.

Untuk memangkas kekuatan Serikat Karyawan Indosiar, yang tengah menuntut perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), manajemen Indosiar memecat ratusan karyawan dengan status kontrak. Di harian Suara Pembaruan,

sejumlah jurnalis yang menjadi pengurus serikat pun diturunkan jabatan dan diturunkan gajinya.

Dari hari ke hari, kisah dan angka kasus union busting terus membengkak tanpa mengenal batas sektor. Tren yang makin meningkat juga dialami serikat di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Serikat Pekerja Angkasa Pura I dan Serikat Pegawai Bank Mandiri, misalnya.

A. Mengenali Pola Union Busting

1. Keterlibatan negara

a. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
   - Undang-undang ini sengaja dilabeli secara berbeda: serikat pekerja dan serikat buruh. Tujuannya adalah untuk mengkotak-kotakkan antara pekerja dan buruh.
   - Kemudahan untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh dengan jumlah minimal 10 orang. Pada praktiknya, kemudahan membentuk serikat menjadi jalan untuk menciptakan serikat tandingan.

b. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)
   Undang-undang ini memuat satu klausul khusus tentang perselisihan antar serikat, sehingga membuka peluang bagi pengusaha untuk menciptakan serikat tandingan. Kerap terjadi serikat ini diadu domba, sehingga serikat akan berkonsentrasi dalam perselisihan antarserikat ketimbang fokus pada perjuangan organisasi.

2. Menghalang-halangi buruh untuk bergabung di dalam serikat

Sering ditemui, manajemen melarang buruhnya untuk bergabung di dalam serikat. Selalu dipropagandakan serikat tukang menuntut, membuat hubungan kerja tidak harmonis, dan lain sebagianya. Intinya, pengusaha mau bilang, serikat buruh adalah perongrong perusahaan.

3. Mengintimidasi

Jika penghalang-halangan tidak berhasil, upaya lanjutan yang sering dilakukan adalah mengintimidasi atau menakut-nakuti buruh. Saat bergabung dalam serikat, buruh diancam tidak mendapatkan promosi, tidak naik gaji, tidak mendapatkan bonus, tunjangan, tidak naik pangkat, diputus kontrak kerjanya, dan lain sebagainya. Bahkan dijumpai pula ada perusahaan yang menggunakan aparat kepolisian untuk menakut-nakuti pekerjanya di bagian *security* agar tidak bergabung menjadi anggota serikat.

4. Memutasi pengurus atau anggota serikat

Untuk memecah kekuatan serikat, sering pula dilakukan tindakan mutasi atau pemindahan kerja secara sepihak. Kasus semacam ini umumnya dilakukan ketika

serikat sedang memperjuangkan hak-hak buruh. Tidak tanggung-tanggung, kadang mutasi dilakukan hingga ke luar pulau. Tujuannya jelas, selain untuk melemahkan serikat, juga menghancurkan mental buruh. Karena, ia akan jauh dengan keluarganya.

5. Surat Peringatan

Surat peringatan tergolong sebagai sanksi ringan. Tujuannya agar aktivis serikat tidak lagi bergiat dalam membela kepentingan anggotanya. Jika surat peringatan diabaikan, biasanya pengusaha akan meningkatkan sanksinya menjadi skorsing, bahkan PHK.

6. Skorsing

Skorsing kerap diberikan kepada aktivis sebagai peringatan atas kegiatan serikat. Jika skorsing diabaikan, lazimnya pengusaha akan meningkatkan sanksinya menjadi PHK.

7. Memutus hubungan kerja

Ini cara lama tapi masih menjadi tren. Anggota serikat yang sering menjadi korban dari modus ini adalah yang berstatus buruh kontrak . Dengan risiko hukum kecil dan biaya murah (tidak perlu mengeluarkan pesangon besar), tindakan ini kerap dijadikan pilihan favorit pihak manajemen. Dampaknya, buruh tidak berani lagi untuk bergabung dalam serikat dan lambat-laun serikat pun menjadi gembos.

8. Membentuk serikat boneka

Upaya ini dilakukan untuk menandingi keberadaan serikat buruh sejati. Tujuannya agar buruh menjadi bingung, mau memilih serikat yang mana. Serikat boneka ini umumnya dikendalikan penuh oleh manajemen, termasuk orang-orang yang menjadi pengurusnya. Cara mengenali serikat model ini sangat gampang. Biasanya mereka mendapatkan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, sementara serikat sejati selalu dihambat saat akan melakukan aktivitas. Tak terkecuali tidak mendapatkan ijin untuk melakukan rapat di kantor. Pada beberapa kasus, serikat tandingan hanya dibentuk untuk menghancurkan serikat yang ada. Setelah serikat tandingan selesai merekrut anggota, pengurusnya akan meninggalkan organisasi. Anggota yang ada di serikat tandingan ditinggalkan begitu saja dan kebingungan menentukan arah. Sementara serikat yang lama bisa jadi sudah mati suri ditinggalkan anggotanya.

9. Membentuk pengurus tandingan dalam serikat yang sama

Melakukan kudeta terhadap kepengurusan yang sah menjadi jalan untuk menggembosi serikat daripada membentuk serikat tandingan. Pada umumnya, upaya kudeta diawali dengan sebuah pencitraan negatif tentang figur ketua atau pengurus yang dilakukan secara intens dan terstruktur sehingga anggota percaya terhadap pencitraan tersebut. Setelah itu, direkayasa agar anggota meminta sebuah musyawarah luar biasa untuk mengganti ketua dengan ketua yang baru.

Setelah sang ketua baru terpilih, pada umumnya tidak banyak yang dia lakukan karena misinya adalah mengganti ketua yang lama. Upaya kudeta bisa juga digagalkan jika sistem organisasi sudah berjalan dengan baik. Pengurus yang tersisa dengan dibantu oleh pengurus cabang/PUK lainnya dapat melakukan perlawanan, antara lain dengan cara memproses kudeta yang dilakukan ke kantor Disnaker setempat sehingga muncul fatwa tentang ketua yang sah.

10. Menolak diajak berunding PKB

Saat diajak berunding, pengusaha berdalih macam-macam. Kadang pengusaha beralasan mau mengecek dulu apakah anggota serikat sudah memenuhi syarat 50%+1 dari total karyawan, kadang malah tidak mau berunding karena di dalam perusahaan terdapat dua serikat buruh. Padahal kita tahu serikat yang satu adalah serikat boneka yang selalu membeo kepada pengusaha. Semua itu bertujuan agar buruh tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

11. Tidak mengakui adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah salah satu alat dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan bermartabat. Bagi serikat, PKB adalah goal dari perjuangan membela hak dan kepentingan anggota. Langkah Pengusaha mengabaikan PKB dimaksudkan untuk meniadakan peranan serikat. Pada beberapa kasus, pengusaha melakukan penggantian PKB dengan Peraturan Perusahaan (PP) secara sepihak walaupun di perusahaan tersebut masih ada serikat buruh yang sah. Secara hukum langkah Pengusaha tersebut merupakan pelanggaran Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

12. Membuat peraturan perusahaan sepihak

Walaupun sudah ada serikat pekerja, tapi tidak diakui keberadaannya. Bahkan, kalau perlu pengusaha membuat pernyataan palsu kepada Dinas Tenaga Kerja bahwa di perusahaannya tidak terdapat serikat buruh. Dengan demikian, peraturan perusahaan pun langsung disahkan dan diberlakukan.

13. Tidak memberikan pekerjaan

Salah satu upaya untuk meneror aktivis serikat secara mental adalah tidak memberi pekerjaan. Tetapi buruh tersebut harus tetap datang ke kantor dan mengisi daftar absensi. Memang upahnya selaku buruh tetap dibayarkan. Hal ini, tentunya menimbulkan konflik pribadi dirinya dengan sesama buruh. Seringkali aktivis serikat menjadi merasa terkucil karena kawan-kawan di lingkungannya sibuk bekerja, sementara ia hanya duduk diam. Cara ini lazimnya digunakan untuk membuat aktivis serikat merasa frustasi. Sehingga tanpa diminta dia akan berhenti/mengundurkan diri.

14. Mengurangi hak/kesempatan

Salah satu pola yang juga sering diterapkan adalah tidak memberikan hak-hak kedinasan kepada buruh yang menjadi pengurus atau aktivis serikat. Jika ada 2 orang yang posisi pekerjaannya sama, seringkali buruh yang menjadi

pengurus/aktivis serikat tidak menerima hak/tunjangan kedinasan yang diperoleh buruh lainnya yang tidak menjadi pengurus serikat. Pengusaha kemudian membuat aturan khusus yang merupakan pembenar kenapa posisi pekerjaan buruh yang pengurus serikat tidak mendapat tunjangan seperti posisi lainnya yang setara dengannya.

15. ”Promosingkir”

Karena pada dasarnya buruh bekerja untuk mencapai karir terbaik, Pengusaha memberikan kesempatan promosi pada posisi terbaik kepada pengurus serikat sebagai iming-iming. Umumnya pengurus atau aktivis yang mendapatkan promosi mendadak dengan fasilitas yang menggiurkan merasa tidak enak hati mendapat promosi dari pengusaha sehingga diharapkan daya juangnya menurun..

16. Kriminalisasi

Dalam menjalankan kegiatan serikat, sering ditemukan kasus di mana pengurus atau aktivis serikat dilaporkan pengusaha kepada Kepolisian. Pasal-pasal yang kerap dituduhkan pada pengurus serikat adalah ”pasal karet/pasal sampah dalam KUHP”, antara lain pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah. Kasus ini diperparah dengan belum adanya unit khusus di Kepolisian yang menangani masalah perburuhan. Sehingga penyelesaian masalahnya bergantung pada penyidik pada direktorat/unit yang menangani.

17. Mengadu domba buruh

Buruh mudah sekali diadu domba satu sama lain. Pengusaha melemparkan berbagai isu mulai dari isu kesejahteraan hingga *negative campaign* yang mengesankan bahwa serikat telah dibawa ke arah yang salah. Sehingga, buruh mengalami kebingungan. Dari kondisi ini diharapkan muncul suatu kondisi ketakutan, yaitu takut ’terbawa-bawa’ dan rasa apatis untuk tidak lagi berjuang melalui organisasi.

18. Doktrin antiserikat dipelajari juga khusus oleh Pengusaha

Bukan hanya buruh yang bersatu. Pengusaha juga bersatu melalui berbagai forum. Untuk pengusaha swasta dikenal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sementara untuk direksi BUMN muncul Forum Komunikasi Direksi BUMN. Jika buruh bersatu untuk memikirkan berbagai strategi mendapatkan hak anggotanya, maka pengusaha pun pada umumnya memikirkan strategi apa yang tepat untuk menghancurkan serikat di perusahaannya. Keberadaan serikat yang kuat menjadi ancaman bagi pengusaha karena buruh tidak mudah lagi dibohongi dan ditindas. Melihat maraknya praktik *union busting* serta adanya kesamaan jenis yang diterapkan, bukan tidak mungkin pengusaha mempelajari secara khusus strategi *union busting*. Ditambah dengan kemudahan fasilitas, pengusaha tidak mengalami kesulitan untuk menggelar berbagai pertemuan.

19. Menyewa preman untuk meneror

Upaya intimidasi terhadap pengurus tidak berhenti sampai dengan PHK, skorsing, surat peringatan, kriminalisasi, tidak dipekerjakan atau pengurangan hak. Pada tingkatan yang lebih ekstrem, penindasan terhadap aktivis serikat bisa juga berupa pelibatan preman untuk melakukan kekerasan fisik. Hal ini dimaksudkan untuk membuat pengurus atau aktivis serikat jera dan tidak lagi bergiat dalam kegiatan serikat. Dalam sidang di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) misalnya, pernah ada pengusaha yang membawa tukang pukul untuk menakuti-nakuti buruh yang berperkara.

20. Serikat yang ada *yellow union,* ketika buruh membentuk serikat baru, pengusaha tidak mau mengakui keberadaan serikat baru

Pada kasus tertentu, serikat yang sudah terbentuk merupakan *yellow union,* yaitu serikat yang tidak berpihak pada hak dan kepentingan buruh dan cenderung berpihak kepada pengusaha. Kemudian, buruh yang lain menyadari hal tersebut dan membentuk serikat baru yang berorientasi pada hak dan kepentingan buruh. Namun pengusaha menisbikan keberadaan serikat tersebut dengan jalan tidak mengakui keberadaannya.

21. Politisasi

Pengusaha bisa saja melibatkan partai politik untuk membungkam gerakan buruh. Tidak jarang dengan mengatasnamakan partai politik tertentu sebagai "*beking"* dimaksudkan untuk membuat buruh takut.

22. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Privatisasi BUMN menjadi salah satu upaya untuk menggembosi serikat karena melalui cara ini bisa jadi terjadi perubahan kepemilikan perusahaan. Dengan demikian, patut diwaspadai apakah pemilik baru tetap akan peduli dengan adanya serikat. Belum lagi adanya ancaman perubahan status pegawai dari pegawai tetap menjadi kontrak maupun *outsorcing* yang akan melemahkan serikat.

23. Pengurus serikat diikutkan dalam pelatihan khusus (seperti Lemhanas) untuk diberikan doktrin khusus

Ada kasus tertentu dimana ketua atau pengurus serikat diikutkan oleh pengusaha dalam pelatihan khusus, seperti Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), dengan maksud untuk memberi doktrin khusus agar mengalami disorientasi terhadap perjuangan serikat.

24. Lempar tanggung jawab antara Menteri Tenaga Kerja dan Menteri BUMN

Pada serikat BUMN, kerap terjadi pembiaran atas kasus-kasus ketenagakerjaan oleh Menteri BUMN. Kalau pun Menteri Tenaga Kerja peduli, tetap saja penyelesaian masalahnya bergantung pada Menteri BUMN.

25. Perubahan status dari buruh tetap menjadi buruh kontrak/outsorcing

Dalam perkembangan terkini, sistem kerja kontrak dan outsourcing juga menjadi cara untuk memberangus serikat buruh. Perubahan status kerja ini menjadikan seorang buruh memiliki kesulitan untuk berorganisasi karena hubungan kerja menjadi bersifat hubungan individual dan bukan lagi hubungan kolektif. Kondisi ini pada akhirnya melemahkan buruh dan serikat buruh.

B. Mengapa melakukan *union busting*?

Alasan mendasar mengapa perusahaan dan pengusaha melakukan union busting, karena mereka menganggap serikat bisa berpengaruh buruk bagi kelangsungan bisnis. Tuntutan serikat akan upah yang layak, kondisi dan keselamatan kerja yang sehat, dan peningkatan kesejahteraan bagi buruh merupakan hal yang merugikan bagi perusahaan karena perusahaan tidak lagi dapat mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan buruh. Pendeknya, keberadaan serikat buruh mengganggu keleluasaan perusahaan dan pengusaha untuk membayar upah kaum buruh semurah-murahnya dan menelantarkan nasib kaum buruh.

Di Indonesia, setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, maka setiap tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *union busting* adalah merupakan tindak pidana yang dapat dihukum. Pasal 43 dalam undang-undang ini menyatakan:

1. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

C. Melawan *Union Busting*

Kebebasan berserikat adalah perubahan yang paling signifikan dalam tonggak sejarah perjuangan serikat buruh di Indonesia. Melalui ratifikasi Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi pada 9 Juni 1998, jaminan kepada buruh akan kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi, demi kemajuan dan kepastian dari kepentingan-kepentingan pekerjaan mereka, tanpa sedikitpun ada keterlibatan negara dilindungi secara internasional. Jaminan kebebasan ini meliputi:

1. Kebebasan mendirikan organisasi tanpa harus meminta persetujuan dari institusi publik yang ada, tidak adanya larangan untuk mendirikan lebih dari satu organisasi di satu perusahaan, atau institusi publik, atau berdasarkan pekerjaan, atau cabang-cabang dan kegiatan tertentu ataupun serikat pekerja nasional untuk tiap sektor yang ada.
2. Kebebasan untuk bergabung dengan organisasi yang diinginkan tanpa mengajukan permohonan terlebih dahulu.

3. Kebebasan mengembangkan hak-hak di atas tanpa pengecualian apapun, dikarenakan pekerjaan, jenis kelamin, suku, kepercayaan, kebangsaan dan keyakinan politik.

Konvensi ILO No. 87 ini juga menjamin perlindungan bagi serikat buruh untuk:

1. Bebas menjalankan fungsi organisasi, termasuk untuk melakukan negosiasi dan perlindungan akan kepentingan-kepentingan pekerja.
2. Menjalankan AD/ART dan aturan lainnya, memilih perwakilan mereka, mengatur dan melaksanakan berbagai program aktivitasnya.
3. Mandiri secara finansial dan memiliki perlindungan atas aset-aset dan kepemilikan mereka.
4. Bebas dari ancaman pemecatan dan skorsing tanpa proses hukum yang jelas atau mendapatkan kesempatan untuk mengadukan ke badan hukum yang independen dan tidak berpihak.
5. Bebas mendirikan dan bergabung dengan federasi ataupun konfederasi sesuai dengan pilihan mereka, bebas pula untuk berafiliasi dengan organisasi pekerja internasional. Bersamaan dengan itu, kebebasan yang dimiliki federasi dan konfederasi ini juga dilindungi, sama halnya dengan jaminan yang diberikan kepada organisasi pekerja.

Dengan adanya jaminan hukum yang diberikan oleh UU No 21/2000 dan Konvensi ILO No. 87, harusnya praktik *union busting* sudah lenyap dari bumi Indonesia. Namun, pada kenyataannya hal yang sebaliknya justru terjadi. Praktik *union busting* semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan. Mengapa hal ini terjadi?

Pembiaran dan keberpihakan pada pengusaha merupakan kata kunci untuk menjawab mengapa *union busting* masih terus terjadi. Pembiaran dan keberpihakan pada pengusaha ini dilakukan oleh negara melalui berbagai institusinya. Institusi tersebut di antaranya adalah:

1. Presiden. Sebagai kepala pemerintahan, presiden seharusnya mengupayakan agar seluruh aparat pemerintahannya melaksanakan amanat undang-undang dan menegakkan hak konsitusional kaum buruh untuk berserikat dan memperoleh kesejahteraan.
2. Mahkamah Agung. Insitusi ini cenderung lamban dan tidak memiliki keberpihakan pada kaum buruh. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyak kasus *union busting* dan kriminalisasi kaum buruh yang menumpuk dan tak terselesaikan dan kalau pun terselesaikan, lebih banyak kaum buruh yang dikalahkan.
3. DPR. Dewan terhormat yang harusnya menjadi pengemban amanat rakyat cenderung lalai dalam melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang dan mendengar aspirasi kaum buruh.
4. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (depnakertrans). Sebagai institusi yang melakukan pengawasan, depnakertrans cenderung lalai melakukan tugas

pengawasannya dan tidak bersikap proaktif dalam mengupayakan penghentikan praktik *union busting* di Indonesia.

5. Kepolisian. Kepolisian yang seharusnya menjadi ujung tombak penegakan hokum, apabila terjadi kasus *union busting* cenderung bergerak lamban dan tutup mata terhadap kasus-kasus union busting.

Upaya yang harus dilakukan oleh kaum buruh untuk menegakkan kebebasan berserikat tidak lain adalah dengan melakukan desakan pada institusi-institusi tersebut di atas. Berkumpul, berdiskusi, menggalang persatuan kaum buruh, melakukan aksi, demonstrasi dan pemogokan adalah jalan yang harus dilakukan oleh kaum buruh untuk merebut kembali hak dan kebebasan yang selama ini telah dinjak-injak oleh perusahaan dan pengusaha.

Penutup

Fleksibilitas tenaga kerja dan agenda neoliberal lainnya bukanlah jawaban bagi rakyat. Jelas bahwa sistem kerja kontrak dan *outsourcing* harus dicabut. Namun saat ini negara belum mampu dalam menyediakan lapangan kerja yang layak dan bermartabat untuk rakyat dan politik upah murah masih tetap diterapkan sebagai faktor penarik investasi. Juga, begitu banyak masalah yang tidak akan mampu diselesaikan oleh pemerintah yang tunduk atau jadi boneka dari pada kapitalisme global. Sekali lagi yang menjadi korban tetaplah rakyat di lapisan bawah seperti, buruh, tani, nelayan, miskin kota, miskin desa, perempuan dan rakyat tertindas lainnya. Jadi, masalah pokok kita hari ini adalah penjajahan gaya baru (neoliberalisme), yang masuk melalui pemerintah kita dengan melakukan deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi.

Lalu Apa solusinya?, Masalah ketersediaan lapangan kerja yang layak dan bermartabat sangatlah penting. Bagaimana mewujudkannya? Kita harus kembali pada konstitusi kita, bagaimana bunyi pasal 27 ayat 2 tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak dan pasal 33 tentang sumber daya alam yang mengusai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu kita harus mengoreksi banyak kebijakan yang keblinger hanya tunduk pada kapitalisme global yang sudah terbukti menyengsarakan rakyat. Pelajaran penting yang pernah dilakukan serikat-serikat buruh bersama LSM ketika mengajukan *Judicial review* terhadap UUK No. 13 Tahun 2003, subkontrak atau outsourcing tidak dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bagaimana kuatnya cengkeraman modal asing yang mungkin sudah masuk ke semua sendi-sendi pemerintahan, bahkan kampus-kampus. Berikut tawaran solusi yang sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah dengan dukungan penuh rakyat.

Sistem kerja kontrak dan *outsourcing* yang merupakan sebagian dari praktik Labor Market Flexibilty (LMF). LMF merupakan paket dalam program neoliberalisme. Neoliberalisme telah menghancurkan kekuatan produktif di Indonesia. Karena itu, mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak serta kepastian kerja tidak hanya menjadi masalah di sekitar perusahaan saja.

Tipikal serikat buruh yang hanya berbasis pada kekuatan buruh tetap dan formal, sedikit demi sedikit akan tergerus dengan maraknya buruh kontrak dan *outsourcing*. Karena itu, harus mulai dipikirkan bagaiman mengorganisir buruh kontrak dan *outsourcing*. Paling tidak, serikat harus memastikan bahwa para buruh tetap tidak akan digantikan oleh buruh tidak tetap. Sebagai contoh, serikat buruh dapat menuntut kepastian kerja dalam kesepakatan bersama dengan manajemen perusahaan.

Penindasan dan penghisapan yang semakin menghebat tidak akan terselesaikan dengan model advokasi konvensional. Setiap advokasi harus berupaya melibatkan kepentingan buruh kontrak dan *outsourcing*, kepentingan buruh sebagai warga negara. Advokasi harus melibatkan kerjasama antarserikat dan antargerakan sosial. Mengatasi fragmentasi antarserikat buruh maupun antargerakan social, merupakan pekerja sulit namun harus dilakukan (Fauzi Abdullah, 2003). Kampanye secara luas –dengan partisipasi dari gerakan petani, gerakan perempuan, gerakan pemuda dan mahasiswa dan gerakan-gerakan masyarakat kelas menengah– untuk menentang fleksibilisasi tenaga kerja dan seluruh kebijakan globalisasi neoliberalisme. Selain itu:

1. Indonesia harus berani untuk tidak membayar utang luar negerinya. Tentu kita akan butuh dana yang besar untuk dapat bangkit dan membangun. Tapi bukan utang atau bergantung pada Kapitalisme Global semacam IMF, World Bank dan lainnya. Indonesia harus berani untuk menolak utang dan berani menolak bayar utang. Dana APBN yang 40-an % untuk bayar utang harusnya dapat kita untuk dana pembangunan yang berpihak pada rakyat. Berani merancang sendiri kemandirian bangsa.
2. Pemberantasan korupsi dan sita harta para koruptor, kemanapun para koruptor harusnya dikejar dan dipakai untuk dana pembangunan prorakyat. Bukan pemberantasan korupsi yang tebang pilih sekedar untuk terlihat bahwa seakan-akan sudah dilakukan tindakan pemberantasan korupsi.
3. Bangkit dan membangun industrialisasi nasional yang kuat dari hulu ke hilir. Menyiapkan pertanian dan perkebunan untuk bahan-bahan mentah industri, baik pangan maupun bahan industri lainnya. Memberikan petani tanah garapan secukupnya, memberikan upah layak secara nasional. Kita tidak boleh tergantung pada bahan mentah yang tidak mampu kita tanam. Contohnya gandum, maka harus dicari alternatifnya. Industri permesinan tepat guna harus dibangun untuk membuat alat produksi baik, yang diperlukan oleh pertanian maupun mesin-mesin industri sesuai kebutuhan. Agar kita tidak tergantung pada industri mesin dan komponen asing yang kita impor seperti saat ini. Berdayakan para ahli atau pakar kita untuk berkarya demi kemajuan bangsa dan negara, tidak lagi mengusir dengan tidak memberi ruang untuk berkarya. Mengamankan pasar dari pasar bebas (produksi asing), ke pasar dalam negeri di mana jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar adalah pasar mandiri yang potensial.
4. Pabrik-pabrik yang tutup atau pengusahanya yang pura-pura bangkrut harus diambil alih oleh negara bersama serikat buruh atau koperasi buruh selain

untuk menyelamatkan pekerjaan para buruh yang sudah bekerja tahunan sampai puluhan tahun, sebagai langkah awal pembelajaran kemandirian rakyat dan negara. Dan kita harus berani untuk mengambil alih atau menasionalisasi industri yang vital macam pertambangan, energi, dan mineral. Hal ini harus berani kita lakukan karena sudah terlalu banyak para penjajah baik jaman Belanda maupun jaman sekarang, seperti PT Freeport, Inco, Kaltex, Exxon, dan sebagainya.

Beberapa tawaran solusi diatas tidaklah akan dijalankan oleh pemerintah yang pro-modal (pro-pasar) atau pemerintah yang anti terhadap rakyat. Maka harus disadari bahwa akses pangan, akses terhadap pekerjaan adalah perjuangan yang tidak mudah tetapi perlu ada tindakan konkrit baik secara politik maupun ekonomi. Agar kaum buruh dan mayoritas rakyat Indonesia mulai sadar akan hak politiknya dan mempersiapkan diri untuk berkuasa.

Dialog

Awal 2009 Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 4,5 persen. Estimasi tersebut muncul karena konsumsi masyarakat dan pemerintah masih melambat, sementara angka ekspor dan impor mengalami stagnasi. Beberapa sektor industri, terutama garmen dan tekstil mengaku terpukul, karena berhentinya order dari pasar internasional, menurunnya permintaan dan berkurangnya kapasitas produksi. Di tengah hitungan matematis-ekonomis, terhembus upaya untuk mengurangi hak-hak buruh.

Seperti diungkapan berbagai media massa pada akhir 2008 lalu, krisis finansial akan menyebabkan jutaan buruh ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Ancaman PHK begitu *getol* diungkapkan oleh kalangan pengusaha dan pemerintah daerah. Beberapa pengamat perburuhan menduga bahwa ada "sesuatu" di balik ungkapan para pengusaha tersebut. Fauzi Abdullah misalnya, dalam sebuah diskusi mengungkapkan krisis keuangan global memukul sisi permintaan jadi tidak logis kalau ada PHK. Sementara beberapa serikat buruh menduga bahwa krisis keuangan global akan dimanfaatkan pengusaha untuk mem-PHK buruh tetap dan merekrut buruh kontrak.

Pada semester II 2009, LIPS melakukan wawancara bersama dua orang pimpinan serikat buruh: Rudy HB Daman dan Sumiyati. Wawancara berkenaan dengan dampak krisis keuangan global terhadap buruh dan prospek gerakan serikat buruh di bawah kepemimpinan SBY-Boediono. Wawancara dilakukan oleh Syarif Arifin dan Angga Natariandi.

adalah Wakil I Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) PT Frans Putratex Serang Banten. Pada saat dilakukan wawancara Sumiyati adalah korban PHK di perusahaan yang mengaku terdampak krisis finansial global. PT Frans Putratex mengatasi penurunan kapasitas produksi hingga 30 persen dengan mem-PHK 73 orang buruhnya, yang notabene pengurus serikat. Bahkan, salah satu tim advokasinya diseret ke pengadilan dengan tuduhan telah menggelapkan uang koperasi karyawan.

SUMIYATI:

"Perusahaannya berusaha untuk menyingkirkan SP"

Jika Anda membuka situs resmi PT Frans Putratex di:www.putratex.com, kemudian klik saja di bagian *Aboutus*, maka akan tampil gambar beberapa orang yang sedang tersenyum: lelaki dan perempuan. Perempuan paling depan itulah yang bernama Sumiyati. Sumiyati bersama ke-72 temannya telah dipecat secara sepihak. Sumiyati adalah istri Maya Agung Dewandaru. Agung divonis bersalah telah menggelapkan uang koperasi karyawan, yang rencananya akan dijadikan dana advokasi PHK. Waktu itu, perusahaan tekstil PT Frans Putratex di Serang Banten mengaku mengalami penurunan produksi akibat krisis keuangan global. Daripada merugi, maka perusahaan mengeluarkan kebijakan untuk memecat 73 orang buruhnya. Sumiyati, Agung dan bersama teman-temannya segera menanggapi rencana perusahaan dengan mengirimkan surat berunding ke perusahaan. Tidak lupa, ia juga mengonsolidasikan serikatnya, Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) PT Frans Putratex.

Di tengah usaha untuk perundingan, ternyata perusahaan bergerak lebih cepat. Akhirnya, Sumiyati, yang waktu itu adalah Wakil Ketua I PSP SPN PT Frans Putratex dan teman-teman serikatnya, yang kebetulan bekerja di PT Frans Putratex menerima surat anjuran PHK dari Dinas Tenaga Kerja Serang.

Wawancara ini menuturkan bagaimana Sumiyati di-PHK, perusahaan merekrut buruh kontrak dan apa yang dapat dilakukan serikat ke depan.

LIPS: Bagaimana Anda di-PHK?

Sumiyati: Awal hubungannnya (relasi antara serikat dan manajemen) cukup baik, ini "kecenderungan" ketika serikat memiliki daya tawar yang sudah bagus. Tapi saat terjadi krisis, perusahaan berusaha mencari celah untuk melakukan *union busting*. Dulu Citra Sugih (sebuah perusahaan di Serang Banten, red) juga terkena *union busting*. Para pengurusnya, yang melakukan aksi, dianggap ilegal karena syarat untuk berdemo yang tidak terpenuhi

LIPS: Mengapa serikat kalah dan terjadi *union busting*?

Sumiyati: Sebenarnya, kalau aku lihat bukan serikatnya yang tidak siap, tapi memang perusahaannya berusaha untuk menyingkirkan SP (Serikat Pekerja). Sehingga dapat menempuh keuntungan dengan tidak mengeluarkan sedikit pun anggaran untuk pekerjanya.

LIPS: Apakah perusahaan benar-benar terdampak krisis keuangan?

Sumiyati: Frans Putratex itu harusnya menguat karena pasarnya pasar lokal; mayoritas (80%) lokal, sisanya (20%) ekspor ke Timur Tengah. Aku lihat dan analisis, Frans Putratex ini tidak punya pangsa pasar ke Eropa atau Amerika, hanya Timur Tengah. Artinya Tmur Tengah daerah yang lepas dari krisis *financial global.* Andaikan Frans Putratex terkena krisis, dampaknya tidak terlalu signifikan. Wajarlah, karena memang kita 'kan *job order.* Misalnya ekspor, terus dolar naik, pengaruhnya di situ saja! tidak jangka panjang.

LIPS: PHK yang terakhir di Frans Putratex itu kapan?

Sumiyati: Maret 2009, tapi setelah itu banyak teman-teman yang diintimidasi karena ikut demonstrasi. Mereka disikat juga. Baru-baru ini juga ada pengurus dan anggota didemosi (jabatan diturunkan) dari supervisor ke bagian kebersihan. Hal ini telah kita persoalkan. *Alhamdulillah*, anjuran bisa obyektif, si pekerja bisa dipekerjakan seperti semula, dengan status seperti semula. Tapi perusahaan tidak menjalankan juga.

Frans Putratex ini punya China-Kalimantan dengan modal swasta, padat modal. Kondisi krisis kemarin jauh lebih baik daripada kondisi 1998. Pada 1998 itu, dia (PT Frans Putratex) bisa sukses. Malah diuntungkan dengan peningkatan dolar.

Pada 1998 diuntungkan, sebenarnya, waktu itu rugi 3 miliar. Setelah itu untung karena dia (PT Frans Putratex) banyak pasar lokal. Data antara 2007-2008, ordernya

itu tinggi, dapat dikatakan paling bagus tapi Frans Putratex sendiri menyatakan merugi. Padahal 2007-2008 grafiknya paling bagus dan setelah kita di-PHK dia (perusahaan) tetap rekrut orang secara kontrak dan outsourcing.

LIPS: Bagaimana aktivitas Serikat Pekerja Nasional di PT Frans Putratex, sebelum *union busting*?

Sumiyati: Kalau keseluruhan buruh sebelum di-PHK lebih dari 300-an. Sebagian besar anggota SPN (Serikat Pekerja Nasional). Tahun 1999 SPN Frans Putratex dideklarasikan. Kita memperjuangkan PKB (Perjanjian Kerja Bersama).

PKB itu jelas tentang hak mengelola perusahaan. Yang penting buat SPN tentang kesejahteraan pekerja; bagaimana ada sistem penilaian yang periodik berkelanjutan tiap 1 tahun sekali, terus di situ juga ada peraturan THR, tentang jaminan pelayanan kesehatan, tentang JPK, JKK dsb, tentang mendapatkan rekreasi, berbagai kesejahteraan yang kita dapat. Yang paling penting untuk kita adalah sistem penilaian secara periodik. Kalau dilihat, itu suatu keberhasilan yang paling bagus, di mana kita mendapatkan penilaian dalam periode dengan kenaikan maksimal 20% dan minimal 7% di perusahaan. Itu sangat jarang. Terus prosentasinya THR tidak sebulan. Ada kelebihan 5%. Rata-rata di perusahaan lain sebulan upah, kalau kita tidak. Makanya, kita sangat menuntut sekali kewajiban perusahaan dalam memenuhi penilaian periodik.

Saya di-PHK sepihak, tapi kalau secara hukum belum (di-PHK). Kita masih dalam proses, karena belum ada kekuatan hukum tetap yang menyatakan kita putus hubungan kerja dengan PT Frans Putratex. Proses dan jalur PHK-nya sudah sesuai. Karena dari proses mediasi kemudian masuk ke pengadilan sudah sesuai. Tapi sistem yang dilakukan perusahaan untuk mem-PHK kita tidak sesuai. Karena syarat dari UU 'kan jelas, SP dan perusahaan harus menghindari untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Di situ, Frans Putratex sendiri belum mempunyai atau belum ada syarat dasar hukum untuk mem-PHK karyawan yang 73 orang ini. 'Kan di situ ada surat edaran, kalau gak salah no. 907/2004 (SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal, red). Intinya, ada tahapan pencegahannya. Kalau misalnya sebelum PHK melakukan perumahan dengan tidak mengabaikan prasyarat yang ada di peraturan, masuk dalam surat edaran itu. Tapi perusahaan menawarkan perubahan dengan upah 50%. Jelas kita tidak terima. Artinya kita bernegosiasi tetapi perusahaan tidak menanggapi yang kita sampaikan, malah berbalik jadi PHK. Padahal, awalnya, kita menuntut agar perusahaan menjalankan itu sistem penilaian sesuai amanat ISO dan PKB

Kalau saya melihat upaya bicara dengan pemerintah sudah dari awal, semenjak isu di perusahaan lain. Waktu itu juga Grand Pintalan (salah satu perusahaan pemintalan Grup Agro Manunggal di Serang Banten), menutup pabriknya karena kondisi *post de jure.* Kemudian pangsa pasar juga tidak bisa menjalankan usahanya dengan

menghentikan operasional pasar. Bahasanya tidak menutup, tapi menghentikan operasional sesaat. Kemudian kita audiensi dengan pemerintah dengan pihak dinas juga terkait perusahaan. Tapi tanggapannya, gak responsif. Saat itu tidak didengarkan, tidak ada tindak lanjut. Klimaksnya sampai pemerintah sendiri membuat anjuran putus hubungan kerja. Pemerintah tidak melihat amanat UU, 'kan harus ada syarat yang harus dipenuhi dahulu. Malah cenderung membela (pengusaha, red) dan menghambat (serikat, red). Padahal jelas dalam konsepnya pengusaha, targetnya hanya untuk mengubah status hubungan kerja tetap menjadi kontrak atau PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau *outsourcing.* Sebenarnya itu (perubahan buruh tetap menjadi buruh kontrak, red), targetnya. Terbukti itu di Grand Pintalan. Belum selesai menyelesaikan kewajiban terhadap pekerjanya yang di PHK -dengan alasan perusahaan tutup- ternyata dia buka lagi dengan status kerja kontrak & *outsourcing.* Panca Plaza (Perusahaan tekstil di Serang, red.) juga rencananya mau seperti itu. Dia hanya mencari lagi pengelola baru dan pekerja barunya, termasuk Frans Putratex. Mereka punya rencana (mengubah status kerja). Dengan bukti-bukti yang ada pun pemerintah menutup mata.

LIPS: Banyaknya PHK dan perekrutan buruh kontrak, pertanda apa?

Sumiyati: Menurut aku ini kehancuran SP. Ini awal dan akhir dari SP, kalau SP tidak punya konsep yang jelas dalam menghadapi situasi.

Artinya begini, inikan sudah lama, isu kontrak outsourcing ini dulu 'kan masih terselubung dari tahun 2002. UUK No. 13/2003 ini, menurut saya, cenderung membuat celah perusahaan untuk melakukan itu (perekrutan buruk kontrak). Dan, serikat semakin kelelahan menghadapi ini. Kelelahan atau kehilangan strategi gitu. Karena aku lihat juga masa sih harus revolusi untuk *nyikapin* ini. 'Kan ketidakbecusan pemerintah ini ancaman untuk masa depan buruh, mayoritas penduduk kita 'kan buruh (buruh pabrik).

LIPS: Apakah organisasi Anda mengorganisir buruh kontrak?

Sumiyati: Ada SB (serikat buruh) yang konsen mengorganisir buruh kontrak. Saya salut akan hal itu. Kalau di SPN sendiri kayanya belum ada gerakan untuk mengorganisir buruh kontrak. Karena jujur saja (saya berbicara sebagai pengurus PSP Frans Putratex), di Frans Putratex sendiri sangat sulit mendekati mereka. Kayaknya mereka sudah didoktrin duluan sama perusahaan, "Kamu boleh bekerja di sini, tapi jangan *deketin* sama yang namanya SP". Kalau didekatin kaya ketakutannya minta ampun. Baru nanya aja, "Mbak kerja di bagian mana? Mbak digaji berapa?" Sudah takut, didekati jalannya saja sudah takut. Jalan duluan.

Ini 'kan kecenderungan semakin sulit mencari lapangan kerja. Mereka mencoba mempertahankan diri. *Save* untuk dirinya, tapi tidak *save* untuk masa depannya. Itu yang dijalani di Frans Putratex, mungkin juga rata-rata yang di bawah SPN Kab

Serang, kaya gitu. Karena kecenderungan tenaga kerja *outsourcing* dan kontrak yang menutup diri, kaya ada *gap* antara yang tetap dan kontrak. Ditempatku 'tuh jam lembur mereka diberi lebih, dibebanin lembur. Jadi gak kelihatan penghasilan sedikit, karena besar dilembur. Bahkan, isunya ada yang upahnya di bawah UMR. Sejak aku jadi pengurus cabang di Serang, aku banyak tahu juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang di bawah SPN. Memang seperti itu (jam kerja lebih, upah rendah dan takut untuk diorganisir, red.).

LIPS: Bagaimana dengan Serikat Pekerja Mandiri (SPM)/Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP)?

Sumiyati: Sebenarnnya itu konsep bentukan pemerintah dan pengusaha. Jadi cara menghancurkan serikat pekerja kalau dianggap terlalu kuat. Di Frans Putratex, setelah kita tersingkir korban dari *union busting*, rekrut tenaga kontrak, *outsourcing* kemudian mereka merintis mengadakan pembentukan SPM. Karena namanya mandiri, tidak berafiliasi. Itu 'kan memangkas jaringan, seperti "katak dalam tempurung". Tidak mengerti dunia luar. Jadi sengaja. Tahunya hanya dengan perusahaan itu saja "Kalau gak nurut sama gw, gw PHK loh". Tidak punya kekuatan, tidak ada yang *back-up*, mereka ditangani sendiri, apa-apa sendiri terus berhadapan dengan pengadilan.

Selama ini 'kan SPN yang berafiliasi. Padahal, (SPTP) orang-orang perusahaan. Ya, orang perusahaan artinya adalah antek-antek perusahaan lewat manajemen. Anggota SPN digembosin. Karena 'kan bertahap, pertama, manajemen anggota kita. Kita perlakukan sama dapat berbagai tunjangan sesuai dengan aturan. Kan namanya juga kondisi berubah, jaman berubah, pergantian ketua berubah, mungkin cara pandang perusahaan, kekuatan mereka dan kepintaran mereka semakin bertambah, akhirnya mulai ditekan tingkatan manajemen. "Masih betah 'gak kerja di sini (perusahaan), ngapain ikut serikat emang perusahaan gak cukup meghidupi kalian, kalian 'kan orang perusahaan, kalian ingat gak perjanjian perusahaan, bersedia mengikuti aturan perusahaan itu salah satunya, kalau tidak nurut masih di SPN, mutasi atau demosi dari kepala seksi menjadi supervisor". Tunjangan dan jabatannya hilang.

LIPS: Dengan banyaknya tantangan yang dihadapi serikat, apa yang harus dilakukan?

Sumiyati: Sebenarnya begini, sesulit apapun (tantangan itu) harus dihadapin. Kalau dihindari juga tetap di-PHK. Sementara SB kalau tidak mengubah polanya, pola perekrutan anggotanya pasti akan habis. Karena 'kan yang (buruh) tetap lama-lama akan tersingkir, tetapi tidak ada pilihan. SB dari sekarang harus mencoba mendekati teman-teman yang *outsourcing* atau buruh kontrak, itu paling tidak! Kalau dia mau merekrut anggota yang baru. Konsepnya, pola perekrutan anggota, tapi bagaimana dia harus mempertahankan anggota yang ada, yang berstatus tetap. Dia (serikat) harus menyiapkan satu gebrakan tidak hanya ke pengusaha tapi ke pemerintah yang

berhak menjawab (bertanggung jawab mengeluarkan) kebijakan itu. Bagaimanapun pekerja ini harus (melawan). Selama ini, UU (UU Ketenagakerjaan) yang ada, sebenarnya kalau diterapkan dengan baik, masih agak pincang. Di situ 'kan ada prasyarat untuk tenaga kontrak ditempatkan di mana, *outsourcing* untuk bidang apa saja, itu diterapkan dengan benar saja, menurut aku masih bisa bertahan teman-teman yang berstatus tetap itu. Misalnya, departemen yang sifatnya bagian mendukung. Tidak bersifat *real*, juga *job order* yang maksimal, tapi semua yang namanya perusahaan namanya *job order.* Ada *order* jalan, tidak ada yah tidak jalan. Itu mayoritas, apalagi tekstil.

Kemudian harus ada pemberian pemahaman. Entah itu dengan metode belajar, pendidikan, pelatihan, intinya memberikan pola pikr baru. Artinya kalau menuntut mereka (pemerintah), selalu terbatas kewenangan. Sebenarnya pemerintah punya kewenangan. Dia harus punya mekanisme untuk menjalankan. Misalnya, ada sebuah pelanggaran dia bisa menuntut sanksi pidana; ada pengawasan yang harus bergerak. Selama ini 'kan pengawasan tidak bergerak. Kalau tidak ada anggaran, tidak bergerak. Selalu bicaranya anggaran. Padahal anggaran pengawasan lumayan banyak juga. Dan, itu tidak pernah dipakai karena anggaran perusahaan jauh lebih banyak buat keuntungan mereka.

Kemudian, ada pola pikir LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, red.) dan ada pola pikir serikat. Kalau LSM cenderung frontal. Memang bagus ilmu dan wawasannya, tapi dalam menangani hal-hal yang teknis dia cenderung frontal. Tapi, kalau serikat pekerja itu 'kan lebih tahu situasi masing-masing lingkungan pekerjanya. Artinya, dia bisa mengatasi dengan versi SP sendiri. LSM Harus menjiwai apa yang dibutuhkan oleh SP.

Selama ini pola pendidikan cenderung formal. Aku lebih cenderung ke informal. Jadi ada kedekatan emosional dulu yang harus dibangun, sehingga membangkitkan diri kepercayaan si pekerja. Untuk mengungkapkan yang terkekang dalam dirinya seperti apa. Dengan begitu, kita 'kan bisa tahu, pola hidup kita seperti ini, tiap orang, tiap daerah 'kan beda-beda. Karena budaya masing-masing pabrik beda, tekanannya juga beda. Jadi tidak bisa ditentukan, untuk Serang begini, terus disambung-sambungin yang lagi *ngtrend* apa. Padahal tiap pabrik punya persoalan sendiri.

adalah Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Independen (Sekjen GSBI), dan Koordinator Umum Front Perjuangan Rakyat (FPR). FPR merupakan gabungan berbagai serikat buruh, serikat tani, serikat perempuan dan serikat pemuda-mahasiswa. Dalam kampanyenya, FPR menyerukan kenaikan upah untuk buruh, lapangan kerja untuk pemuda-mahasiswa dan tanah untuk kaum tani.

Rudy:

"Perjuangan Pokok di Tingkat Pabrik"

LIPS: Bagaimana Anda melihat situasi gerakan buruh 2009?

Rudy: Kelas buruh adalah anak jaman dari sistem kapitalisme. Gerakan kelas buruh, dengan demikian, memiliki peran paling historis bagi perubahan menuju jaman baru. Disebabkan peranan historis inilah, gerakan kelas buruh harus memahami perkembangan situasi jaman; untuk menentukan sikap, tindakan, taktik dan strategi perjuangan kelas buruh. Dan sebaliknya, tanpa pemahaman gerakan kelas buruh akan mudah tersesat di jalan oportunisme dan avonturisme, yang hanya menghasilkan kekalahan demi kekalahan.

Sejarah sistem kapitalisme dewasa ini telah memasuki zaman imperialisme. Suatu tahap tertinggi dan terakhir dari sistem kapitalisme. Kita sekarang hidup di jaman krisis umum imperialisme, yang imbasnya melanda di seluruh negeri.

Krisis energi, krisis finansial, krisis pangan dan krisis ekosistem telah berpadu. Berbagai bentuk krisis imperialisme terwujud secara umum: Over produksi barang-barang teknologi tinggi dan militer; krisis energi akibat monopoli produksi migas untuk cadangan energi industri imperialisme, angkatan perang; perang agresi dan penjualan kembali (barang-barang bekas) dan krisis finansial di Amerika Serikat.

Sebagaimana yang kita saksikan baru-baru ini, resesi ekonomi global diawali oleh kredit macet sektor perumahan, kemudian bergerak cepat menjadi krisis keuangan. Krisis ini mulai menampilkan bentuk-bentuk krisis overproduksi, khususnya yang dialami oleh sektor otomotif yang merupakan sektor manufaktur unggulan di negara-negara maju. Pemecatan terhadap buruh-buruh kasar hingga jajaran kelas menengah dan eksekutif. Pemecatan telah memperburuk kejatuhan daya beli secara global. Krisis mengakibatkan menghilangnya sumber-sumber ekonomi yang menjadi penopang imperialisme. Krisis ini menuntut imperialisme, khususnya Imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya, untuk mencari sumber-sumber keuntungan baru, yang sepanjang 2008 lalu mereka dapat dari spekulasi komoditas pangan dan energi, khususnya minyak.

Resesi ekonomi global kian memperburuk krisis kronis yang terjadi di negara-negara berkembang dan bergantung seperti Indonesia. Ketergantungan ekonomi pada stabilitas perdagangan dunia; dalam bentuk-bentuk seperti (1) industri manufaktur berorientasi ekspor; (2) industri yang bergantung pada impor; (3) penerapan sistem nilai mata uang bebas-mengambang; dan (4) tingginya beban utang luar negeri. Semuanya itu menyebabkan negara-negara terbelakang, seperti Indonesia kehilangan kedaulatan.

Resesi memperkuat syarat-syarat keterjajahan rakyat di negara-negara bergantung akibat gagalnya kelas-kelas berkuasa merumuskan pembangunan ekonomi.

Kaum buruh dan rakyat Indonesia saat ini dihadapkan pada; (1) perampasan upah—akibat kenaikan harga yang tidak terkendali, pemaksimalan penarikan pajak individu, rantai sistem *outsourcing* yang kian panjang, dan lain-lain; (2) perampasan kerja akibat gelombang PHK yang kian marak, pengupahan yang tidak adil, dan adanya usaha-usaha untuk semakin merendahkan jaminan kelangsungan kerja; dan (3) perampasan tanah, khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur yang didorong oleh stimulus ekonomi rejim SBY.

Atas keadaan umum tersebut, situasi gerakan buruh selama setahun belakangan ini sesungguhnya memiliki syarat untuk mengalami peningkatan dan perluasan. Ada beberapa catatan atas pandangan ini. Sepanjang 2009, telah puluhan bahkan ratusan aksi buruh untuk menyuarakan dan melancarkan tuntutannya, baik yang dilakukan di pabrik-pabrik karena menolak PHK, kenaikan upah, menolak diberlakukannya sistem kerja kontrak dan *outsourching*, menuntut Tunjangan Hari Raya (THR), menuntut diberikannya hak untuk berorganisasi/berserikat, hingga menolak pemilu 2009.

Meskipun syarat akan kebangkitan gerakan buruh telah begitu matang, tapi aksi demonstrasi serta berbagai perlawanan yang dilakukan masih bersifat sporadis dan spontanitas. Karena, gerakan serikat buruh di Indonesia masih didominasi oleh serikat buruh yang berwatak kuning. Watak ini tidak memiliki kepentingan atas

perjuangan kelas buruh dan pembebasan kelas dari belenggu penindasan dan penghisapan kelas pemilik alat produksi. Suka tidak suka dominasi serikat buruh yang pro terhadap kepentingan kelas majikan dan pemerintah masih menempati urutan pertama di negeri ini, secara kuantitas.

Perkembangan terakhir telah terjadi pertemuan tiga Konfederasi untuk menyusun konsensus gerakan politik buruh pada 23 s/d 25 November 2009 yang lalu, dengan tajuk ”Trade Unions Meeting for Political Consensus (Tumpoc)”. Pertemuan ini tak ubah sebuah drama untuk menebar ilusi bagi kelas buruh. Dalam pertemuan tersebut telah dibahas usulan untuk mereformasi sistem jaminan sosial Indonesia, pengawasan ketenagakerjaan, perlawanan terhadap sistem kerja kontrak, dan buruh kontrak. Sebuah retorika yang dimainkan tak ubahnya gaya partai politik menjelang pemilu.

Kenapa dikatakan demikian, karena ini adalah bagian dari konsolidasi rejim boneka imperialisme yang antidemokrasi, yang antikaum buruhnya kuat. Diakui atau tidak, saat ini gerakan kaum buruh dan serikat-serikat buruh sejati mulai tampil dan menguat. Untuk mencegah agar tidak berkembang negara perlu mengonsolidasikan serikat buruh dalam satu wadah. Sehingga kepentingan rejim komprador ini senantiasa terjaga.

Selain dominasi gerakan serikat buruh kuning, gerakan serikat buruh di Indonesia juga masih diwarnai gerakan serikat buruh yang dipimpin oleh para petualanganisme/oportunis. Para pimpinan serikat buruh yang tidak memiliki pandangan mengenai masyarakat Indonesia. Sesungguhnya, gerakan serikat buruh di tahun 2009 masih sangat kecil, terutama gerakan serikat buruh yang memiliki watak perjuangan kelas dan bercita-cita membebaskan kelas buruh dari belenggu penindasan dan penghisapan imperialisme dan feodalisme.

Meskipun demikian perkembangan krisis Imperialisme yang semakin menggerus penghidupan kelas buruh dan rakyat pekerja di Indonesia adalah lahan subur bagi bangkitnya gerakan serikat buruh.

LIPS: Bagaimana masa depan buruh di bawah kepemimpinan SBY-Budiono?

Rudy: Rejim SBY-Budiono merupakan babak lanjutan dari rejim 5 tahun sebelumnya, yakni SBY-Kalla. SBY-Budiono bisa dipastikan akan semakin memantapkan agendanya sebagai jongos Imperialisme. Rejim ini tidak akan segan untuk melakukan apa saja agar agendanya dapat berjalan mulus.

Sebagai catatan, pascareformasi, rejim ini yang melarang aksi dengan membawa pengeras suara. Hal lainnya adalah pemerintah diam ketika berbagai pelanggaran atas hak buruh. Dengan demikian, nasib buruh di bawah Rejim SBY-Budiono semakin

jauh dari pemenuhan atas hak politiknya. Begitu juga hak sosial ekonomi, kelas buruh akan semakin menderita. Saya merujuk pada data PHK yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi LIPS Bogor 2009, sejak Desember 2008 hingga Februari 2009 saja tercatat ada 3.734.639 orang yang telah di-PHK, 8.076.623 orang dirumahkan dan sebanyak 2.973.077 orang di ancam PHK. Angka ini diyakini akan terus meningkat seiring dengan perkembangan krisis yang menghantam berbagai industri dan kelas buruh telah kehilangan pekerjaanya.

Politik upah murah masih menjadi agenda politik Rejim SBY-Budiono. Kenaikan upah 2010 yang hanya 4,5 % untuk propinsi DKI Jakarta, masih jauh dari KHL dan masih di bawah tingkat Inflasi. Ini tentu sangat jauh untuk mencukupi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya.

Politik upah murah tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Indonesia sebagai negeri yang menjadi sumber penyedia bahan baku murah, tenaga kerja murah, serta potensi pasar yang sangat besar bagi penjualan barang dagangan milik imperialis *(utamanya barang over produksi)*. Upah minimum merupakan salah satu "daya tarik" utama dalam menarik para investor asing.

Kelas pengusaha yang juga ditopang oleh penguasa politik, senantiasa berupaya untuk merebut kembali setiap kenaikan upah minimum yang diterima oleh kelas buruh dengan berbagai cara, seperti: peningkatan harga berbagai barang konsumsi serta jasa pelayanan (*inflasi*), peningkatan pajak, dan lain sebagainya, yang menurunkan nominal upah riil kelas buruh. Upah riil adalah upah yang diukur dengan banyaknya jumlah barang (*dan juga jasa*) yang dapat dibeli oleh buruh. Nominal upah memang terlihat seakan-akan meningkat, tetapi nilainya menurun.

Karena Pemerintahan SBY-Boediono akan tetap melanjutkan kebijakan pembangunan yang *pro-growth* (pro pertumbuhan), *pro-poor* (pro kemiskinan) dan *pro-job* (pro penciptaan lapangan kerja) atau yang lebih di kenal dengan strategi triple track**.**

Dalam pemerintahannya sudah ada 45 program penting yang akan dijalankan pemerintah di seluruh tanah air. Dari jumlah itu, ditetapkan 15 di antaranya sebagai program 100 hari wajib dilaksanakan yaitu: Pemberantasan mafia hukum; revitalisasi industri pertahanan; penanggulangan terorisme; pengadaan listrik; produksi dan ketahanan pangan; revitalisasi pabrik pupuk dan gula; membenahi keruwetan, kompleksitas yang berkaitan dengan penggunaan tanah dan tata ruang; Pembangunan infrastruktur; Pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan menengah; Pendanaan Pembangunan dan Investasi; Perubahan iklim dan lingkungan. Reformasi bidang kesehatan; Reformasi di bidang pendidikan; kesiagaan penanggulangan bencana dan sinerginya antara pemerintah pusat dan daerah.

Kalau diperhatikan tidak ada satupun yang berpihak kepada buruh dan kaum tani. Misalnya, tentang Pemberantasan mafia hukum di semua lembaga negara dan

penegakan hukum, sebagai program nomor *wahid* atas menguatnya kasus KPK dan Polri serta kasus Century. Pertanyaannya adalah apakah korupsi dapat diberantas oleh pemerintahan yang didominasi oleh para borjuasi komprador, tuan tanah dan kapital birokrat? Mungkin penting diulas agak mendalam atas program tersebut. Korupsi bukan lagi masalah yang rahasia.

Mungkin ungkapan Iwan Flas dalam lagunya "Orde Paling Baru" adalah gambaran kenyataan kronisnya korupsi. Hampir seluruh rakyat telah mengetahui bahwa mulai dari mengurus KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, pengurusan paspor, pembagian BLT, pembagian raskin, hingga yang terbaru dan hangat tentang skandal Bank Century yang bernilai triliunan rupiah menjadi praktek sehari-hari para birokrasi untuk melakukan korupsi.

LIPS: Apa pendapat Anda melihat perkembangan PHK yang mengarah ke pemberangusan serikat pekerja?

Isu kebebasan berserikat dari waktu ke waktu tidak akan kunjung usai. Pokok masalahnya adalah rejim yang berkuasa antidemokrasi.

Perlu disadari bahwa hubungan buruh dan majikan adalah hubungan yang saling bertentangan satu sama lain dan bersifat antagonis. Dengan begitu konflik perburuhan tidak dapat diselesaikan dengan *kongkow* seperti melalui lembaga tripartit nasional. Kuncinya adalah, bagaimana buruh memperkuat diri dengan membangun serikat buruh sejati dan bekerja sesuai keadaan obyektif. Dengan kata lain pengorganisasian buruh haruslah dilakukan dengan pengorganisasian yang solid.

Tetapi yang tidak boleh untuk dilupakan adalah buruh juga harus terus berupaya untuk memperjuangankan haknya untuk dapat berserikat: mendesak terus kepada pemerintah agar memberikan jaminan sesuai dengan undang-undang yang ada. Selain itu buruh harus juga menolak segala bentuk PHK; mengingat perkembangan PHK semakin marak dan terus saja terjadi.

LIPS: Apa hambatan serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingannya?

Rudy: Hambatan yang masih dihadapi oleh gerakan serikat buruh untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya adalah masih lemahnya kekuatan serikat buruh di tingkat pabrik. Sesungguhnya serikat buruh kuat kuncinya terdapat di kekuatan serikat buruh tingkat perusahaan. Perjuangan yang pokok adalah perjuangan buruh di tingkat pabrik.

LIPS: Apakah program mendesak untuk melawan proyek upah murah, PHK masal dan peralihan status kerja tetap menjadi tidak tetap?

Rudy: Program mendesak gerakan serikat buruh di Indonesia terhadap politik upah murah oleh Rejim SBY-Budiono adalah melakukan pemblejetan yang luas mengenai politik upah murah. Di mana banyak manipulasi yang dilakukan oleh rejim melalui dewan pengupahan.

Serikat buruh harus menjelaskan dengan terang bentuk manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah melalu dewan pengupahan itu. Dengan kata lain kerja politik melalui propaganda dan edukasi terhadap buruh menempati program prioritas. Mungkin ini adalah hal yang klasik, tetapi masih banyak yang belum memiliki pemahaman atas masalah yang mereka hadapi.

Maksud gerakan propaganda di sini adalah pemurnian kesadaran kelas buruh. Kembali kepada kepentingan hakiki kelas buruh dan cita-cita mulia kelas buruh. Segala hal yang harus terumuskan dalam dasar ideologi, politik dan watak organisasnya.

Program lain yang mungkin dapat dilakukan untuk menghadapi masalah upah murah, PHK dan sistem kerja kontrak adalah konsolidasi organisasi mulai dari serikat buruh tingkat perusahaan sampai tingkat nasional.

Upaya untuk mempertahankan segala hak yang sudah didapat, seperti upah, status kerja dan lain sebagainya adalah perjuangan utama. Karena buruh dalam situasi sedang mendapat gerusan dari majikan.

Upaya konsolidasi juga ditujukan untuk memperjuangkan sedikit demi sedikit hak dan kepentingan buruh. Kuncinya adalah kekuatan serikat buruh tingkat perusahaan. Karena suka atau tidak buruh sesungguhnya dihadapkan pada dua lini perjuangan, yakni buruh dipaksa melawan dan berhadapan dengan pemerintah; dan berhadapan-hadapan dengan majikan.

Maka perjuangan upah dan berbagai perjuangan sosial-ekonomi lainnya harus diletakkan sebagai perjuangan minimum dari gelora besar perjuangan kelas buruh. Sebab, perjuangan sosial-ekonomi berfungsi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup serta mengurangi penderitaan kelas buruh yang memiliki sifat sementara dan terbatas, tapi tidak dapat menghapuskan sistem penghisapan dan penindasan yang terjadi.

Di Indonesia, hal itu sangat terkait dengan perjuangan kelas buruh dalam melawan imperialisme dan feodalisme, yang menjadi target utama perjuangannya. Kedua sistem jahat yang sama-sama eksis itulah yang saat ini menjadi sumber dari berbagai penindasan serta persoalan yang dihadapi oleh kelas buruh dan juga rakyat Indonesia.

Fauzi Abdullah: Obor Penerang yang Tak Pernah Padam

(Mengenang Fauzi Abdullah - 27 November 2009)

Fauzan Mahdami

Sebuah Kabar Sedih

Sesaat motor bebek itu diparkir, sementara istriku menghampiri teman-temannya. Sore itu, 27 November 2010 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, rasanya waktu yang tepat untuk bertemu dengan beberapa teman. Sekedar bersilaturahmi dan bersantai. Tiba-tiba seorang teman menelpon. Dia menanyakan, “Sudah denger kabar Babeh meninggal?”. Setengah tidak percaya, badan ini lemas. “Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun,” jawabku. Seakan mencoba ikhlas dan berterima dengan peristiwa yang baru saja dialami. Aku tidak sadar ternyata Mbak Dwi (istri Fauzi Abdullah) sudah mengirimkan sms mengenai wafatnya seorang teladan aktivis perburuhan. Seketika, berita itu aku kabarkan ke istriku. Aku menyebarkan informasi memilukan itu ke semua orang yang dikenal. Mi Oji, demikian aku biasa memanggil, telah mengorbankan hidupnya untuk kemajuan serikat buruh pada Hari Raya Kurban 1431 H.

Dua hari sebelumnya aku menjenguk beliau bersama teman-teman dari Oxfam Australia. Sebelum berpamitan, Tim Connor (Oxfam Australia) sempat menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada Mi Oji atas kontribusi yang sangat besar pada gerakan buruh di Indonesia. Dia mendoakan agar Mi Oji segera pulih. Ternyata pertemuan tersebut adalah yang terakhir. Beliau dimakamkan berdekatan dengan kuburan ayah dan saudaraku.

Persentuhan dengan Mi Oji

Sejak kecil aku telah mengetahui Mi Oji. Waktu itu, ayahku adalah teman karib dia dalam kegiatan teater dan sastra. Kebetulan dia juga adalah teman ibuku di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bogor Jawa Barat. Karena itu, kami sering bertemu. Dalam pikiranku waktu itu, orangtuaku memiliki teman yang bertubuh besar, hitam dan selalu berpeluh. Belakangan aku mengetahui bahwa peluh itu karena kegemaran dia berjalan kaki. Mi Oji selalu berjalan kaki, berkaos oblong dan bersandal jepit.

Ingatanku selanjutnya adalah ketika dia selalu memberi "sangu" untuk jajan. Kebetulan aku bersekolah SMA di Bandung. Jadi, kalau berlibur ke Bogor. Banyak saudaraku di Bogor. Namun, yang ditemui adalah Mi Oji. Pikiranku waktu itu, dia orangnya baik. Salah satu kebaikannya adalah memberi "sangu", ketika berpamitan dari rumahnya. Bagi orangtuaku, Mi Oji bukan sekedar teman SMA dan teater, dia banyak membantu memecahkan persoalan-persoalan pelik yang kami hadapi.

Rumah itu seperti "sarang" perencanaan gerakan buruh

Kualitas pertemuan dengan Mi Oji terjadi ketika masa kuliah.
Waktu itu, gerakan sosial sedang menggeliat. Pula, gerakan mahasiswa sedang naik daun karena mereka terlibat dalam pendampingan kasus-kasus perburuhan dan sengketa tanah. Jika semasa SMA bertemu Mi Oji dengan berharap diberi "sangu", kali ini pertemuan itu diisi diskusi. Tidak jarang diskusi itu menghabiskan waktu istirahat Mi Oji juga jatah makan dia. Diskusinya sangat serius, yang terkadang mengharuskanku menginap di rumahnya. Pertemuan "serius" tersebut mengantarkanku berkenalan dengan aktivis perburuhan lain, semisal Bambang Harri (alm.). Bambang Harri adalah salah satu aktivis yang sederhana dan banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan dunia perburuhan di Bandung (Lihat, Mengenang Bambang Harri, Jurnal Sedane, Vol. 6. No. 2. 2008). Di kemudian hari, Bambang Harri ikut merintis pendirian Perkumpulan Sedane, organisasi payung Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS). LIPS sebuah organisasi yang berkonsentrasi dalam isu-isu perburuhan.

Dari Rumah Sederhana Semua Dimulai

Mi Oji tinggal di rumah sederhana dan bersahaja di tengah perkampungan orang-orang Arab, tepatnya di Jalan Sedane Gang Banjar No. 37 Empang Bogor Jawa Barat. Konon, rumah tersebut merupakan milik ibunya, yang dibeli oleh beliau. Sewaktu gerakan buruh gempita, rumah tersebut dijadikan base camp para buruh untuk berdiskusi, bercengkrama, bersilaturahmi dan menginap. Rumah itu seperti "sarang" perencanaan gerakan buruh, yang waktu itu ditindas rejim represif Orde

Baru. Represivitas rejim Orde Baru tidak mengampuni semua gerak-gerik yang dapat mengganggu kekuasaan dan pemusatan kekayaan. Sebagaimana diketahui, struktur pemeritahan Orde Baru mampu memonitor orang dan semua aktivitasnya. Rumah tersebut tampak persembunyian aman. Tetangga, bahkan keluarga Mi Oji tidak mengetahui persis apa yang dilakukan oleh Mi Oji bersama teman-temannya.

"Itu mah bukan mengorganisir, tapi memprovokasi

Dari rumah itu pula aktivitas LIPS pertama dimulai. Awal 1990-an, LIPS dioperasikan oleh Mi Oji dan Mbak Nina. LIPS saat itu hanya melakukan pendokumentasian: mengkliping berita perburuhan dari media cetak. Sehingga rumah itu dipenuhi dengan berbagai dokumen, buku dan kliping. Sesekali, aktivitas LIPS dioperasikan sebuah gedung yang terletak di tengah pasar: Jl. Dewi Sartika 52 F Pasar Anyar Bogor. Gudang tersebut, sejak 1993/1994 menjadi Kantor LIPS. Kalau gudang tersebut sedang dikontrakkan atau direnovasi, LIPS akan dioperasikan di Komplek Perumahan Pagelaran, Ciomas Bogor, yakni rumah Mbak Silvy.

Pergulatan Awal di LIPS

"Itu mah bukan mengorganisir, tapi memprovokasi," ungkapnya kala itu. Kata-kata tersebut membuat merinding, malu dan kaget. Ucapan itu muncul ketika aku menceritakan pengalaman pendampingan buruh-buruh PT Kahatex Bandung Jawa Barat. Tren aktivis mahasiswa pra-Reformasi memang terlibat bersama buruh: berdiskusi dan merencanakan aksi. Sebuah tren yang hampir tidak dilakukan oleh mahasiswa pasca-Reformasi. Mi Oji memberikan komentar pendek dan kena terhadap aktivitas yang cenderung terburu-buru: menyemangati tapi tidak membangkitkan kesadaran. Komentar itu, sampai sekarang begitu relevan, bahwa pengorganisasian membutuhkan ketelatenan, kesabaran dan ketekunan.

Aku mulai terlibat dalam aktivitas LIPS sekitar 2001, di saat LIPS memulai memublikasikan jurnal. Setelah itu, aku mulai terlibat penuh dalam aktivitas LIPS, bahkan terlibat dalam pendirian Perkumpulan Sedane. Mi Oji, pada awal pendirian Perkumpulan Sedane dipilih sebagai Ketua Pengurus Perkumpulan. Bersama pengurus lain beliau membuat kebijakan-kebijakan umum organisasi untuk dilaksanakan oleh LIPS. Sebagai Ketua Perkumpulan, kami memosisikan Mi Oji sebagai "penasihat" LIPS. Karena itu, kerap kami mengundang beliau untuk berdiskusi.

Dinamika dan Pergulatan Organisasi

Di LIPS, Mi Oji biasa dipanggil Babeh. Entah sejak kapan panggilan itu muncul. Yang jelas, Mi Oji selalu bersikap "menengahi" ketika kami memperdebatkan persoalan perburuhan. Dalam soal umur Mi Oji memang lebih tua daripada orang-orang LIPS.

Pun dalam soal pengalaman dan pengetahuan perburuhan. Namun, Mi Oji bersikap egaliter kepada semua, termasuk kepada orang-orang yang baru terlibat di LIPS. Beliau tidak segan untuk membuat minuman sendiri, walaupun sudah ditawarkan untuk dibuatkan. Beliau juga rela untuk mencuci piring yang dipakainya, bahkan piring yang dipakai orang lain. Dalam memperlakukan personil LIPS, atau tamu yang lebih muda, dia tidak memosisikan diri sebagai figur senior yang gila penghormatan. Semangat dan praktik egaliter sangat terasa, terkadang membuat malu orang yang menghadapinya. Tapi, beliau selalu dapat membuat hubungan serta suasana sangat cair dan hangat. Beliau humoris. Dia tidak marah ketika kawan-kawan yang lebih muda mencandainya. Meskipun akan terlihat serius ketika berdiskusi, selalu saja dibumbui dengan guyon. Persoalan yang pelik dan teoretik terkesan mudah beliau sampaikan. Menanggapi persatuan gerakan sosial misalnya, dengan cergas ia mengatakan, "Semua serikat pengen bersatu, tapi semua serikat pengen mimpin. Ayo bersatu, asal gue yang mimpin. Repot kalau begitu", ujarnya sambil tertawa geli. Dengan tenang dan pelan beliau menjelaskan dan berdiskusi tentang berbagai hal, khususnya isu perburuhan. Tampaknya, beliau salah satu dari orang yang percaya kepada proses. Setiap orang, termasuk dirinya harus melakukan proses pembelajaran. Ketika orang lain berbicara, tampak ia sangat memerhatikan dan mendengarkan dengan seksama. Sekalipun berbeda dengan pendapatnya. Menghadapi perbedaan pendapat tidak lantas membuat Mi Oji ketus berdiskusi.

> ***"Uang seringkali menjadi pangkal kehancuran organisasi"***

Suatu waktu, Mi Oji terlibat perdebatan, apakah Organisasi Non-Pemerintah (ornop) harus melebur bersama serikat atau tetap berada di luar? Di kalangan aktivis 80-an, persoalan ini cukup pelik. Bahkan, telah menjadi persoalan teoretik. Lebih jauh, persoalan tersebut akan mengantarkan pada pertanyaan-pertanyaan turunan: apakah *funding* itu bersifat menghambat gerakan atau memajukan, apakah ornop pendukung perubahan atau aktor perubahan dan pertanyaan-pertanyaan lain yang cenderung ideologis. Tidak sedikit perbedaan pendapat harus memisahkan Mi Oji dengan teman-temannya. Ketika teman-temannya memilih meleburkan ornop dengan serikat buruh, Mi Oji masih saja memilih mempertahankan LIPS dan melakukan kerja-kerja "kecil": fokus pada beberapa kelompok kecil, dengan bayangan ke depan kelompok-kelompok tersebut akan melanjutkan dan memperluas kerja-kerjanya, sehingga dalam waktu panjang akan terbangun sebuah gerakan yang solid dan besar. Sebagian orang berpandangan, pekerjaan Mi Oji memoderasikan gerakan buruh, bahkan menghambat perkembangan gerakan buruh. Cita-cita Mi Oji adalah terbangunnya gerakan buruh yang memunyai kekuatan *bargain* yang besar serta punya kesadaran politik yang tinggi. Sampai saat ini hal tersebut belum muncul.

Mi Oji tidak meleburkan ornop dengan serikat, karena Mi Oji khawatir ada dominasi ornop terhadap serikat buruh. Karena ornop memiliki uang dan akses informasi. Yang perlu dilakukan ornop adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan

oleh serikat. Ornop menjadi semacam *supporting system* gerakan serikat buruh: melakukan hal-hal yang belum dapat dikerjakan serikat. Beliau berharap bahwa keberadaan LIPS dapat membantu beberapa kelemahan yang dihadapi oleh serikat, bukan sebagai lembaga yang tahu tentang segalanya. LIPS menjadi mitra dan LIPS juga belajar dari realitas yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, serikat harus dibangun oleh orang-orang serikat. Fungsi-fungsi pengorganisasian dan pendidikan mau-tidak mau harus dilakukan oleh pengurus serikat. Dengan syarat bangunan serikat harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan anggotanya berpandangan politik yang luas. Karena itu, informasi harus dibuka dan akses terhadap informasi harus dipermudah.

Mengingat lebih dari 32 tahun hegemoni Orde Baru terhadap serikat: serikat oligarkis. Mewujudkan gagasan mengubah serikat dari dalam bukan pekerjaan mudah. Hanya orang yang memiliki kesabaran dan ketelatenan yang dapat melakukannya. Menurut Mi Oji, pendidikan adalah kunci utama utama dalam proses tersebut. Pendidikan yang dikembangkan bukan hanya *training.* Tapi, pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk belajar; merefleksikan dan meneorikan pengalaman. Menurutnya, “Membuat orang marah (provokasi) lebih mudah. Dan, membangun kekuatan yang instan tidak akan menjawab persoalan, karena serikat akan lebih rentan hancur dalam waktu singkat bila tidak dipersiapkan dan dibangun dengan sungguh-sungguh”, ujarnya.

Ketika berhadapan dengan *funding,* Mi Oji memiliki pandangan tersendiri. Sekali waktu ia pernah berujar, “Uang seringkali menjadi pangkal kehancuran organisasi”. Pandangannya tersebut ia ejawantahkan di LIPS. Ia berpandangan bahwa *funding* dapat mengintervensi kedaulatan organisasi. Sikap yang tidak mau diintervensi menyebabkan aktivitas LIPS “naik turun”. Pembiayaan operasional LIPS banyak didapatkan dari kantong pribadinya dan/atau bantuan dari beberapa koleganya, baik di dalam ataupun luar negeri. Kalaupun ada pembiayaan, lebih karena tawaran kerjasama dalam jangka pendek dan jumlah kecil. Sekali waktu, karena tidak ada biaya sama sekali, jurnal yang telah selesai tidak dapat diterbitkan, sehingga tertunda dalam waktu cukup lama. Seperti umumnya organisasi, LIPS dibangun di atas nilai-nilai universal: demokratis, egaliter, berkeadilan jender, berkeadilan sosial, solidaritas, independen dan pengakuan atas HAM.

Dalam sehari-hari, Mi Oji memperlihatkan bagaimana demokratisasi pengetahuan dilakukan dan nilai-nilai universal dipraktikkan. Beliau tidak sungkan untuk bertanya mengenai isu-isu baru dan berita-berita *teranyar* mengenai perburuhan. Selain itu, beliau tidak pernah terlihat jumawa karena lebih tua atau lebih mengetahui persoalan. Juga, ia tidak pelit untuk membagi pengalaman dan pengetahuan. Kalau berdiskusi, sikap kebapakan dan kesabaran terlihat ketika menjelaskan argumentasinya. Dia tidak pernah menyalahkan argumentasi orang, tetapi dengan cara bertanya menggiring orang untuk mengakui kelemahan argumentasinya. Beliau juga tidak pernah memaksakan keinginan atau gagasannya, termasuk keputusan

yang diambil oleh LIPS. Beliau hanya memberi masukan tentang beberapa hal yang dianggap penting. Banyak kalangan yang melihat bahwa LIPS adalah manifestasi dari Mi Oji. Tidak sedikit orang yang mengasosiasikan LIPS dengan Mi Oji. Padahal, kebijakan organisasional LIPS diputuskan secara demokratis.

Memang beberapa kali terlihat kekecewaan atas keputusan atau tindakan dari kawan-kawan, namun hal itu tidak membuat kemarahan dirinya meledak, hanya dipendamnya saja. Bila sudah mentok, beliau akan bilang, “Tuh kan, gue kan sudah bilang.” Sikap ini juga diperlihatkan kepada orang-orang lain atau kelompok lain, ketika mereka berbeda pendapat. Dalam menghadapi perbedaan pendapat, beliau lebih sering mengalah (dengan tetap memegang keyakinannya) dan membiarkan orang untuk menjalankannya. Beliau orang yang menghindari sebuah konflik terbuka. Bila hal itu melibatkan dirinya, maka beliau akan memilih menutup diri dan mundur. Beliau tidak pernah menyerang orang terlebih dahulu, dan kalau diserang, beliau akan menghadapi dengan tenang dan sabar. Sampai kemudian apa yang menjadi keyakinannya terbukti dalam praktik.

Meniti Jalan Mewujudkan Mimpi Membangun Gerakan Buruh

Melalui LIPS, Mi Oji ingin mewujudkan mimpi-mimpinya membangun gerakan buruh yang mempunyai kekuatan politik yang diperhitungkan oleh berbagai kalangan. Gagasan tersebut disederhanakan dalam pikiran-pikiran bagaimana membangun serikat yang kuat dan demokratis. Demokratisasi adalah proses. Karena itu, tidak mungkin sesuatu yang besar terbangun begitu saja, tanpa memulai dari hal-hal kecil. Hal kecil itu adalah pengorgansiasian dan perubahan serikat buruh di tingkat yang paling kecil, yaitu pabrik. Namun dalam waktu bersamaan, dia juga berpikir bagaimana serikat buruh dapat terhubungkan dengan gerakan sosial lain dan menjadi bagian dari gerakan sosial yang lebih kuat.

Membangun gerakan buruh atau serikat dibutuhkan anggota-anggota yang sadar dan terdidik. Kesadaran tersebut dibangun secara terus menerus oleh serikat. Pengurus serikat harus sadar bahwa mereka dipilih karena mandat untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya. Iuran menjadi basis terpenting dalam serikat, karena di titik inilah biasanya independensi sebuah serikat diukur. Nilai dan prinsip organisasi harus menjadi praktik dalam organisasi, bahkan perilaku sehari-hari di antara para buruh, sehingga terbangun solidaritas yang kuat. Untuk menjadi kuat diperlukan pengorganisasian dan pendidikan yang intensif dalam berbagai bentuknya. Menurutnya, organisasi bukan tujuan, tapi sebagai wadah berjuang dan proses pembelajaran. Untuk itu, organisasi harus demokratis dan membuka ruang bagi seluruh anggota untuk berpartisipasi seluas-luasnya, termasuk bagi buruh perempuan. Ketika sebuah serikat oligarkis maka akan terjadi kesenjangan antara pengurus dan anggota. Akibatnya, pengurus serikat tidak ada yang mengontrol. Lebih jauh, serikat akan kehilangan peran dan fungsi sejatinya. Dalam konteks demikian, tidak akan terjadi regenerasi dan organisasi menjadi jumud.

Selain itu, menurutnya, pengurus serikat kerap mengabaikan anggota. Pengabaian terhadap anggota diperlihatkan dengan ragam bentuk. Mempertahankan struktur serikat yang tidak demokratis, adalah salah bentuk pengabaian terhadap amanat anggota. Juga, membuat pendidikan tidak berdasar pengalaman buruh, merupakan bentuk pengabaian.

Dari sisi eksternal, Fauzi Abdullah juga memandang bahwa perubahan dari rejim otoritarian menuju "demokratis" tidak mendorong serikat menjadi lebih kuat. Asumsi tersebut muncul dari berbagai peristiwa perburuhan yang semakin terpuruk. Fleksibilitas tenaga kerja, PHK besar-besaran dan pemberangusan serikat dan persoalan lain dari luar organisasi semakin memperlemah serikat. Banyak serikat yang kehilangan anggota karena pemecatan dan banyaknya buruh kontrak menjadi dilema bagi serikat buruh. Bila serikat tetap memakai paradigma lama, beliau mengingatkan ini, merupakan lonceng kematian bagi gerakan buruh. Serikat buruh harus menyadari dan mengubah banyak hal dalam dirinya karena tuntutan situasi yang terus berkembang, harus ada metode dan strategi baru dalam menghadapi permasalahan yang semakin berat. Serikat buruh harus meningkatkan kapasitas dirinya secara kualitatif. Serikat buruh yang mempunyai anggota banyak tidak serta merta organisasinya kuat. Banyak kelemahan yang diidap dalam serikat buruh; keterbatasan informasi, kelemahan menganalisis dan membuat rumusan perjuangan jangka panjang merupakan beberapa deret permasalahan yang dihadapi serikat. Kata-kata kunci yang selalu beliau dengungkan adalah kerjasama, khususnya antarserikat, serikat dan elemen gerakan lain. Sehingga memungkinkan terbangun persatuan gerakan sosial. Karena, fragmentasi serikat dapat memperlemah kekuatan serikat.

> *Membangun serikat yang kuat dan demokratis*

Sang Guru Kehidupan

Mi Oji, adalah sosok sederhana penuh pengorbanan. Penulis berpikir, sikap tersebut merupakan satu kesatuan dari pemahamannya tentang kaum tertindas dan bagaimana praktik-praktik itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sisi manusia dan kemanusiaannya begitu mendalam dan tercermin dalam membangun hubungan dengan siapapun; dari orang kecil sampai orang-orang "besar". Dengan sadar, beliau memilih jalan hidup dan bergaya layaknya buruh-buruh pabrik.

Dalam rentang waktu perkenalan penulis dengannya, beliau selalu berpakaian sederhana, kaos oblong dan celana bahan yang terkadang dalam keadaan robek dan kumal, serta bersandal jepit. Perubahan sedikit terjadi setelah beliau menikah, itupun kaos berkerah yang kadang masih terlihat bolong dan sandal kulit yang terlihat kusam. Dengan tas tenteng, yang seringkali sudah rusak ritzletingnya, untuk membawa dokumen kerja. Dalam banyak kesempatan beliau terlihat mengenakan

sarung, baik ketika bekerja atau sedang memfasilitasi pertemuan buruh, “Lebih adem dan nyaman”, kilahnya. Cara berpakaian ini juga diterapkan dirinya saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Cara yang sering membuat orang mengernyitkan alis.

Kemanapun selalu diupayakan berjalan kaki, kecuali jarak yang sangat jauh. Kendaraan “termewah” yang dipunyai dan dipakainya saat itu adalah sebuah motor GL yang sudah berumur tua dan digunakan dalam kesempatan terbatas. Setelah terserang stroke, motor itu tidak ada lagi di rumahnya.

Mi Oji terbiasa bangun pagi hari kemudian jalan-jalan pagi. Biasanya tempat yang dituju pertama kali adalah mencari pasar tradisional untuk sekedar mencari kopi dan sarapan kecil atau makanan khas setempat, setelah itu belanja buah-buahan, khususnya Durian. Sebagai keturunan Arab, Mi Oji penggemar daging. Beliau sangat bandel dalam hal ini, ketika saran dokter untuk mengurangi mengurangi makan daging, dia hanya berseloroh, “kata ibu gue, gak ada orang yang mati karena makan daging kambing!”. Mi Oji bukanlah orang yang memilih-milih makanan, apapun makanannya pasti habis dilahap. Ketika perjalanan keluar kota, dia selalu mencoba makanan-makanan baru khas daerah tersebut, ikan adalah salah satu menu favoritnya.

Kebersahajaan ini sangat khas pada sosok Mi Oji dan itu bertahan sampai akhir hayatnya, sebuah totalitas dan pengorbanan hidup seorang pejuang. Beliau sering tidak memperhatikan dirinya sendiri. Hidupnya diberikan kepada kaum tertindas dengan penuh dedikasi dan ketulusan. Kalau saja dilihat dari latar belakang keluarganya yang saudagar, beliau dapat memilih hidup seperti umumnya orang lain. Beliau selalu membagi dan memberi apa yang dipunyainya, apapun itu. Tampaknya, beliau tidak tega melihat orang lain kelaparan atau terlihat susah. Tapi, beliau tidak pernah memperlihatkan dirinya kesusahan di hadapan orang lain, bahkan sampai hal-hal kecil. Jarang sekali beliau meminta bantuan, kecuali benar-benar terjepit. Mi Oji selalu berupaya melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bantuan orang lain kerap ditolak. Beliau memang memilih jalan tersebut dengan penuh kesadaran, untuk membangun cita-cita yang menggumpal dalam dada dan pikirannya. Hampir segala hal yang dipunyainya, diberikan dengan ikhlas untuk tujuan tersebut. Dia tetap melangkah perlahan dan tertatih-tatih dengan kesendirian dan kesunyian jauh dari hiruk pikuk serta gemerlapnya dunia.

Dia orang yang bersembunyi dari sorot lampu dan jepretan kamera wartawan. Dan, lebih memilih tetap bergulat dan bergelut dengan realitas kaum yang sudah sejak awal dicintainya: kaum buruh. Dengan setia dan penuh kesabaran, keramahan, canda dan guyonnya mendidik kaum lemah dan tertindas serta orang-orang yang mau belajar. Beliau adalah obor penerang yang tak pernah redup ataupun padam; menerangi jiwa-jiwa dan pikiran kaum yang selama ini terpinggirkan dan terabaikan. Obor tersebut akan terus menyala dan menyalakan obor-obor lain, yang akan menerangi dunia.

Perjalanan Akhir Sang Penerang

Setahun terakhir Mi Oji mulai sakit-sakitan, keluhan yang dirasakan adalah perut/usus yang tidak normal. Sehingga harus menjalani terapi rutin. Terakhir, sebulan sekali harus check-up ke dokter di Jakarta. Sejak terserang stroke yang pertama kali beberapa tahun yang lalu, kesehatan Mi Oji menurun terus. Aktivitas yang biasa dilakukannya sedikit banyak terganggu. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi badannya melemah, badannya semakin kurus kering. Sampai terdengar kabar Mi Oji harus masuk rumah sakit. Tiga minggu beliau berada di rumah sakit. Meskipun kawan dan karibnya mengharapkan keberadaan Mi Oji, Tuhan memiliki rencana sendiri. Hambanya yang mulia tersebut dipanggil ke pangkuan-Nya di hari penuh pengorbanan. Mungkin ini pengingat kita semua, bahwa dialah "nabi kaum buruh", yang telah mengorbankan hidupnya. Beliau telah menunaikan tugas suci dan kemanusiaannya dengan baik di dunia fana ini. Tinggallah orang-orang yang ditinggalkan untuk meneruskan tugas "kerasulan", agar kaum lemah dan tertindas dapat meniti jalan menuju kemenangan. ***

Judul Buku

Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ke-3

Penulis

Noer Fauzi

Penerbit

Insist Press

Tahun terbit

2005

Tebal halaman

i-xxxi + 225 halaman, photo, tabel, indeks

TINJAUAN BUKU

Dari Brazil ke Indonesia: Upaya Mengatasi Fragmentasi Gerakan

Angga Natariandi

Awalan

Agenda neoliberalisme telah menjadi "buah bibir" dihampir semua negara. Kebijakan ataupun pandangan neoliberalisme merupakan paket dari sebuah agenda yang dikenal dengan sebutan Washington Konsensus. Indonesia adalah salah satu negara yang memfasilitasi perkembangan neoliberalisme. Isi Washington Konsensus telah mengalami beberapa perubahan, akan tetapi secara substansi masih disebut sebagai sebuah agenda neoliberalisme.[149]

Di Indonesia sendiri penerapan neoliberalisme dimplementasikan di berbagai aspek, salah satunya adalah privatisasi perusahaan milik negara (banyak contoh yang tidak bisa disebutkan satu persatu), ataupun privatisasi yang berkenaan dengan sumber-sumber perusahaan. Nilai ini perlu dicermati sampai seberapa jauh dampak

[149] Berbagai macam kritik telah diungkapkan berkenaan dengan permasalahan neoliberalisme di Indonesia dengan berbagai turunannya, salah satu satu buku yang bisa dijadikan referensi bisa dilihat di, Awalil Rizky dan Nasyith Majidi*, Neoliberalisme Mencengkram Indonesia.* Jakarta: E Publishing Company, 2008

negatif proses privatisasi. Bila kita melihat kondisi sekarang tampak kesenjangan antra si kaya dan si miskin: Sebagian kecil orang bingung membelanjakan uang, bingung menempati rumah yang saking banyaknya, tapi jutaan orang tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki rumah.

Namun, penindasan dan penghisapan neoliberalisme belum mampu mempersatukan seluruh elemen masyarakat seperti serikat tani, buruh, miskin kota. Bahkan, mahasiswa -yang relatif memiliki waktu luang- seperti "terkubur dalam persoalan mereka sendiri". Proses penyatuan berbagai elemen ini harus dimulai dari pemahaman seberapa besar dampak negatif neoliberalisme. Hingga saat ini pun belum ada sebuah wadah yang dapat menghimpun tentang agenda neoliberalisme sebagai suatu ancaman.

Sejatinya, hampir seluruh negara-negara yang dikategorikan sebagai Negara Dunia Ketiga mengalami fase kolonialisme yang dimulai pada abad ke-17. Setelah fase kolonialisme sebagai bentuk "penjajahan tradisonal" berakhir, yang ditandai berakhirnya perang dunia pertama dan kedua, babak baru yang diyakini banyak kalangan akademisi sebagai "penjajahan modern" menemukan metaforfosisnya dalam bentuk neoliberalisme. Kelahiran kembali bentuk penjajahan baru ini telah memacu perlawanan rakyat untuk terbebas dari kurungan neoliberalisme. Bila dahulu rakyat di masing-masing negara berjuang untuk terlepas dari belenggu kolonialisme, saat ini dengan kadar yang berbeda-beda, mereka berjuang untuk mempertanyakan hak sebagai warga negara atas ketidakadilan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah banyaknya bentuk-bentuk perlawanan yang dibungkus oleh lahirnya gerakan perlawanan rakyat (gerakan sosial). Gerakan sosial ini menjadi "bumbu" yang ditandai oleh keterbukaan sistem politik di setiap negara.

Gerakan sosial dapat dipahami sebagai sebuah aksi kolektif yang tersusun, kesadaraan akan situasi dan kondisi, terencana, dan melibatkan berbagai organisasi ataupun elemen rakyat yang difasilitasi melalui sebuah institusi. Pertanyaan yang sangat sederhana adalah bagaimana sebuah gerakan sosial dapat tampil di negara-negara Dunia Ketiga? Dan, bagaimana aktor-aktor gerakan sosial ini membungkus isu neoliberalisme menjadi sebuah isu besar demi tercapainya tujuan kesejahteraan rakyat?

Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga (2005) yang ditulis Noer Fauzi ini membantu untuk memahami tentang peta gerakan sosial di berbagai negara khususnya yang dikategorikan sebagai Negara Dunia Ketiga. Dalam tulisan ini pembaca disuguhi sembilan contoh kasus gerakan sosial dengan berbagai bentuk perlawanan dan dinamikanya. Sembilan contoh gerakan yang merupakan artikel secara terpisah ini membantu pembaca dalam mengklasifikasikan sekaligus memetakan perbedaan konsep gerakan sosial. Kesembilan gerakan sosial itu antara lain *Movimento Dos Trabalhadores Rurais sem Terra* (MST) di Brazil (hlm. 28-39)*; Ejercito Zapatista de Liberacion nacional* (EZLN) di Meksiko (hlm. 40-54)*; Foderation der Indigenen Organisationen des Napo* (FOIN) di Ekuador (hlm. 55-66)*; Landless Peoples Movement* (LPM) di Afrika Selatan (hlm. 67-76)*; Gerakan pendudukan tanah*

di Zimbabwe (hlm. 77-85)*; Narmada Bachao Andolan* (NBA) di India (hlm. 86-96)*; Assembly of the Poor* (AOP) di Thailand (hlm. 97-108)*; Pambansang Ugnayan ng Nagsasariling Lokal namga Samahang Mamamayan sa Kanayunan* (UNORKA) di Filipina (hlm. 109-120); dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Indonesia (hlm. 121-134).

Pada awal tulisan buku ini terdapat daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, dan daftar gambar yang memudahkan pembaca dalam mencari letak tema sentral dan bagian-bagian mana saja yang dapat memandu pembaca dalam menjelajahi isi dari buku ini.

Dalam mengawali tulisan buku ini, terdapat Pengantar Tamu yang ditulis oleh Hendro Sangkoyo. Hendro mengantarkan para pembaca memahami keseluruhan isi buku dengan mengulas tentang bagaimana dan apa saja yang terdapat dalam keseluruhan isi buku. Posisi ini dimaksudkan agar para pembaca, khususnya pembaca pemula, yang ingin menyelam lebih jauh dapat mengetahui dan memahami keseluruhan konteks isi buku. Hendro mengawali tulisan dengan mengedepankan pentingnya membangun dasar aksi kolektif dari gerakan sosial. Selanjutnya, sembilan contoh gerakan menjadi bagian yang sangat penting yang dikedepankan oleh Hendro, sekaligus bagian utama yang mengesankan.

Menurut pengamatan penulis, Hendro melupakan sesuatu bahwa bagian pertama dan ketiga pada buku ini yang menjadi daya tarik. Dalam bagian tersebut terdapat sebuah analisis yang dikedepankan oleh Noer Fauzi. Hal ini merupakan sumbangan terbesar mengenai peran dan posisi gerakan sosial.

Secara rinci, pada bagian pertama Noer Fauzi memaparkan dan menjelaskan kepada pembaca agar para pembaca memeroleh pemahaman dasar mengenai petani, gerakan, dan perlawanan. Sedangkan bagian ketiga Noer Fauzi memberikan analisis yang cukup tajam dalam memahami konteks gerakan sosial di Dunia Ketiga. Sedangkan pada bagian kedua, Noer Fauzi memberikan sembilan contoh gerakan, yang dimaksudkan sebagai sebuah gagasan dan praktik dalam memahami konteks gerakan sosial yang terjadi di masing-masing negara beserta dinamika pendorongnya.

Pada pendahuluan buku ini, Noer Fauzi memberikan gambaran sekaligus menjelaskan, apa yang dimaksud dengan Negara Dunia Ketiga.

> "... bahwa Dunia Ketiga sendiri diberi arti, dibentuk, dibayangkan, diurus, dieksploitasi, dimanipulasi, dan dikembangkan melalui serangkaian wacana dan praktek.(hlm. 4)"

Penjelasan ini dimaksudkan sebagai benang merah tentang babak lanjutan dari sebuah penjajahan terkini (neoliberalisme). Neoliberalisme menjadi fokus lanjutan dari bentuk penjajahan terkini.

Neoliberalisme inilah yang diyakini penulis sebagai pemicu lahirnya bentuk perlawanan, yang ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan antineoliberalisme. Pada bagian ini pula Noer Fauzi memokuskan tulisan mengenai gerakan-gerakan

rakyat pedesaan pada ruang lingkup petani. Petani menjadi bagian terpenting yang ditekankan oleh Noer Fauzi. Apa yang dimaksud Noer Fauzi sangat beralasan mengingat pedesaan adalah korban terburuk penindasan neoliberalisme.

Pada bagian pertama pula, pembaca akan menemukan beberapa konsep tentang petani. Dengan mengutip pendapat Markus J. Kurtz, Noer Fauzi mendefinisikan petani sebagai; (i) penguasaan dan/atau pemilikan kaum petani atas tanah; (ii) hubungan subordinasi dari kelompok penguasa lain; dan (iii) komunitas petani yang ditandai oleh praktik budaya yang khusus (hlm. 20). Berikutnya disuguhkan perbedaan konsep petani dari aliran Weberian, aliran Marxian, kaum Ekonomi Moral, kaum Antropologis, dan kaum Minimalis. Dimensi dari masing-masing konsep ini memberikan nuansa yang berbeda tentang pemahaman dan pengertian petani. Konsepsi yang terstruktur ini memungkinkan pembaca untuk dengan tepat mengklasifikasikan makna petani. Selanjutnya konsep-konsep tentang revolusi petani dipetakan (melalui contoh tabel 2 hlm. 25) dengan membandingkan argumen dari Scott, Popkin, dan Paige.

Sebagaimana diakui para praktisi antineoliberalisme, korban neoliberalisme sangat luas. Sayangnya, Noer Fauzi tidak menyuguhkan mengenai posisi gerakan perkotaan dalam perlawanan terhadap neoliberalisme. Padahal buku tersebut menekankan mengenai gerakan sosial, yang tidak semata-mata gerakan kaum tani.

Noer Fauzi tidak memberikan perhatian khusus terhadap gerakan "perkotaan", yang seharusnya menjadi bagian struktur masyarakat. Sekilas Noer Fauzi memaparkan mengenai kemungkinan kontradiksi antara gerakan perkotaan dan perdesaan. Sebagai bagian dari masyarakat modern, kelas buruh merupakan bagian dari gerakan perkotaan yang tidak mungkin tunduk terhadap kepemimpinan gerakan perdesaan.

Pada bagian kedua buku ini, Noer Fauzi memberikan pemaparan sekaligus menjelaskan sebuah fenomena gerakan sosial. Para pembaca dibawa mengarungi berbagai bentuk perlawanan rakyat. Seperti pada subbagian pertama, gerakan sosial ditampilkan oleh MST di Brasil, kedua oleh EZLN di Meksiko, ketiga FOIN di Ekuador, keempat LPM di Afrika Selatan, kelima gerakan pendudukan tanah di Zimbabwe, keenam NBA di India, ketujuh AOP di Thailand, kedelapan UNORKA di Filipina, dan kesembilan AMAN di Indonesia.

Kesembilan contoh kasus gerakan ini dapat dikatakan merepresentasikan wilayah di belahan benua yang dikategorikan negara Dunia Ketiga. Negara-negara yang ditampilkan merupakan contoh perlawanan gerakan sosial yang terorganisir. Tujuan dari gerakan pun sangat jelas. Informasi mengenai data, tidak adanya wawancara secara langsung ditutupi dengan studi literatur berbagai sumber, seperti buku dan jurnal. Contoh kasus gerakan sosial yang dimaksud diharapkan penulisnya sebagai informasi gerakan yang terjadi di belahan dunia lain.

Konteks

Kesembilan gerakan tersebut menampilkan bentuk dan dinamika berbeda. Posisi gerakan sosial dari kesembilan gerakan sosial ini hanya dapat dipahami dalam konteks MENGAPA, APA, dan BAGAIMANA. Apa yang dinamakan gerakan sosial "terasa hambar" apabila tidak dipaparkan dan dijelaskan secara detil dengan sebuah pencapaian keberhasilan yang telah diciptakan sebuah gerakan sosial. Buku ini bukan *best practice* gerakan sosial melawan neoliberalisme. Tapi pengalam mengorganisasikan perlawanan. Buku ini merupakan sumber yang sangat berharga dalam memahami gerakan sosial.

Sumbangsih terbesar bagi gerakan sosial, khususnya gerakan buruh di Indonesia adalah bagaimana aktor-aktor gerakan sosial dapat mendobrak dan memanfaatkan keterbukaan sistem politik. Posisi buruh yang selama ini menjadi warga negara kelas dua dapat tampil sekaligus memberikan ekspresi politik untuk mampu terlibat dalam proses pengambilan keputusan negara. Bukan hanya sampai di situ, perjuangan yang harus diberikan para buruh demi mencapai kesetaraan dan kesamaan hak sebagai warga negara merupakan perjuangan yang utama.

Seperti yang diungkapkan Noer Fauzi, gerakan-gerakan rakyat yang menjadi contoh kasus dari buku ini telah memberi teladan bagaimana sebuah dasar-dasar kolektif atapun kebersamaan akan terbentuk melalui rasa senasib melawan kuasa yang telah menindas (hlm. 198). Kolektivitas menjadi pondasi yang seharusnya menjadi sebuah kekuatan politik. Proses pembentukan dan persatuan bukan sebuah jalan yang *instant.* Karena itu diperlukan sebuah dukungan yang cukup kuat untuk membentuk dasar-dasar kolektivitas. Pendidikan adalah syarat mutlak untuk mengawali proses ini secara bertahap. Bentuk pengorganisasian yang diawali oleh pendidikan merupakan hal yang paling utama, yang nantinya akan diimplementasikan dan diharapkan dapat membentuk kekuatan yang mandiri.

Akhirnya, buku ini akan menjadi sebuah rujukan yang sangat bermanfaat bagi dinamika gerakan sosial di Indonesia dan khususnya gerakan buruh, ataupun bagi buruh itu sendiri yang menginginkan sebuah perubahan untuk mempertanyakan keberadaan mereka sebagai bagian dari warga negara Indonesia. ***

Akhirnya, buku ini akan menjadi sebuah rujukan yang sangat bermanfaat bagi dinamika gerakan sosial di Indonesia dan khususnya gerakan buruh, ataupun bagi buruh itu sendiri yang menginginkan sebuah perubahan untuk mempertanyakan keberadaan mereka sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

***

Dinamika

DINAMIKA adalah analisis enam-bulanan kondisi perburuhan di Indonesia yang didasarkan pada kliping 9 media massa nasional dan 11 media massa lokal (*Kompas, Sindo, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Tempo, Suara Merdeka, Metrot TV News.Com; Equator, Fajar Online, Lampung Post, Medan Bisnis, Swara Kita, Pikiran Rakyat, Jawa Pos, Jurnal Bogor, Radar Banten, Solo Pos, Joglo Semar*), buletin, majalah, jurnal dan newsletter perburuhan yang diterbitkan oleh serikat buruh maupun non-governmen organisation (NGO). Juga, dilengkapi dan diperkuat dengan temuan-temuan lapangan dan laporan dari serikat. Dinamika diharapkan dapat memotret dan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa perburuhan. Analisis menyoroti dua aspek dalam isu perburuhan, yaitu resistensi buruh dan peluang pembangunan gerakan buruh dalam upaya memahami kondisi perburuhan untuk penguatan gerakan buruh.

Dinamika Perburuhan Semester II 2009

Pembuka

Ketika membuka acara National Summit 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyatakan ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 7% pada 2014. "Untuk mencapai target tersebut kita butuh investasi yang besar tidak cukup hanya dari belanja negara di APBN saja. Kalau Rp 2.100 triliun investasi per tahun selama 5 tahun, maka ini akan tercapai," ujarnya (Detik.com, 29/10/2009). Menurut pemerintah, anggaran belanja negara akan diarahkan untuk memacu pertumbuhan (*pro growth*), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan (*pro employment*), serta mengurangi kemiskinan (*pro poor*).

Sebagaimana diketahui, pada Desember 2008 lalu pemerintah telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi; dari 6 persen menjadi 4 persen. Kala itu, alasan yang dikemukakan adalah Indonesia terdampak krisis keuangan global. Krisis keuangan global telah menganggu dan menurunkan angka ekspor Indonesia ke Amerika, Eropa dan Jepang. Indonesia tengah menghadapi pemilihan presiden 2009.

Dalam kampanye Pemilu Presiden 2009, angka pertumbuhan ekonomi kembali dikemukakan. Para kandidat presiden pun menyebutkan akan mengejar pertumbuhan ekonomi untuk menyelesaikan perekonomian Indonesia. Pemilu Presiden telah dimenangkan pasangan SBY-Boediono dengan suara lebih dari 50 persen. Mayoritas rakyat berharap akan ada perbaikan kesejahteraan dan kemajuan politik. Bagaimana rejim Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono) memenuhi target pertumbuhan ekonomi dan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik rakyat Indonesia? Tulisan ini akan akan mendeskripsikan hubungan antara kemajuan pertumbuhan ekonomi dengan pemenuhan hak dasar rakyat Indonesia, khususnya buruh dan serikat buruh. Data-data yang diolah didasarkan pada media massa nasional dan lokal, sumber-sumber yang berkaitan dengan perburuhan, serta temuan-temuan lapangan.

Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh tiga faktor: pendapatan domestik dan belanja negara, aliran modal dari luar negeri dalam bentuk pinjaman maupun investasi asing serta selisih neraca ekspor-impor. Untuk itu, beberapa faktor yang berkaitan dengan konsumsi masyarakat, pajak masyarakat, tabungan masyarakat terus dipacu dan belanja negara dioptimalkan. Agar, kemampuan domestik dan belanja negara meningkat. Sementara itu, beberapa lawatan dan kehadiran SBY dalam pertemuan-pertemuan internasional, semisal Konferensi Tingkat Tinggi Menteri Keuangan ASEAN plus 3 di Bangkok, ASEAN Summit di Thailand, Konferensi Asian Development Bank di Bali, dan pertemuan G-20 di London, diproyeksikan untuk menambah kekurangan APBN dengan pinjaman luar negeri.

Kesungguhan rejim SBY dalam mengundang modal asing dan meningkatkan ekspor terlihat dengan dibukanya kawasan khusus bagi perdagangan bebas (Free Trade

Zone/FTZ). Bahkan, beberapa daerah menyediakan diri untuk membuka wilayahnya bagi FTZ. Dengan nama yang berbeda-beda; kawasan berikat, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, FTZ difungsikan untuk kebebasan lalu lintas ekspor-impor, urusan logistik, pergudangan dan keamanan lalu lintas modal asing. Area perdagangan bebas menyaratkan kemudahan; adanya penghapusan tariff bea masuk barang-barang impor ataupun barang ekspor, jaminan keamanan, jaminan keuntungan, jaminan kesetaraan dengan modal dalam negeri, lebih jauh, jaminan tidak akan dinasionalisasi. FTA ASEAN-China, misalnya, telah menyepakati 10 sektor (Industri Besi dan baja, tekstil, petrokimia, alas kaki, makanan dan minuman, holtikultura, elektronik, kabel, serat sintetis, dan mainan) dan sekitar 2.500 subsektor industri dikenakan tariff 0% untuk diimpor maupun diekspor.

Jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi dituangkan dalam Undang-Undang No. 25 Tentang Penanaman Modal 2007. UU tersebut mengamanatkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (Pasal 31). Tanpa menunggu kesiapan apalagi persetujuan dari rakyat Indonesia, jauh-jauh hari pemerintah telah menandatangani kesepakatan perdagangan bebas. Beberapa kesepakatan yang telah disepakati di antaranya: Penghapusan Kuota Tekstil dan Produk Tekstil (2005), Infrastruktur Summit (2005), ASEAN-Australian New Zealand (AANZ), Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), China-Asean FTA (CAFTA), Korea-Asean FTA, dan Japan-Asean FTA.

tingkat pendapatan penduduk yang rendah tidak diselesaikan dengan menaikkan upah buruh dan penyediaan lapangan kerja yang luas, namun melalui peningkatan jumlah modal asing.

Kawasan Ekonomi Khusus berlaku pula dalam bidang agraria. Melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2010 tentang Budidaya Tanaman, rejim SBY-Boediono pun memastikan investor dapat menguasai lahan seluas 10.000 ha. Jangka waktu pengusaan 35 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 35 tahun dan 25 tahun. Selain itu, investor akan diberikan kemudahan fiskal dan nonfiskal. Fasilitas fiskal, misalnya pembangunan infrasturktur dimasukkan dalam biaya investasi, keringanan pajak penghasilan, tax-holiday, pengurangan pajak bangunan, keringanan pajak daerah/redistribusi, tidak adanya pungutan pajak pertambahan nilai. Sedang fasilitas nonfiskal, misalnya kemudahan perijinan dan fasilitas keimigrasian. Areal yang menjadi percontohan adalah Marauke dengan lahan 1,6 juta ha.

Realisasi

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi 5-7% diperlukan dana 2.100 triliun per tahun. Untuk mencapai target tersebut diperlukan investasi dalam jumlah tidak sedikit. Alasan utama menarik investasi asing, menurut Roadmap Kadin 2010-2014, karena tingkat pendapatan per kapita penduduk dan

peranan sektor keuangan domestik (perbankan dan pasar modal) masih sangat rendah. *Haqul yaqin*, tingkat pendapatan penduduk yang rendah tidak diselesaikan dengan menaikkan upah buruh dan penyediaan lapangan kerja yang luas, namun melalui peningkatan jumlah modal asing.

Sebaliknya, dengan membanjirnya investasi asing diharapkan terbukanya lapangan kerja. Menurut Badan Pengawas Penanaman Modal (Bapepam), sampai Desember 2009, modal asing berjumlah 62,69 persen lebih besar dibanding modal dalam negeri yang hanya 37,31 persen.

Terdapat dua jenis investasi yang masuk ke Indonesia; investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dan investasi tidak langsung dalam bentuk portofolio (saham dan obligasi pemerintah). Menurut para ekonom, FDI akan mendorong sektor riil dan menyerap tenaga kerja. Sedangkan portofolio kurang berperan dalam sektor ekonomi, mudah lari (hot money) dan bersifat *aji mumpung* (spekulatif). Karena itu, pemerintah dianjurkan untuk menarik FDI daripada portofolio. Dengan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan, FDI akan membangun pabrik, membangun infrastruktur, dan menyewa lahan pertanian untuk diproduksi. Dengan demikian diharapkan banyak kesempatan kerja tersedia. Dengan kebijakan ketenagakerjaan yang fleksibel (Labor Market Flexibility/LMF), sejauh mana FDI akan menyerap tenaga kerja.

Jumlah realisasi FDI, menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama 2009 mencapai Rp 135 triliun, lebih rendah dibanding realisasi investasi 2008 sebesar Rp 154,19 triliun. Realisasi FDI 2009 terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 35 triliun meningkat 28 persen dari tahun sebelumnya dan Penanaman Modal Asing (PMA) sekitar US$10 miliar atau turun hampir 20 persen.

PMDN 2009 berada di sektor telekomunikasi, transportasi, industri kimia, farmasi, pertambangan, industri makanan, proyek listrik, gas, dan konstruksi. Sementara PMA berada di jasa pengangkutan, gudang, komunikasi, industri kimia dan farmasi, manufaktur, industri logam, dan elektronika. Negara-negara yang berinvestasi di Indonesia selama 2009 adalah negara-negara ASEAN yang mencapai 50 persen. Investor lainnya dari Jepang, Korea, Taiwan yang mencapai 20 persen. Selebihnya datang dari India, sejumlah negara Timur Tengah, dan Eropa seperti Inggris dan Belanda.
PMA maupun PMDN telah mendorong pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi 2009 mencapai 4,5 persen. Menurut BKPM, realisasi investasi selama 2009 mampu menyerap tenaga kerja hampir 500.000 orang. Padahal, menurut BPS, angkatan kerja per Februari 2009 berjumlah 113.744.408 orang, naik 1.797.143 orang dari jumlah angka 111.947.265 orang pada Agustus 2008. Pengangguran terbuka, menurut BPS, hanya turun 135.551 dari 9.394 515 (Agustus 2008) menjadi 9.258.964 orang pada Februari 2009. Dari Tabel I, terlihat orang yang bekerja hanya bertambah sedikit; dari 102.552.750 orang menjadi 104.485.444 orang.

Tabel I Penduduk Berdasarkan Jenis Kegiatan 2008-2009

Jenis Kegiatan	2008 (Agustus)	2009 (Feb)
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas	166 641 050	168 264 448
Angkatan Kerja	111 947 265	113 744 408
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67.18	67.6
Bekerja	102 552 750	104 485 444
Pengangguran Terbuka*)	9 394 515	9 258 964
Tingkat Pengangguran Terbuka	8.39	8.14
Bukan Angkatan Kerja	54 693 785	54 520 040
Sekolah	13 226 066	13 665 903
Mengurus Rumah Tangga	32 770 941	32 578 420
Lainnya	8 696 778	8 275 717
*) Pengangguran Terbuka : Mencari Pekerjaan, Mempersiapkan Usaha, Merasa Tidak Mungkin Mendapat Pekerjaan, Sudah Punya Pekerjaan tetapi belum dimulai Sumber :Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009		

Meskipun dari segi jumlah berbeda, data BPS maupun BKPM menyatakan bahwa angka pengangguran berkurang. Para pengamat ekonomi menyatakan bahwa berkurangnya pengangguran menandakan ekonomi Indonesia mulai membaik. Namun interpretasi ini sangat *debatable,* berhubung data dan angka yang disajikan lembaga pemerintah *biased* kepentingan. Lembaga-lembaga pemerintah bagaimana pun akan menampilkan data yang baik untuk mengatasi kelemahan mereka. Karena, berbagai fakta menyatakan bahwa selama 2009 terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan beragam variasi. PHK tidak hanya terjadi di sektor swasta, juga di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Korban PHK beserta polanya akan dipaparkan di bawah.

Andai saja, bahwa investasi langsung (FDI) benar-benar menyerap tenaga kerja, maka sangat dimungkinkan yang terserap adalah korban PHK sebelumnya, atau tenaga kerja baru dengan status kerja kontrak atau *outsourcing*. Karena, sistem tenaga kerja yang fleksibel (Labor Market Flexibility/LMF) telah menjadikan sistem kerja bersifat *fire and hire*. Angkatan pencari kerja ditambah pula akibat penghancuran tenaga kerja produktif di perdesaan. Proyek infrastruktur adalah salah

satu musababnya (Lihat: Dinamika Perburuhan Selama 2008, Jurnal Sedane. Vol. 6. No. 2, 2008)

Sebagaimana diamini mayoritas pimpinan serikat, bahwa rata-rata pola perekrutan tenaga kerja terlebih dahulu memecat buruh permanen. Dengan tawaran tertentu; pensiun dini, pesangon, bahkan pengusiran, buruh permanen di-PHK untuk diganti dengan tenaga kerja berstatus kontrak. Fakta tersebut diperkuat dengan laporan BPS mengenai kontribusi FDI terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut BPS angka pertumbuhan ekonomi selama 2009 ditopang oleh konsumsi rumah tangga 2,8 persen, konsumsi pemerintah 1,3 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 0,8 persen, sumbangan ekspor minus 4,8 persen. Dengan demikian, yang paling berperan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi bukan PMA maupun PMDN, tetapi konsumsi dalam negeri.

Karenanya, tidak berlebihan jika para pengamat kritis menyatakan bahwa perhitungan angka pertumbuhan ekonomi tidak mendasarkan pada perhitungan yang jujur (Koraninternet.com, 02/09/2009). Sebab, angka tersebut dijumlahkan dari rata-rata nasional pendapatan di Indonesia, tanpa mempedulikan siapa pemilik modal tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak didasarkan pada kepastian pemenuhan hak-hak buruh di tempat kerja. Melainkan pada pemenuhan hak-hak investor di Indonesia. Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) memperkirakan bahwa setiap tahun angka pengangguran terus bertambah dan hanya bergeser dari satu sektor ke sektor lain. Pertambahan tersebut selain dari angka pencari kerja lulusan SMA, Diploma, dan Sarjana, juga disebabkan banyaknya buruh yang di-PHK akibat diberlakukannya sistem kerja fleksibel.

Pemutusan Hubungan Kerja dan "Union Busting"

- Selama 2009 tercatat 300.900 orang ter-PHK dari 158 kasus. PHK terbesar dialami oleh Sektor TSK 44%, menyusul Sektor Perkayuan dan Kehutanan 18%, LEM 15%, RTMM 11%, Konstruksi 6%, Pelayanan Publik 2%, KEP 2%, Transportasi & Komunikasi 1%, Perdagangan, Umum & Jasa 1%, Pertanian & Perkebunan 0%, Farmasi & Kesehatan 0%, Media Massa 0%, Pendidikan 0%, Asuransi & Keuangan 0%, Percetakan & Penerbitan 0%, Listrik, Air & Gas 0%.
- Jumlah PHK 2009 lebih kecil daripada 2008 yang mencapai 633.719 orang (year on year). PHK 2008 diwakili Sektor Perkebunan & Pertanian.
- Secara umum, alasan PHK 2009 dikarenakan krisis keuangan global; mahalnya bahan baku, menurunnya permintaan ekspor, order yang dihentikan. Alasan tersebut tidak jauh berbeda dengan alasan PHK 2008.
- Khususnya, buruh-buruh di-PHK dengan alasan perusahaan pailit, penurunan kapasitas produksi, perusahaan tutup, perusahaan ditinggal kabur pemiliknya, kalah di Pengadilan Hubungan Industrial, perusahaan tidak mau menerima buruh bekerja -meskipun PHI memutuskan mempekerjakan kembali-, efisiensi dan renovasi.

- Tidak sedikit perusahaan yang mem-PHK buruh dengan alasan-alasan pidana, semisal; penghinaan terhadap pimpinan perusahaan, menghasut mogok, penggelapan uang, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, merusak aset perusahaan, pencemaran nama baik perusahaan dan pencurian. Pasal-pasal pidana tersebut dialamatkan kepada pimpinan serikat. Akibatnya, selain di-PHK, pimpinan serikat makin dijauhkan dari serikat.
- Diduga kuat bahwa krisis finansial global dimanfaatkan untuk; mem-PHK buruh permanen, aktivis buruh, tidak menaikkan upah atau memberlakukan upah minimum untuk semua masa kerja serta merekrut buruh kontrak dan/atau *outsourcing*.
- Dengan demikian, PHK dengan beragam pola dan tujuan, yang dialamatkan kepada buruh tetap dan aktivis buruh semakin menguatkan anggapan pembiaran dan menjauhnya peranan negara untuk melindungi hak-hak dasar buruh di tempat kerja. Beberapa serikat menamakan tindakan menghalang-halangi aktivitas serikat dengan "union busting".
- "Union busting" maupun penggunaan pasal-pasal pidana untuk menjerat aktivis telah memundurkan nilai-nilai demokrasi. Tindakan tersebut tidak berbeda dengan Kolonial Belanda maupun Rejim Orde Baru.

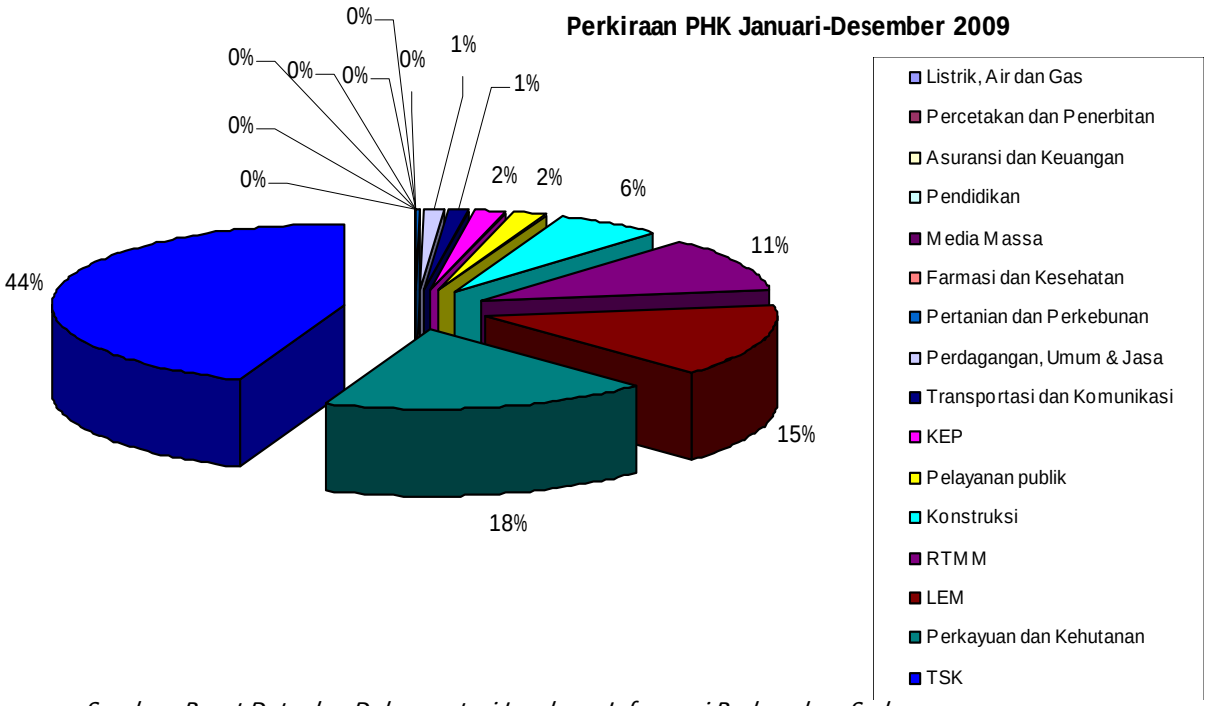

Sumber: Pusat Data dan Dokumentasi Lembaga Informasi Perburuhan Sedane

Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) mencatat bahwa selama semester II 2009 terdapat 44 kasus dengan korban PHK 29,788 orang buruh dari berbagai sektor. Angka ini tampak menurun dari angka PHK semester I 2009 yang mencapai 271,112 orang. Pada semester II 2009, PHK tertinggi ditempati Sektor Tekstil Sandang dan

Kulit (TSK) dan Perkayuan dan Kehutanan. Sektor terendah adalah Sektor Listrik, Air & Gas, dan Percetakan & Penerbitan. Total, semester I dan II 2009 telah terjadi 158 kasus yang mengorbankan PHK 300.900 orang buruh. Jumlah ini terbilang turun jika dibandingkan PHK pada 2008 yang mencapai 633.719 orang. Pada 2008, PHK terbanyak di Sektor Perkebunan & Pertanian.

Secara umum, alasan PHK karena situasi ekonomi makro; mahalnya bahan baku dan pasar ekspor menurun. Industri TSK misalnya, mengaku terdampak krisis keuangan global. TSK atau Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja (15,8% dari total industri manufaktur).

Industri TPT makin terancam, ketika kuota ekspor dicabut pada 2005. Akibatnya, industri TPT berhadapan dengan kompetitor negara-negara lain, khususnya China. China dianggap sebagai kompetitor paling berpengaruh karena memiliki alat produksi yang canggih dan modern. Sementara industri TPT Indonesia bergantung pada mesin-mesin impor dan rata-rata menggunakan mesin tua (berumur 10-15 tahun). Oleh karena itu, terintergrasinya perekonomian Indonesia dalam perjanjian FTA, diperkirakan semakin membuat industri tekstil dalam negeri terpuruk.

Pada satu sisi, industri TSK memang terlihat rapuh akibat ketergantungannya terhadap pasar ekspor dan bahan baku luar negeri. Hal ini bukan alasan utama. Karena, sejak 2007 melalui program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri, pemerintah telah memberikan subsidi bunga pengadaan/investasi mesin. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, realisasi program tersebut untuk industri Tekstil dan Produk Tekstil pada 2009 sebesar Rp 170,75 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 240 miliar. Sementara bagi industri Alas Kaki dan Kulit, realisasi sebanyak Rp 13,6 miliar dari pagu Rp 52,5 miliar. Program tersebut akan ditambah 50 miliar dan akan diperpanjang hingga 2015.

Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) mencatat bahwa selama semester II 2009 terdapat 44 kasus dengan korban PHK 29.788 orang buruh

Selain dukungan finansial, khusus untuk industri yang berada di Kawasan Industri ZONI (7 kawasan industri Cikarang, Bekasi Jawa Barat), KEK Khatulistiwa (Kawasan Industri Semparuk Kalbar), Kawasan Industri Cikande-Modernland, Tangerang, Banten, KEK Kota Palu, Sulteng, KEK Bangka Belitung, dan KEK Kepri (Batam, Bintan, Karimun) dan KEK Batam, Bintan, Karimun, mendapatkan fasilitas perpajakan yang meliputi pajak penghasilan, pengurangan pajak bumi dan bangunan, penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPh impor, keringanan pajak daerah dan distribusi. Untuk kepabeanan daerah KEK tidak dipungut PPN dan PPnBM. Sementara untuk cukai diberlakukan pembebasan cukai untuk bahan baku atau bahan penolong.

Karena itu, sulit sekali mencari pembenaran jika industri-industri TSK masih saja melakukan PHK sepihak. PT Frans Putratex, misalnya, dengan alasan terdampak krisis keuangan global telah mem-PHK 73 orang buruhnya. Di KBN Cakung, PT Mutiara Mitra Busana Apparellindo (MMBA), PT Sambo, PT Victoria, PT Serasi Adi Busana pengusahanya kabur dengan menelantarkan buruh serta menunggak upah. PT Incosindo misalnya, dengan alasan terdampak krisis keuangan global yang menyebabkan perusahaan pailit, buruh di-PHK seluruhnya. Tidak lama kemudian perusahaan berdiri lagi dengan mayoritas buruh kontrak. Sementara itu, buruh PT Kwangduk Langgeng di Cakung memaksa buruhnya untuk mengundurkan diri atau berubah status menjadi buruh kontrak.

Selain itu, untuk mem-PHK terdapat pola perumahan buruh. Pola ini kerap dilakukan untuk menghindari pembayaran pesangon dan angka PHK tampak sedikit bahkan tidak terlihat. PT Gunaparamita Primasatya, awalnya merumahkan buruh selama setahun. Selama 3 bulan pertama upah dibayar 75 persen. Setelah itu, perusahaan mengaku tutup. PT Incosindo di KBN Cakung perusahaannya mengaku pailit, yang otomatis buruhnya ter-PHK. Sementara pesangonnya dinegosiasikan, sebagai kata lain dari tidak perlu mengikuti peraturan perundangan.

Di Kawasan Berikat Pelabuhan Nusantara II Tanjung Priok, pengusaha berusaha menghalang-halangi aktivitas serikat dengan hanya mengakui satu serikat propengusaha. PT Sainah Industries Unit 2 kabur dari Kawasan Berikat dengan meninggalkan tunggakan kepada buruh. Awalnya, di perusahaan terdapat serikat propengusaha, yang tidak pernah mempertanyakan tunjangan untuk buruh: tidak ada tunjangan makan dan tunjangan transpor hany Rp 1000 per hari. Setelah itu, beberapa buruh bersepakat mendirikan serikat yang memperjuangkan anggotanya; memperbarui PKB, memperjuangkan kenaikan upah dan lain-lain. Setelah terbentuk serikat, pengusaha melakukan intimidasi, hasutan dengan melibatkan kepolisian. Hingga sekarang perusahaan tersebut ditinggalkan penyewanya, dengan menunggak hutang kepada buruh.

Pola lain untuk menghalangi aktivitas serikat adalah mendirikan serikat pekerja tingkat perusahaan (SPTP).

Pola lain untuk menghalangi aktivitas serikat adalah mendirikan serikat pekerja tingkat perusahaan (SPTP). SPTP adalah serikat tandingan yang dibuat untuk membingungkan massa buruh di dalam pabrik. Ciri utama SPTP adalah jajaran pengurusnya diisi oleh *supervisor* atau manajemen, aktivitasnya karitatif. Cara berpikir dan sikapnya mewakili kepentingan pengusaha. Di beberapa pabrik, cara ini terbilang efektif. Selain mampu membingungkan massa buruh juga terkesan tidak melanggar aturan kebebasan berserikat.

Selain membuat serikat tandingan atau kabur, pola lain untuk mem-PHK adalah memidanakan aktivis serikat. Pasal-pasal pidana, semisal penghinaan terhadap

pimpinan perusahaan, menghasut mogok, penggelapan uang, perbuatan tidak menyenangkan, pengrusakan, pencemaran nama baik pimpinan perusahaan dan pencurian dipergunakan untuk mem-PHK pengurus serikat. Praktik ini biasanya dilakukan di saat serikat menuntut perundingan perjanjian kerja bersama (PKB). Tentu saja perusahaan berharap tidak ada PKB proburuh. Dengan tidak adanya PKB berarti perusahan dapat mengakumulasi keuntungan tanpa meningkatkan kesejahteraan buruh. Di PT Betawimas Cemerlang Bekasi, seorang buruh dituduh melakukan penghinaan terhadap pimpinan perusahaan. Akibatnya, buruh tersebut di-PHK. Selain itu, ketua serikatnya dituduh menghasut mogok spontan selama 1 jam, peserta mogok dituduh melakukan perbuatan tindakan tidak menyenangkan. Kasus masuk ke PHI. Tapi, buruh di-PHK. Begitu pula, di PT GSS Cibinong Bogor, perusahaan mem-PHK seluruh buruhnya. Uniknya, sebelum di-PHK perusahaan telah mendatangkan buruh dari agen tenaga kerja. Kasus masuk ke PHI Bandung dengan kekalahan di pihak buruh. Semua buruh di-PHK. Serikat di perusahaan tersebut bubar. Temuan lain adalah PHK terhadap serikat dengan alasan renovasi perusahaan. Adalah Hotel Papandayan Bandung Jawa Barat sebagai pelaku PHK plus pemberangus serikat terhadap 198 orang buruhnya.

PHK dengan cara memberangus serikat terjadi pula di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, seperti SP Angkasa Pura I, SP Bank Mandiri, SP Dok Koja Bahari Grup, SP Forum Pegawai Merpati Nusantara Airliner, SP Pertamina, Serikat Karyawan Garuda Indonesia, SP Pertamina, SP PT IGLAS, SP PT Pos Indonesia. Di BUMN, selain untuk mencegah tidak adanya PKB proburuh, dan tidak ada serikat proburuh, pemberangusan diarahkan untuk menyukseskan program privatisasi. Di Garuda Airlines misalnya, telah lima tahun perundingan PKB mengalami *deadlock*. Menurut Serikat Pekerja Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia, manajemen berupaya mengulur-ulur perundingan PKB.

Dari berbagai pola PHK dan pemberangusan serikat, menurut Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), secara umum terdapat 25 pola pengusaha untuk memarjinalkan buruh. Pola-pola tersebut berlaku pula di Badan Usaha Milik Negara. Di antara pola tersebut terdapat kategori halus dan primitif. Kategori halus untuk memberangus serikat, yakni: memberikan surat peringatan, mutasi, demosi, memberikan jabatan dan gaji tinggi, tawaran pensiun dini, pesangon dengan alasan perusahaan mau tutup, serta buruh dirumahkan. Pola primitif, seperti; menyewa preman, menyewa polisi, membuat serikat tandingan, tidak mengakui serikat yang telah berdiri dan didukung anggotanya, serta mengintervensi pemilihan pengurus serikat. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan buruh murah dan patuh, yang diwakili oleh buruh kontrak dan *outsourcing*.

Upah Riil dan Dampak Privatisasi

Upah 2009 ditetapkan dengan kenaikan rata-rata 11,16 persen. Sementara upah 2010 mengalami kenaikan rata-rata 10 persen. Untuk masa 2009, upah tertinggi

ditetapkan di Papua Rp 1,216,100, Nangroe Aceh Darusalam Rp 1,200,000, Papua Barat Rp 1,180,000, DKI Jakarta Rp 1,069,865, Kalimantan Timur Rp 955,000. Sedangkan upah terendah di tetapkan di Jawa Timur Rp 570,000, Jawa Tengah Rp 575,000, Jawa Barat Rp 628,191, Lampung Rp 691,000, Kalimantan Barat Rp 705,000.

Sementara UMP 2010, angka terbesar ditetapkan di Papua Rp 1,316,500, Nangroe Aceh Darussalam Rp 1,300,000, Papua Barat Rp 1,210,000, Jakarta Rp 1,118,009, Kalimantan Selatan Rp 1,024,500. Sedangkan upah terkecil ditetapkan di provinsi Jawa Timur Rp 630,000, Jawa Tengah Rp 660,000, Jawa Barat Rp 671,000, Gorontalo Rp 710,000, Kalimantan Barat Rp 741,000. Apakah upah 2009 dan 2010 mencerminkan kebutuhan riil buruh dan keluarganya?

Upah 2010 dihitung berdasarkan angka inflasi dan survei komponen hidup layak (KHL) buruh oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Menurut pemerintah, dari sisi prosentase, upah 2010 tidak semua memenuhi KHL; 4 provinsi yang UMP-nya melampaui KHL yaitu Sumatera Utara (105,34%), Kalimantan Selatan (102,76%), Kalimantan Tengah (104,16%) dan Sulawesi Utara (102,45%), selebihnya 29 provinsi berada di bawah 100%, yang terendah ditempati Maluku yang hanya 59,96% dari KHL.

Selain itu, sebagaimana dikatakan oleh Bank Indonesia, kenaikan upah biasanya direspon oleh spekulasi pedagang untuk menaikkan harga barang dagangan. Menurut BPS, laju inflasi pada November 2009 sebesar 0,18 persen, inflasi selama Januari-November 2009 sebesar 3,86 persen, sedangkan laju inflasi komponen inti pada November 2009-November 2008 sebesar 4,29 persen. Menurunya angka inflasi diakibatkan beberapa kelompok bahan makanan, kelompok transpor dan komuniasi & jasa keuangan mengalami penurunan. Sementara kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga terus mengalami kenaikan.

Namun, faktor inflasi tidak semata-mata diakibatkan spekulasi pedagang. Spekulasi muncul karena kebijakan penentuan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Apa yang dirilis oleh BPS di atas memperlihatkan kenaikan harga pada barang yang telah mengalami swastanisasi.

Selain itu, ketetapan upah minimun ditentukan pula oleh tingkat kepatuhan pengusaha dalam menerapkan keputusan UMP. Dalam hal ini, dituntut fungsi pengawasan pemerintah untuk memastikan buruh dibayar sesuai dengan haknya. Faktanya, atas nama krisis keuangan beberapa perusahaan mengajukan penangguhan upah. Pada 2009 beberapa perusahaan mengaku tidak mampu membayar upah sesuai UMP; 83 perusahaan di Jawa Barat, 77 perusahaan di Jawa Tengah, 58 di Jawa Timur, 28 perusahaan di Yogyakarta, 8 perusahaan di Banten, 6

perusahaan di Sumatera Selatan, 5 perusahaan di Jakarta, dan 1 perusahaan di Lampung, mengaku tidak mampu menaikkan upah (menangguhkan). Proposal penangguhan upah terus bergulir hingga Maret 2009. Pada 2010 beberapa perusahaan pun mengajukan proposal penangguhan upah. PT Primarindo Asia Infrastructure di Kota Bandung misalnya, selama tujuh tahun memberlakukan kebijakan penangguhan upah minimum. Perusahaan tersebut mengaku mengalami kesulitan keuangan.

Dalam Kepmenakertrans 2003 mengenai Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum disebutkan bahwa penangguhan upah harus melalui tahapan perundingan, pelaporan dan audit publik. Sayangnya, hingga detik ini, peranan pemerintah untuk memastikan perusahaan mana yang benar-benar terkena dampak krisis tidak terlihat. Karena itu, mekanisme sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan ketetapan upah pun tidak muncul. Selain itu, penerapan upah minimum kerap diberlakukan sebagai upah maksimum dan diberikan kepada buruh yang telah bekerja lebih dari satu tahun.

Pada satu sisi, kenaikan upah merupakan perjuangan serikat buruh, baik di dewan pengupahan maupun melalui aksi-aksi protes. Hal ini perlu diapresiasi. Namun, serikat buruh yang mengirimkan anggota di dewan pengupahan tetap perlu mengontrol perwakilannya. Agar usulan dan perjuangan anggota di dewan pengupahan dapat berjuang maksimal untuk kepentingan buruh. Hal tersebut berlaku pula untuk anggota serikat yang didelegasikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Menanggapi perbedaan upah di tiap daerah, terdapat hal kritis untuk dipikirkan. Jika ditinjau dari teori inflasi, terkesan terjadi fluktuasi harga barang-barang jadi. Tapi, bukankah harga riil kebutuhan pokok tidak bergeser signifikan di tiap daerah. Harga beras misalnya, di Kota Bogor dan di Kota Bandung harganya sama, Rp 5.500. Fenomena tersebut dapat pula dilihat dalam harga rokok. Rokok Marlboro misalnya, di semua kota di Indonesia harganya Rp 10.500, hanya di kios-kios kecil harganya Rp 11.000. Lalu, untuk kepentingan siapa perbedaan upah di tiap daerah?

Lainnya, adalah soal tuntutan perbaikan upah. Selama ini upah selalu disimetriskan dengan daya belanja upah. Upah yang diterima kerap tidak dapat meng-*cover* kebutuhan dasar buruh. Beberapa kebutuhan dasar buruh, semisal transpor dan pendidikan anak berkaitan erat dengan kebijakan umum perekonomian. Melonjaknya ongkos transpor tidak lain karena kebijakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (swastanisasi). Khusus dalam kebutuhan beras, beras impor Thailand terkesan lebih murah daripada beras Cianjur. Namun, di balik berbedanya harga beras terdapat ketidakadilan. Petani Cianjur harus menanggung semua biaya produksi pertanian, sementara beras Thailand mendapatkan keringanan-keringanan, baik di negara asalnya maupun oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, bukankah tuntutan perbaikan upah saja tidak akan bermakna tanpa diiringi dengan penolakan swastanisasi? Untuk mendapatkan akses beras berkualitas dan murah, bukankah

semakin terbuka peluang terjadi kerjasama antara serikat tani dengan serikat buruh? Sejauh mana peluang tersebut terbuka, akan dipaparkan di bawah.

Resistensi

- Semester II 2009 aksi melibatkan lebih dari 340,863 orang meningkat terhadap Semester I 2009 (lebih dari 279.472 orang). Semester II 2009 terjadi 269 kali aksi menurun terhadap Semester I 2009 (445 kali aksi). Semester II 2009, intensitas aksi menurun, tapi partisipasi aksi bertambah. Aksi protes terbanyak diwakili oleh Sektor Aliansi Serikat.
- Setiap aksi diikuti oleh peserta lebih dari 100 orang. Dalam satu hari diperkirakan terjadi lebih dari 2 kali aksi di lokasi yang berbeda.
- Selama Januari-Desember 2009 terjadi 714 kali aksi protes dengan melibatkan lebih dari 620.335 orang. Massa aksi terbanyak disumbang oleh Aliansi Serikat 43% (171 kali aksi), RTMM 13% (38 kali aksi), Pendidikan 9% (59 kali aksi), Pelayanan Publik 10% (54 kali aksi), TSK 7% (78 kali aksi), LEM 7% (38 kali aksi), Transportasi & Komunikasi 3% (80 kali aksi), KEP 2% (38 kali aksi), Perkayuan & Kehutanan 2% (30 kali aksi), Perdagangan, Umum & Jasa 1% (43 kali aksi), Perkebunan 1% (11), Farmasi & Kesehatan 1% (21 kali aksi), Asuransi & Keuangan 1% (13 kali aksi), Listrik, Air & Gas 1% (8 kali aksi), Percetakan & Penerbitan 0% (1 kali aksi), Pertanian & Media Massa 0% (25 kali aksi), Konstruksi 0% (6 kali aksi).
- Aksi protes dilakukan dengan berbagai metode; audiensi, hearing, konferensi pers, rapat akbar, pawai, rally, mogok kerja dan pendudukan pabrik. Sasaran protesnya pun dinamis; di depan pabrik, di depan rumah pemilik perusahaan dan pusat-pusat pemerintah.
- Aksi protes terbanyak terjadi pada Mei 2009 (156 kali); menyusul April (81 kali); Juni (68 kali); November (61 kali); Desember (56 kali); Oktober (55 kali); Februari (50 kali); Januari (48 kali); Maret (42 kali); September (39 kali); Juli (34 kali), Agustus (24 kali).
- Massa terbanyak terjadi pada Mei lebih dari 108.471 orang; Juli 99.034 orang. Partisipasi massa berkurang pada September 10.290 orang dan Agustus 5.608 orang.
- Massa aksi beserta intensitasnya selama Januari-Desember menuntut hak-hak Normatif 50%, Kebijakan Pemerintah 22%, menolak PHK 11%, Kebebasan Berserikat 7%, Upah 7%, Lain-lain 3%. Intensitas dan massa yang terlibat meningkat dibanding periode 2008. Rata-rata tuntutan meningkat 10 persen terhadap tuntutan 2008.
- Tuntutan terhadap pemenuhan hak-hak normatif mencerminkan tingkat pelanggaran hak-hak dasar buruh dan serikat buruh semakin tinggi.

Grafik Perkiraan Massa Aksi Per Sektor
Januari-Desember 2009

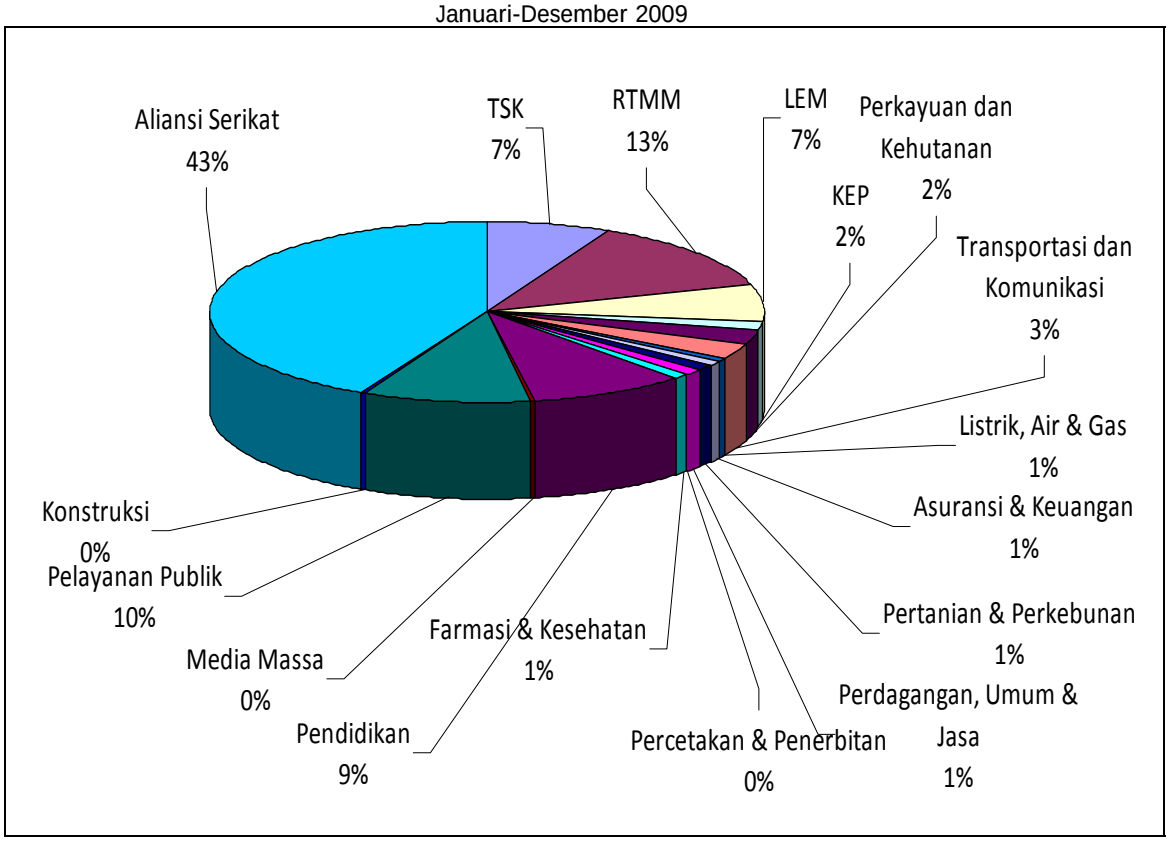

Pusat data dan Informasi LIPS 2009

Selama semester II 2009 aksi melibatkan lebih dari 340,863 orang meningkat terhadap Semester I 2009 yang mencapai 279.472 orang. Semester II 2009 terjadi 269 kali aksi menurun terhadap Semester I 2009 (445 kali aksi). Semester I 2009, aksi paling banyak dilakukan pada November dan Desember 2009. Semester I dan II 2009, aksi terbanyak oleh Sektor Aliansi Serikat.

Selama Januari-Desember 2009 terjadi 714 kali aksi protes dengan melibatkan lebih dari 620.335 orang. Angka tersebut meningkat terhadap aksi protes Januari-November 2008 yang mencapai 505 kali. Pada 2008 aksi paling banyak dilakukan pada November. Pada 2009 aksi paling banyak dilakukan pada Mei.

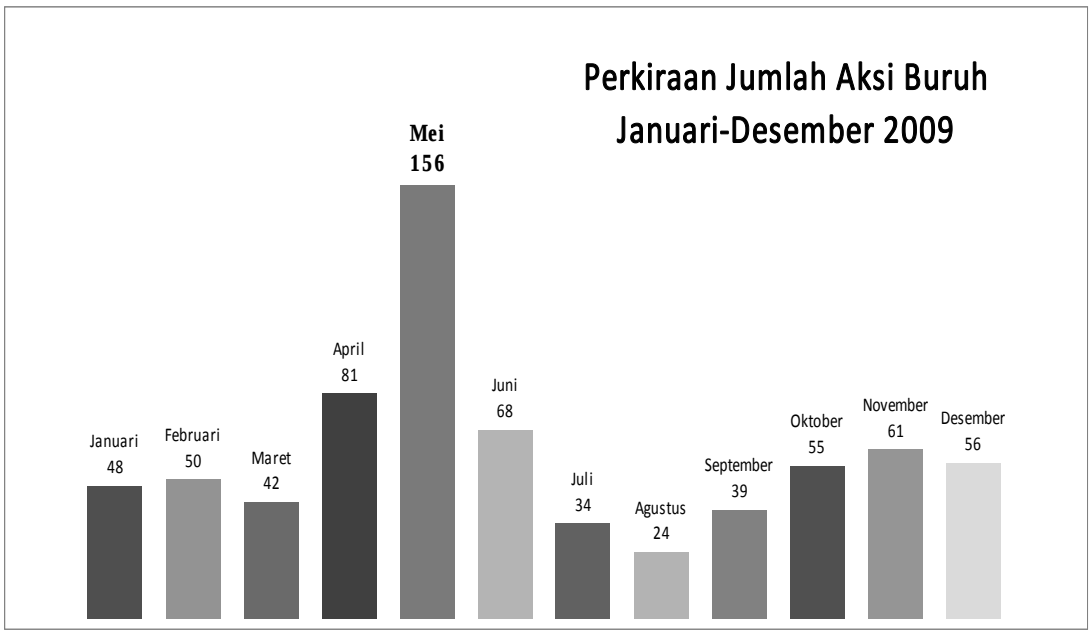

Yang menarik, pada 2009 aksi diwakili oleh Sektor Aliansi Serikat, sementara pada 2008 diwakili oleh Sektor TSK. Sektor Aliansi Serikat diidentifikasikan sebagai sektor-sektor yang menggabungkan diri dalam pelbagai bentuk; forum, aliansi, jaringan, komite, front, paguyuban dan cara-cara lain yang memungkin beragam serikat berkumpul. Ada pelbagai kemungkinan kenapa Sektor Aliansi meningkat. Pertama, 2009 adalah masa-masa pemilihan presiden. Pada masa itu, ada dua arus utama; yang menolak pemilu presiden dan yang mendukung pemilu presiden. Suara yang menolak/memboikot tidak begitu nyaring. Sedangkan pihak yang mendukung pilpres termasuk serikat-serikat mainstream. Mereka menggunakan beragam nama aliansi. Dukungannya pun berbeda, ada yang mendukung SBY-Boediono, ada yang mengusung JK-Wiranto dan ada pula yang mendukung Megawati-Prabowo. Pemilu presiden dimenangkan oleh SBY dengan suara hingga 60,80% dari jumlah suara 121.504.481. Sebagai catatan, pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif diwarnai banyak kecurangan. Di sisi lain, suara kemenangan SBY diikuti oleh angka golongan putih/golput.

Kedua, Sektor Aliansi Serikat dimungkinkan karena kesamaan kepentingan di antara gerakan sosial. Hal ini terlihat dari kecenderungan aksi yang lebih banyak terjadi di Mei 2009. Sebagaimana diketahui, hanya beberapa gelintir serikat yang tidak merayakan Mei sebagai bulan perlawanan. Tentu saja, pada bulan tersebut ada banyak momentum yang mempersatukan; May Day, Hari Pendidikan Nasional, Tragedi Semanggi, dan jatuhnya Rejim Diktator Soeharto. Sebagai catatan, kepentingan yang dimaksud adalah memanfaatkan momentum untuk mendesakkan isu. Ukuran lain untuk menilai kualitas persatuan Sektor Aliansi Serikat dapat

Yang menarik, pada 2009 aksi diwakili oleh Sektor Aliansi Serikat, sementara pada tahun 2008 diwakili oleh Sektor TSK.

diteropong dari kecenderungan tuntutan.

Pada semester I 2009 tuntutan terbanyak berkisar pada hak-hak normatif. Semester II 2009 tertinggi adalah tuntutan normatif (25%) Selama Januari-Desember 2009 tuntutan massa aksi berkisar pada tuntutan hak-hak normatif (50%). Kemudian diikuti oleh Kebijakan Pemerintah 22%, menolak PHK 11%, Kebebasan Berserikat 7%, Upah 7%, Lain-lain 3%. Fenomena ini tidak bergeser banyak terhadap Januari-November 2008, yakni menuntut hak-hak normatif (44,05%).

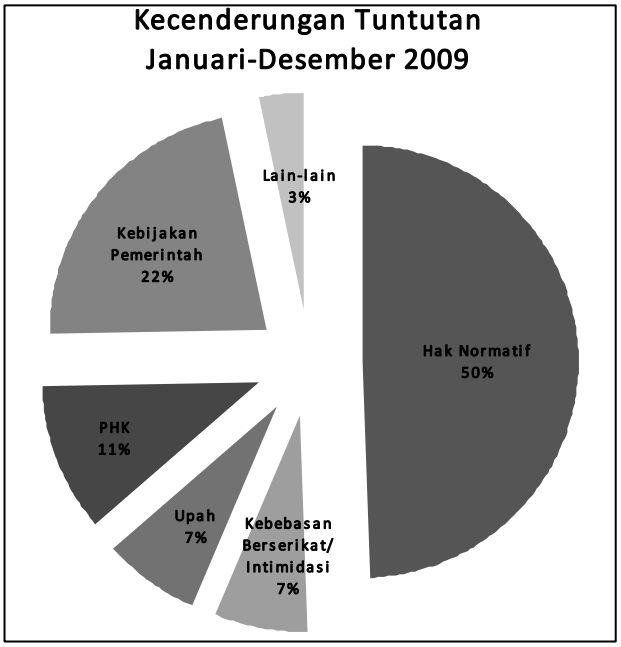

Dengan demikian, Selama Januari-Desember 2009 aksi-aksi lebih banyak dilakukan oleh Sektor Aliansi Serikat dengan menuntut hak-hak normatif. Hal ini memberikan makna. Pertama, berbeda dengan keluhan para pengusaha mengenai daya saing, selama 2009 telah terjadi pelanggaran hak-hak normatif. Hak-hak normatif dalam UUK No. 13/2003 misalnya, yang ditetapkan penuh kompromi dan banyak mengakomodir kepentingan pengusaha nyatanya, banyak dilanggar.

Kedua, aksi-aksi protes merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini diperlihatkan dengan tuntutan Kebijakan yang menempati urutan kedua setelah hak-hak normatif. Selain itu, tuntutan normatif memaknai sebuah kenyataan, bahwa kebijakan pemerintah selama masa krisis tidak menjawab hak-hak dasar rakyat. Sebaliknya, terjadi pembiaran negara. Terdapat kecenderungan kuat, pelanggaran pengusaha terhadap aturan perundangan diamini oleh pemerintah.

Ketiga, ekspresi ketidakpuasan buruh dan serikat buruh menemukan salurannya dalam Sektor Aliansi Serikat. Sebagaimana biasa, nama-nama Aliansi Serikat per tahunnya mengalami pergantian. Hanya beberapa yang bertahan dengan anggota aliansi kerap berkurang. Selama 2009 terdapat beragam nama Aliansi, seperti Komite Solidaritas Nasional (KSN), Front Perjuangan Rakyat (FPR), Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI), Aliansi Buruh Kawasan (ABK). Di beberapa daerah lebih banyak nama lagi. KSN mewadahi serikat buruh BUMN dan non-BUMN, ABK mewadahi serikat buruh di kawasan Cakung Jakarta Utara, FPR dan FORI mewadahi berbagai elemen serikat.

Penutup

Berbeda dengan Aliansi Serikat di atas, terdapat sebuah forum yang digagas oleh segelintir elit serikat dan pengusaha: Forum Bipartit Nasional (FBN). FBN digagas oleh oleh KSPI, KSPSI, KSBSI, Sekum FSP BUMN, DPP Sarbumusi. FBN diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hubungan industrial dan bagaimana menghadapi ACFTA. FBN telah dideklarasikan untuk; 1) Menyelesaikan masalah hubungan industrial secara bipartit; 2) Membentuk tim kerjasama bipartit; 3) Membentuk tim kajian peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 4) Membentuk tim sosial dialog; 5) Membentuk sekretariat bersama (sekber) dari tingkat pusat hingga kabupaten. Sekber FBN difasilitasi oleh APINDO tanpa dikenakan biaya sewa. Apakah FBN dapat mewakili kepentingan dasar buruh dan serikat buruh?

Di luar niat luhur tersebut, terdapat pandangan lain mengenai FBN. Salah satunya adalah yang mengatakan FBN merupakan upaya untuk menyukseskan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 agar lebih ramah pasar (maksimisasi fleksibilisasi tenaga kerja). FBN telah mendapat restu dari SBY. Tapi, apakah pembentukan FBN mendapatkan restu dari serikat di bawahnya?

Serikat buruh tingkat pabrik dan buruh tahu betul bahwa selama 2009 terjadi pelanggaran hak normatif. Pelanggaran tersebut diamini oleh pemerintah berkuasa. Atas nama krisis keuangan global pengusaha dengan mudah menekan upah dan dengan murah melakukan PHK. Bahkan, terdapat kecenderungan memandulkan serikat serta melikuidasi serikat yang proburuh.

Dalam keadaan demikian, menaikkan kualitas tuntutan akan terlalu sulit. Sedikit demi sedikit anggota serikat digerogoti oleh proyek kontrak dan *outsourcing*. Ditambah pula dengan upaya-upaya kriminalisasi aktivis serikat. Yang perlu dipikirkan bagaimana cara menyelamatkan anggota serikat dari kriminalisasi dan PHK. Dari konteks ini, mengorganisir buruh kontrak dan *outsourcing* semakin mendesak untuk dilakukan. Tidak sedikit bahwa buruh tidak permanen dipertentangkan dengan buruh permanen. Entah mana yang dimanfaatkan pengusaha. Yang jelas, memelihara dan merawat buruh permanen tetap penting dan memulai mengorganisir buruh tidak permanen semakin mendesak dilakukan.

Karena yang diserang adalah kekuatan serikat. Maka, mesti dicari cara mempertahankan keberadaan serikat. Mengiringi hal ini adalah penguatan kemampuan anggota dan penambahan anggota, yang di dalamnya adalah pendidikan. Pendidikan yang dimaksud bukan saja *training* dan seminar. Pendidikan yang mampu menggali pemahaman dan pengalaman anggota. Untuk memaksimalkan peran ini, kiranya dapat bekerjasama dengan Non-Government Organization (NGO). Dengan demikian, upaya kerjasama dengan serikat lain tetap relevan untuk dilakukan.

Sebagaimana diidentifikasi oleh Demos, bahwa keterbukaan ruang politik pasca-Reformasi telah dibajak oleh kekuatan-kekuatan lama. Kekuatan tersebut, hakikatnya adalah kekuatan antidemokrasi. Karena itu, serikat buruh perlu memeriksa ulang sejauh mana kesiapan perspektif, politik dan organisasi menghadapi situasi-situasi mendatang, terutama memanfaatkan keterbukaan politik. ***

Tentang Penulis

Fauzan, kelahiran Jakarta (1 Juli 1976) menyelesaikan SD-nya di Yogyakarta, SMP dan SMU di Bandung. Pernah mengenyam jurusan editing (DIII) Universitas Padjadjaran, tapi pindah ke Jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan di universitas yang sama. Sejak mahasiswa akrab dan terlibat dengan berbagai dunia gerakan sosial. Salah satu karyanya adalah *Mengubur Peradaban: Politik Pelarangan Buku di Indonesia*, diterbitkan YSIK-LKIS Yogyakarta. laki-laki yang pindah-pindah sekolah ini (Jakarta, Yogyakarta dan Bandung) memercayai bahwa gerakan sosial harus juga ditopang oleh kekuatan pengetahuan, argumentasi data dan fakta. Ia banyak terlibat dalam berbagai riset, salah satunya adalah penelitian *Dampak MFA terhadap Industri Garmen dan Tekstil dan Buruh (2003)* kerjasama LIPS dengan *Clean Clothes Campaign* (CCC) Netherland. Saat ini berperan sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Bogor.
Dapat dihubungi di caturmurti@yahoo.com atau fauzan@lips.or.id

Komite Solidaritas Nasional merupakan organisasi yang memiliki platform: antiunion busting, antikontrak dan outsourcing dan antiprivatisasi. Sejak didirikannya, KSN melibatkan beragam serikat buruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga non-BUMN. Saat ini, Sekretariat Bersama KSN di: JL. DIPONEGORO NO. 74 JAKARTA.
Dapat dihubungi melalui Telp: 081210590010
(Koordinator: Anwar "Sastro" Ma'ruf) atau ksnpusat@gmail.com.

Jafar Suryomenggolo,
Menyelesaikan Strata S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2000. Saat ini Jafar sedang menyelesaikan program pasca-sarjana bidang studi kawasan Asia Tenggara, Universitas Kyoto, Jepang. Dapat dihubungi di
jsuryomenggolo@gmail.com

ANGGA NATARIANDI lahir dan tumbuh di Bogor Jawa Barat yang hobi bersepakbola ini menyelesaikan Strata 1 (Ekstensi) di Universitas Indonesia Program S1 Ilmu Politik, Politik Perbandingan (2009). Sejak mahasiswa beragam kegiatan ilmiah-akademik ia tekuni. Angga aktif di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Bogor Jawa Barat.
Dapat dihubungi melalui: natariandi@gmail.com.

Lengkapi koleksi buku Anda dengan Jurnal Sedane.
Harga: Rp. 15.000 per eksemplar; Setahun Rp. 30.000 (2 Edisi); 2 Tahun Rp 50.000 (4 Edisi)
Silahkan menghubungi: LIPS Bogor
Jl. Dewi Sartika 52 F Bogor Jawa Barat Indonesia
Telp/Fax: 02518344473 Web/Email: lips.or.id/lips@lips.or.id

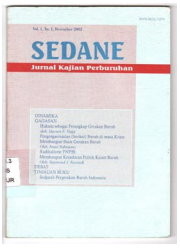

Jurnal Sedane Vol. 1. No. 1 2002 berisi (1) *Hukum Sebagai Perangkap Gerakan Buruh* oleh Marsen S. Naga, (2) *Pengorganisasian (Serikat) Buruh di Masa Krisis: Membangun Basis Gerakan Buruh* oleh Iman Rahmana, (3) *Radikalisme FNPBI: Membangun Kesadaran Politik Kaum Buruh* Raymond J. Kusnadi. (4) *Wawancara dengan DR Arief Budiman.* (5) **Tinjauan Buku:** *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia.*

Tulisan pertama, Marsen, mendeskripsikan bagaimana hukum, merupakan bentuk pengendalian gerakan buruh. Penulis menjelaskan bahwa hukum perburuhan di Indonesia terbanyak di kawasan Asia Tenggara dan tidak membuat persoalan perburuhan berkurang. **Kedua**, Iman, mengangkat refleksi pengorganisasian sebagai upaya strategis dalam membangun gerakan buruh di masa depan. Karena itu, perlu dipikirkan bagaimana melakukan pengorganisasian secara efektif. **Ketiga**, Raymond, mendeskripsikan situasi kelahiran organisasi buruh yang dianggapnya berkarakter radikal, kemudian menjelaskan pilihan bentuk organisasi FNPBI.

Jurnal Sedane Vol 1 No. 2. 2003 menghadirkan **Gagasan**: (1) *Untuk Apa Serikat Buruh?* oleh Allan Flanders, (2) *Peranan Pekerja Dalam Pembangunan Nasional* oleh M. Dawam Rahardjo, (3) *Dana Asing, LSM, dan Serikat Buruh: Sebuah Tinjauan Kritis* oleh Marsen S. Naga. **Debat**: M. Rodja dengan Rustam Aksam. **Tinjauan Buku**: "Poor People's Movement: How They Succeed, Why They Fall" karya Jessica Champagne. **Tokoh**: Tan Malaka: Pejuang Revolusioner Sejati.

Tulisan pertama, Allan Flanders, memberikan latar belakang pemikiran kenapa buruh berserikat dan beragam teoretisinya. **Kedua**, Dawam Rahardjo memaparkan sejarah perkembangan pemikiran tentang peran pekerja dalam pembangunan eknomi. **Ketiga**, Marsen, melihat ketergantungan LSM terhadap *funding.* Keterlibatan LSM-LSM dalam pembangunan serikat buruh akhirnya 'menularkan' watak yang sama terhadap serikat buruh. Penulis menawarkan perubahan pola relasi LSM dan serikat buruh.

Jurnal Sedane Vol. 1 No. 3 2003 menghadirkan **Gagasan: (1)** *Kaum Buruh dan Politik Elektoral oleh* Wilson. (2) *Tinjauan Al-Quran atas Etika Relasi Buruh-Majikan oleh* Umnia Labeba. (3) *Tinjauan Literatur Hukum Perburuhan di Indonesia oleh* Gregor Samsa. (4) *Buruh di Cina oleh* I. Wibowo. **Debat:** Sukarno dengan Sutanto. **Tokoh:** *Chun Tae-il: Cahaya Inspirasi untuk Gerakan Buruh.* **Tinjauan Buku:** *"Profit Over people. Neoliberalism and Global Order"* karya Noam Chomsky).

Tulisan pertama, Wilson, mengeksplorasi mengenai praktik politik elektoral dengan isu-su perburuhan. Dengan mendeskripsikan beberapa contoh gerakan buruh di berbagai mancanegara, beliau melihat perlunya gerakan buruh Indonesia untuk turut andil dalam pagelaran politik. **Kedua**, Umi mencoba menggali nilai-nilai keadilan dari perspektif Islam. Diuraikannya bagaimana Islam memiliki keberpihakan untuk menegakkan keadilan bagi umat manusia, terutama kaum buruh. **Ketiga,** Gregor Samsa, menganalisis seputar paradigma yang dianut oleh para penulis dan penerbit buku-buku hukum perburuhan sejak Orde Baru hingga Era Reformasi. **Keempat**, DR. Ign. Wibowo, mendeskripsikan gerakan buruh di Cina. Proses reformasi di negara raksasa tersebut, membawa permasalahan tersendiri bagi kaum buruh.

Jurnal Sedane Vol 2 No. 1, 2003 mengangkat **Gagasan: (1)** *Industri Tekstil Indonesia dalam Multi-Fibre Agreement (MFA) dan Perdagangan Bebas* oleh I. Fahmi, (2) *Runtuhnya Industri Tekstil Indonesi oleh* Fauzan, (3) *Runtuhnya Industri Tekstil: Tantangan Baru Bagi Gerakan Buruh Indonesia oleh* I. Fahmi. **Debat:** Ketua Bidang Investasi KADIN dengan Dr. Vedi R. Hadiz. **Tinjauan Buku:** *Perempuan: Potensi Kekuatan Gerakan Yang Lumpuh.* **Tokoh:** *Sekilas Tentang Semaoen.*

Tulisan-tulisan tersebut menyoroti salah satu faktor, yang menghancurkan industri TPT, yakni MFA. *Multi-Fiber Arrangement* (MFA) merupakan perjanjian global yang sudah 30 tahun mengatur ekspor TPT 47 negara dengan jatah kuota di pasar Eropa dan Amerika. Pada 1994, bersamaan dengan pembentukan WTO, dalam putaran Uruguay disepakati untuk menyudahi rejim kuota dan diganti dengan liberalisasi perdagangan TPT. Ke 47 negara berkembang pengekspor TPT, termasuk Indonesia, terancam hancur.

Jurnal Sedane Vol. 2 No. 2 2004 menghadirkan **Gagasan: (1)** *Demokrasi dan Oligarki di Serikat Buruh* oleh SM Lipset, MA Trow dan JS Coleman, (2) *Buruh, Serikat Buruh dan Demokrasi oleh* Arief W Djati, (3) "*Taxes to the Rich, Welfare to the Poor": Gerakan Buruh dan Politik Progresif di Korea* oleh Wilson. **Debat:** Franz Magnis-Suseno, Ken Budha Kusumandaru, Rostinah, dan Ragil Sukarti. **Tinjauan Buku:** "*Economic Development and Political Change in a Workers' Community in Jakarta, Indonesia*". **Tokoh:** *H. Misbach.*

Tulisan pertama, SM Lipset, MA Trow dan JS Coleman membedah praktik oligarki di serikat buruh. Oligarki merupakan salah satu penyebab serikat tidak berakar dan tak terkontrol. **Kedua**, Arief W Djati membahas praktik demokrasi serikat buruh dan Organisasi Non-Pemerintah. Ia berkesimpulan bahwa serikat-serikat memerlukan pendalaman praktik demokrasi. **Ketiga**, Wilson menulis kemenangan gerakan Buruh di Korea.

Jurnal Sedane Vol. 3 No. 1 2005 mengangat **Gagasan: (1)** *Demokrasi Serikat Buruh: Sebuah Tinjauan Teoretis* oleh Michele Ford, (2) *Serikat Buruh Demokratis dalam Perubahan Situasi Perburuhan 1997-2004* oleh Maria Dona, (3) *Perihal Pendanaan Serikat Buruh: Refleksi Seorang Buruh* oleh Rizal A. Hidayatullah. **Debat:** Beno Widodo (KASBI) dengan Saepul Tavip (ASPEK). **Tinjauan Buku:** *Jalan Tak Berujung: Sejarah Perlawanan Buruh dan Perkotaan Masa Kolonial.* **Tokoh:** *Profil Agus Wahyuni*

Tulisan **pertama**, Michele Ford, mengurai teori-teori dan demokrasi di serikat buruh. Menurutnya, demokrasi serikat buruh seringkali sulit dicapai, karena serikat buruh merupakan organisasi hibrida yang ingin berfungsi sebagai organisasi formal. **Kedua,** Maria Dona, mengupas demokrasi yang berhubungan dengan pengorganisasian anggota/buruh. **Ketiga,** Rizal A Hidayatullah, membahas tentang pentingnya independensi serikat dengan pendanaan dari anggota. Rizal menawarkan pentingnya kerja massa untuk menjaga independensi dan menguatkan kerja-kerja serikat.

Jurnal Sedane Vol. 3, No. 2 2006 mengangkat **Gagasan: (1)** *Politik Gerakan Buruh di asia Tenggara* oleh Vedi R. Hadiz, (2) *Relasi kelas Buruh, kuasa dan Kapital dalam Kontestasi Perpolitikan Lokal* oleh S. Aminah. **Debat** Eli Salomo dengan Michele Ford. **Tinjauan Buku:** Peran NGO dalam Gerakan Buruh Indonesia. **Tokoh:** *Profil Munir.* **Dinamika:** Dinamika Perburuhan Indonesia dalam Tiga Tahun Terakhir

Tulisan **pertama**, Vedi R. Hadiz mengangkat situasi buruh di empat negeri Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina. Hadiz berpendapat bahwa tradisi keserikatburuhan politik merupakan ciri lanskap politik masyarakat Asia Tenggara. Namun, tradisi tersebut nyaris hilang, khususnya pada saat industrialisasi. **Kedua,** S. Aminah, menunjukkan bahwa perjuangan kelas buruh berkait erat dengan keberadaan pemerintah dan hegemoni kapitalisme. Keduanya turut memperburuk kondisi buruh.

Jurnal Sedane Vol. 4 No. 1 2007 mengangkat **Gagasan: (1)** *Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggung Jawab Negara* oleh Indra Tjandraningsih dan Hari Nugroho, (2) *Kontrak dan Outsourcing: Adakah Jalan Keluar bagi Serikat Buruh,* oleh Jafar Suryomenggolo dan Timboel Siregar, (3) *Konflik Antar Serikat Buruh* oleh Endang Rokhani. **Wawancara** bersama Anwar "sastro" Ma'ruf. **Tinjauan Buku:** Dinamika kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto. **Tokoh:** *Profil Budhy Prahatmo.* **Dinamika:** Dinamika Perburuhan Tahun 2007 Semester I

Tulisan **pertama,** Indrasari Tjandraningsih dan Hari Nugroho, mengurai masalah pasar kerja fleksibel dan pentingnya tanggung jawab negara. Menurut analisis mereka, pasar tenaga kerja dapat diminimalisir dengan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi warga negara. **Kedua,** Jafar Suryomenggolo dan Timboel Siregar, menampilkan perdebatan antara yang menerima dan menolak model kerja kontrak dan *outsourcing*. **Ketiga**, Endang Rokhani menulis *Konflik Antar Serikat Buruh* di dalam sebuah perusahaan dan bagaimana dampaknya terhadap *bargaining position* buruh.

Jurnal Sedane Vol. 4 No. 2 2008 mengangkat **Gagasan: (1)** *Sistem Jaminan Sosial Indonesia: Tunjangan Untuk Siapa?*oleh Dinna Wisnu, Ph.D, (2) *Catatan Reflektif Kebebasan Berserikat* oleh Fauzi Abdullah, *Perdebatan tentang Negara: Tanggapan atas Tulisan "Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja dan Tanggung jawab Negara* oleh Coen Husain Pontoh, I Fahmi Panimbang, dan Muslimin Abdilla. **Wawancara** bersama Yoon Youngmo (Koordinator Internasional Korea Labour & Society Institute (KLSI), Seoul, Korea. **Tokoh** *Oey Hay Djoen (1929-2008).* **Tinjauan Buku:** *Direktori Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia.* **Dinamika:** Dinamika Perburuhan Tahun 2007.

Tulisan pertama, Dinna Wisnu, Ph. D., mengulas orientasi Sistem Jaminan Sosial, dari segi peraturan pelaksana maupun dari mekanisme pelaksanaannya. Menurutnya, UU SJSN UU No. 40/2004 dalam proses pembuatannya terdapat banyak kompromi politik. **Kedua**, Fauzi Abdullah menyoroti kebebasan berserikat yang belum memberikan *impact* bagi buruh. Fauzi menyayangkan situasi yang di hadapi serikat buruh semakin berat sementara buruh terpisah-pisah.

Jurnal Sedane Vol 5. No. 1 2008 mengangkat **Gagasan: (1)** *Membangun Pakta Sosial Berbasis Gerakan Buruh* oleh Sofian M. Asgart. (2) *Melakukan Pengukuran Kinerja Serikat Pekerja* oleh Aryana Satrya. (3) *Pengadilan Perburuhan di Jerman: sekedar refleksi untuk PHI* oleh Yasmine Soraya. **Wawancara** bersama pimpinan serikat buruh Jerman**,** Firsching. **Tokoh:** *Profil: Mansour Fakih.* **Tinjauan Buku:** Globalisation and Labour; the New 'Great Transformation' karya Ronaldo Munck. **Dinamika:** *Dinamika Perburuhan Indonesia Dalam Tahun 2008 Semester I.*

Tulisan pertama, Sopian Asgart, menawarkan tesis Pakta Sosial untuk memperluas basis gerakan sosial dengan aliansi-aliansi yang lebih luas dan strategis. Pakta sosial ini meliputi berbagai kegiatan seperti berbagi informasi, konsultasi, negoisasi dan pengambilan keputusan bersama. **Kedua,** Aryana Satria, memberikan masukan bagaimana mengukur kinerja serikat buruh dalam pencapaian kebutuhan anggota serikat pekerja. **Ketiga,** Yasmine Soraya, mengupas peranan sistem peradilan perburuhan di Indonesia dan Jerman.

Jurnal Sedane Vol. 6 No. 2 2008 mengangkat **Gagasan:** (1) *Resesi Global dan Dampaknya Terhadap Pekerja di Dunia* oleh **Paul L. Quintos,** (2) *Krisis Finansial Global: Petaka Bagi Buruh* oleh Syarif Arifin, Fauzan dan Darisman, (3) *Krisis Finansial dan Serikat Buruh: Studi Mengenai Strategi Serikat Buruh di Eropa* oleh Yasmine Soraya. **Debat**: Kippes (IG Metall) dengan Jan Schlemermeyer (DGB). **Tokoh:** Profil Bambang Hari. **Tinjauan Buku:** Parties and Union in The New Global Economy, karya Katrina Burgess. **Dinamika:** Dinamika Perburuhan Indonesia Selama 2008.

Tulisan **pertama**, Paul L. Quintos, mengeksplorasi sebab dan akibat krisis finansial global dan dampaknya bagi pekerja di dunia. **Kedua,** Syarif Arifin, Fauzan dan Darisman, mengupas dampak krisis finansial bagi buruh dan serikat buruh di Indonesia. Dan, Bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis. **Ketiga**, Yasmine Soraya, menggambarkan situasi ketenagakerjaan di Eropa sebelum dan setelah krisis finansial (2007) serta memaparkan strategi-strategi yang diambil oleh serikat buruh di Eropa.

Jurnal Sedane Vol 7 No. 2, 2009, menurunkan tulisan: (1) Strategi Advokasi Upah oleh Iryadi. (2) "Pengaruh Fleksibilisasi Pasar Ketenagakerjaan dan Pengorganisasian Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia", oleh Sari Aneta. praktik Labor Market Flexibilitiy (LMF). (3) Dialog bersama Muhamad Rusdi (Sekretaris Jenderal Asosiasi Pekerja Seluruh Indonesia) dan Yehezkiel Dwiyunanto Prabowo (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Banten), mengenai dampak krisis keuangan terhadap serikat buruh. (4) Review buku "Rasta dan Perlawanan" oleh Fitri Indra Hardjanti. (5) Profile Tokoh Yehezkiel Dwiyunantha Prabowo (alm) oleh Fauzan. Dan, (6) Dinamika Perburuhan selama semester I (Januari-Juni 2009).

Artikel pertama, Iryadi memaparkan bagaimana upaya-upaya serikat, khususnya SPN Cimahi menggolkan upah sesuai kepentingan buruh. Artikel kedua, Sari Aneta memaparkan bagaiman dampak UUK No. 13/2003 terhadap serikat.

Alamat Redaksi dan Sirkulasi
LIPS (Lembaga Informasi Perburuhan Sedane)

Tlp. / Fax
62-251-8344473

Email:
lips@lips.or.id

Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) adalah Organisasi Non-Pemerintahan yang memokuskan kerjanya pada penyediaan informasi tentang dinamika keserikatburuhan di Indonesia, tentang pengembangan organisasi, tentang modul-modul pendidikan, dan informasi untuk demokratisasi dan politisasi serikat buruh.

LIPS memosisikan diri sebagai wadah komunikasi antaraktivis serikat buruh, aktivis Organisasi Non-Pemerintahan bidang perburuhan, intelektual dan akademisi dalam rangka merumuskan pemikiran-pemikiran inovatif untuk mewujudkan lahirnya gerakan buruh yang demokratis dan independen.

LIPS bercita-cita untuk mencapai kondisi dimana buruh yang merupakan satu elemen sosial dapat hidup sejahtera, bebas dari sistem kerja eksploitatif dan tidak adil, baik dalam hubungan jender maupun klas.
Buruh mendapatkan kebebasan berorganisasi sebagai ekspresi politiknya yang hakiki dan mampu terlibat dalam proses pengambilan keputusan negara yang memengaruhi nasib mereka.

Jurnal Sedane, diterbitkan secara mandiri oleh LIPS dua kali setahun, merupakan wadah mengembangan pemikiran alternatif dalam rangka melahirkan wacana gerakan buruh di Indonesia. lewat jurnal ini pengalaman dan pembacaan di lapangan direfleksikan, teori diaplikasikan, yang diharapkan dapat mendorong gerakan buruh yang demokratis dan independen.

ISSN 0852-1239

Referensi Perburuhan Terlengkap
Perpustakaan LIPS
Kumpulan berita perburuhan up to date
Kunjungi: www.lips.or.id